LAPKIN

LAPORAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2016

PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

MARET 2017

KATA PENGANTAR

Dengan mempersembahkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Papua ini dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 kepada seluruh stakeholders.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi Papua berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018.

Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2016 ini lebih diarahkan pada terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan Akuntabiltas Kinerja ini disusun dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Realisasi Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Materi LAPKIN mengandung analisis pencapaian indikator sasaran dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Idikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun yang bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja juga memuat informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemerintah Provinsi Papua dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, juga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Provinsi Papua pada masa mendatang.

Capaian sasaran Pemerintah Provinsi Papua yang diukur melalui indikator target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjan Kinerja (PK) tahun 2016 adalah predikat **"Sangat Berhasil".** Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Provinsi Papua.

Demikian Penyusunan LAPKIN Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016 kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan dalam rangka pengambilan kebijakan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Papua.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat.

Jayapura, 22 Maret 2017

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA 1

1.1.1. Kondisi Demografis 2

1.1.2. Kondisi Pemerintahan 5

1.1.3. Kondisi Perekonomian 8

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 10

1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 11

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 13

2.1. RENCANA STRATEGIS 13

2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi 13

2.1.2. Tujuan dan Sasaran 17

2.1.3. Strategi Pelaksanaan 21

2.1.4. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016 24

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 27

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 35

3.1. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 35

3.2. CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA 39

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 142

BAB IV

PENUTUP 153

A. SIMPULAN 153

B. UPAYA LEBIH LANJUT 156

LAMPIRAN :

- PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
- PERJANJIAN KINERJA 2016
- PERJANJIAN KINERJA 2017
- TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA
- GRAFIK TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA
- PENGHARGAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA BPPTM PROVINSI PAPUA
- PENGHARGAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016 menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua selama tahun 2016. Pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016 dapat dilihat dari keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dari target indikator berdasarkan Rencana Kinerja 2016 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018.

Dari hasil pengukuran kinerja pada 22 (dua puluh dua) sasaran, dapat disimpulkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua "**Sangat Berhasil"**, hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja pelaksanaan masing-masing sasaran sebagai berikut :

- 16 sasaran termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil".
- 3 sasaran termasuk dalam kategori "Berhasil".
- 1 sasaran termasuk dalam kategori "Cukup Berhasil".
- 1 sasaran termasuk dalam kategori "Kurang Berhasil".
- 1 sasaran termasuk dalam kategori "Tidak Berhasil".

Secara umum masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan target kinerja dikarenakan Pemerintah Provinsi Papua baru memiliki IKU.
2. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain :
   1) Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2016.
   2) Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.
   3) Belum tersusunnya SOP pada beberapa unit kerja dikarenakan terjadinya perubahan struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

3. Adanya tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
4. Kondisi geografis dan alam yang menghambat pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja sasaran.

Dari segi akuntabilitas keuangan, total anggaran belanja langsung Pemerintah Provinsi Papua tahun 2016 adalah sebesar Rp6.087.515.955.417,00 dan anggaran yang diperuntukkan melaksanakan prioritas Indikator Kinerja Utama (22 sasaran) adalah sebesar Rp4.119.154.730.822,00 atau 67,67 persen. Realisasi belanja prioritas IKU adalah Rp3.469.253.286.041 atau 84,18 persen dari anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU.

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2016 adalah Rp13.658.635.299.819,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp7.571.119.344.402,00 dan Belanja Langsung Rp6.087.515.955.417,00. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp4.119.154.730.822,00 atau 67,67persen dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp3.469.253.286.041,00 dari realisasi belanja langsung atau 85,97 persen. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU adalah 84,18 persen. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 84,18 persen tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA

1.1.1 Kondisi Geografis

Papua merupakan Provinsi terluas di Indonesia dengan luas 317.062,05 km^2.

Provinsi ini secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Samudra Pasifik
- Sebelah Selatan : Laut Arafura
- Sebelah Barat : Papua Barat
- Sebelah Timur : Papua New Guinea

Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 01º00' LU - 09º10' LS dan 134º00' BT - 141º05' BT. Provinsi Papua hingga tahun 2012, terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota.

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua

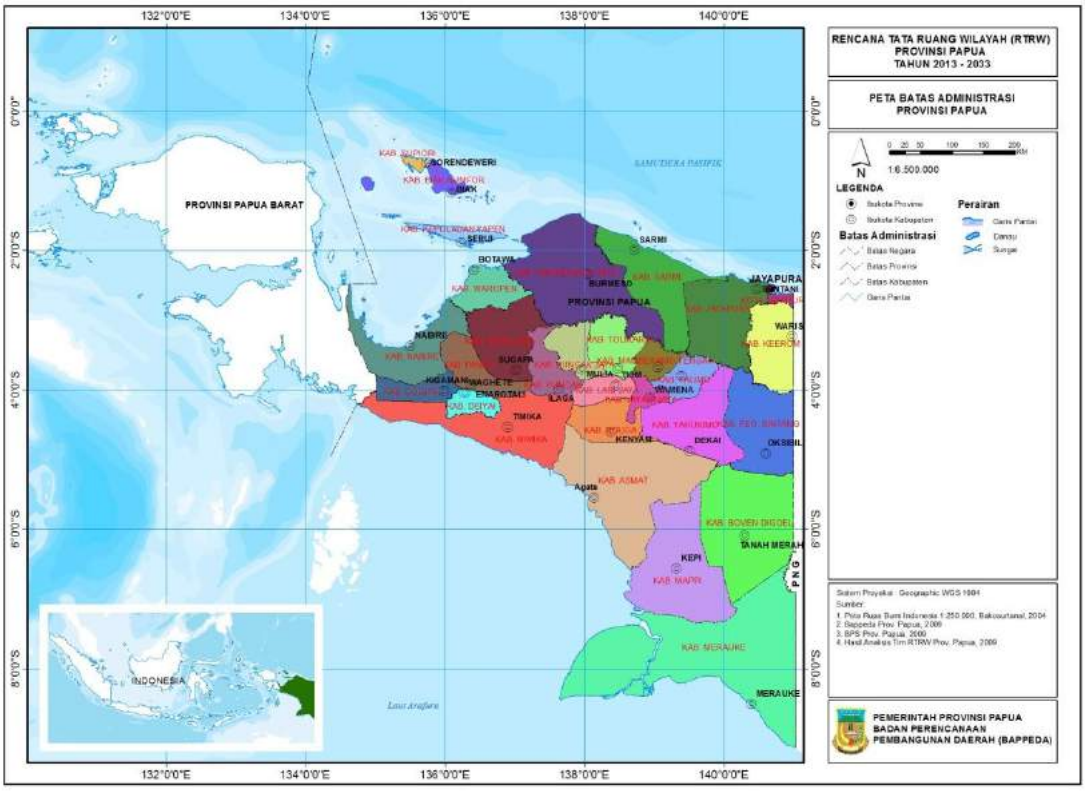

Topografi yang membentuk wilayah Provinsi Papua sangat bervariasi, mulai dari laut dangkal yaitu bagian dari Laut Arafura; dataran rendah hingga puncak gunung yang ditutupi oleh salju abadi di bagian tengah, perbukitan dan dataran di bagian utara, serta kepulauan di bagian utara.

Pada bagian tengah rangkaian pegunungan tinggi terdapat Pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena terdapat 3 puncak tertinggi yang selalu diselimuti oleh salju abadi di Puncak Jayawijaya dengan ketinggian 5,030 m, Puncak Trikora 5,160 m dan Puncak Yamin 5,100 m.

Gambar. 1.2 Peta Ketinggian Provinsi Papua

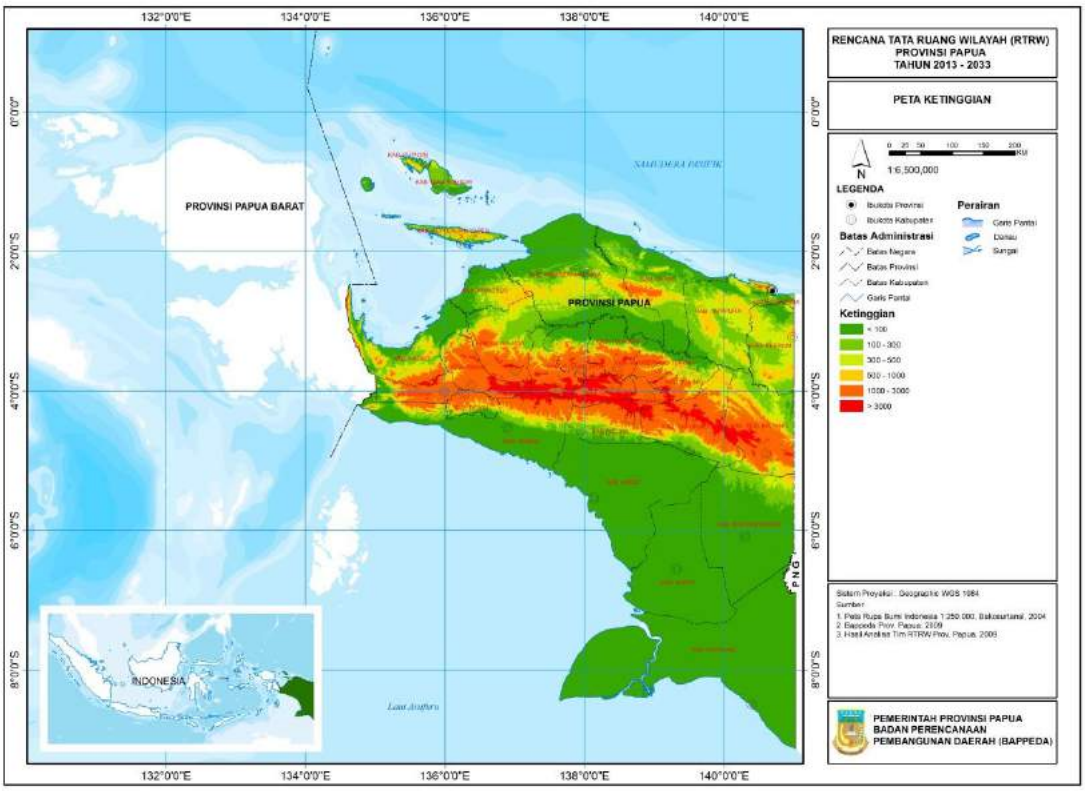

1.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Papua tahun 2016 adalah 3.207.440 juta jiwa yang tersebar di 29 kabupaten/kota.Jumlah penduduk terbesar mendiami Kota Jayapura sebesar 275.694 jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin sebesar 112,30, yang berarti terdapat 112 laki-laki setiap 100 perempuan.

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi PapuaTahun 2011 – 2016

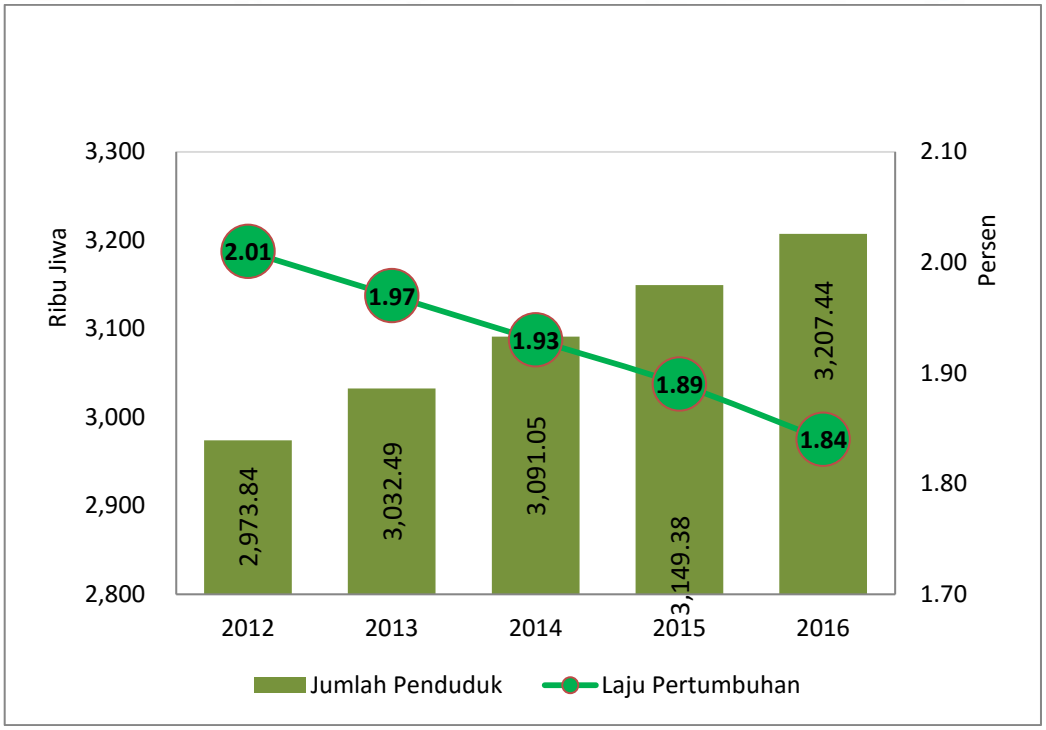

Sumber : BPS 2016

Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Sex Di Provinsi Papua Tahun 2010 – 2016

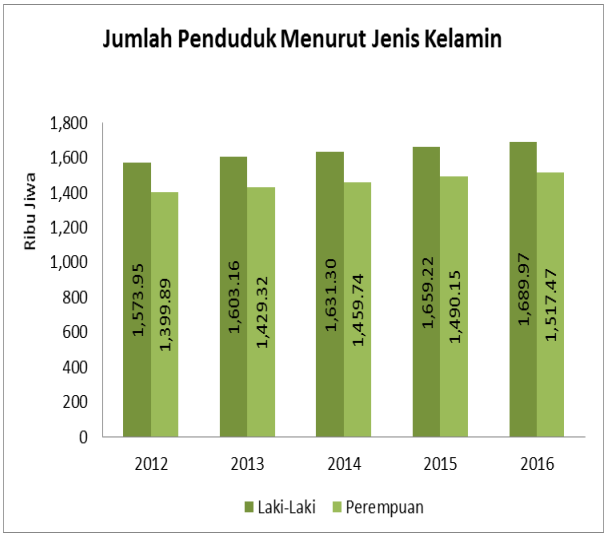

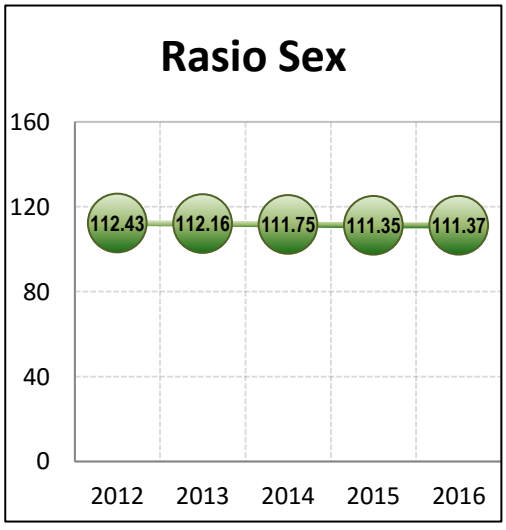

[a] Jumlah Penduduk Laku-Laki Dan Perempuan

[b] Rasio Sex

Dengan luas wilayah 316.553,07 km2, kepadatan penduduk di Papua sebanyak 10 jiwa per km2. Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Jayapura, yakni 287 jiwa per km2, diikuti Kabupaten Jayawijaya (87 jiwa per km2) dan Kabupaten Mimika (85 jiwa per km2). Sedangkan kepadatan terendah terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, yakni kurang dari 1 jiwa per km2.

Gambar 1.5 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2015

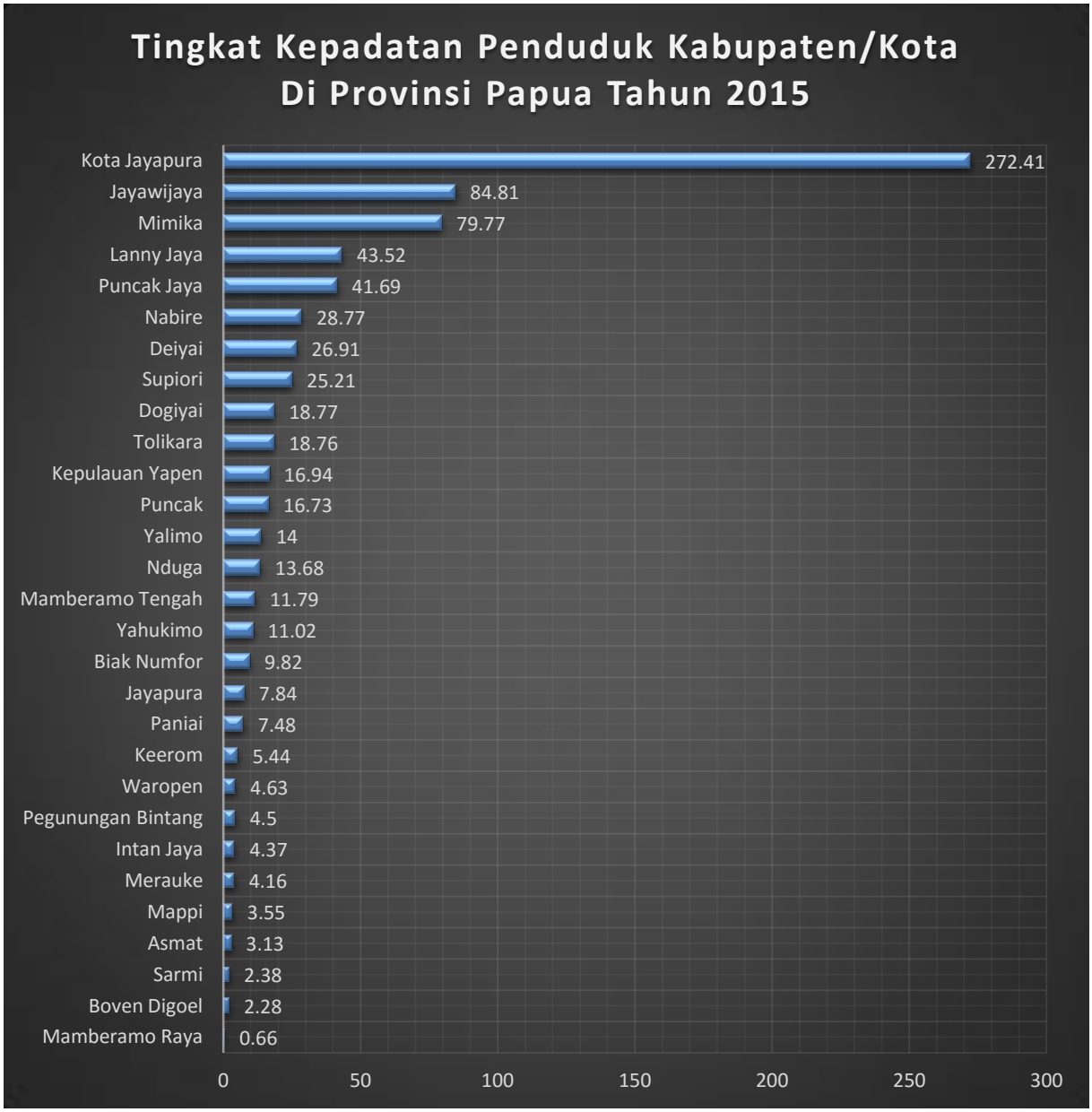

Penduduk Papua berdasarkan kelompok umur ternyata didominasi oleh kelompok usia muda (0-14 tahun). Kecilnya proporsi penduduk usia tua (kelompok usia 55 tahun keatas) menunjukkan bahwa tingkat kematian penduduk usia lanjut sangat tinggi. Selain itu, komposisi penduduk seperti di atas menyebabkan rasio ketergantungan *(dependency ratio)* di Papua tahun 2015 cukup tinggi, yaitu sebesar 66,89 persen.

Gambar 1.6 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2015

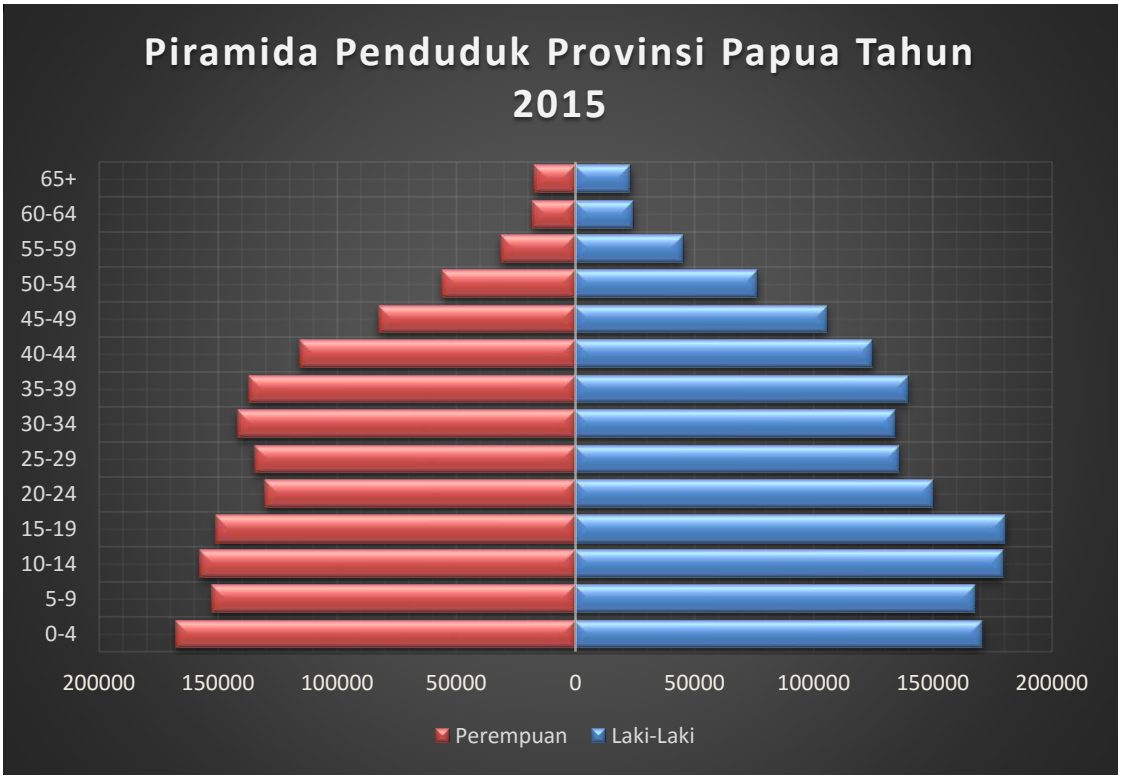

Sumber : Papua Dalam Angka, BPS 2015

1.1.3 Kondisi Pemerintahan

Provinsi Papua, terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan perkembangan jumlah distrik 389 dan 3.619 kampung. Dari kabupaten ini dibagi berdasarkan 5 (lima) wilayah pembangunan berbasis wilayah adat sebagai berikut :

Tabel 1.1 Nama Kabupaten, Ibu Kota, Jumlah Distrik dan Kampung

NAMA KABUPATEN	IBU KOTA	DISTRIK	KAMPUNG
WILAYAH SARERI			
Kab. Biak Numfor	Biak	19	187
Kab. Yapen Waropen	Serui	14	111
Kab. Supiori	Sorendiweri	5	38
Kab. Waropen	Waren	10	87
WILAYAH LA PAGO			
Kab. Jayawijaya	Wamena	11	117
Kab. Lanny Jaya	Tiom	10	143
Kab. Nduga	Kenyam	8	32
Kab. Pegunungan Bintang	Oksibil	34	277
Kab. Puncak	Ilaga	8	80
Kab. Puncak Jaya	Mulia	8	67
Kab. Tolikara	Karubaga	35	514
Kab. Yahukimo	Dekai	51	518
Kab. Yalimo	Elelim	5	27
WILAYAH MEE PAGO			
Kab. Nabire	Nabira	14	81
Kab. Mimika	Timika	12	85
Kab. Deiyai	Tigi	5	30
Kab. Dogiyai	Kigamani	10	79
Kab. Intan Jaya	Sugapa	6	37
WILAYAH HA ANIM			
Kab. Merauke	Merauke	20	168
Kab. Asmat	Agats	10	175
Kab. Boven Digoel	Tanah Merah	20	112
Kab. Mappi	Keppi	10	137
WILAYAH MAMTA			
Kota Jayapura	Jayapura	5	39
Kab. Jayapura	Sentani	19	144
Kab. Keerom	Arso	7	61
Kab. Sarmi	Sarmi	10	86
Kab. Mamberamo Raya	Burmeso	8	58

C. Struktur Organisasi

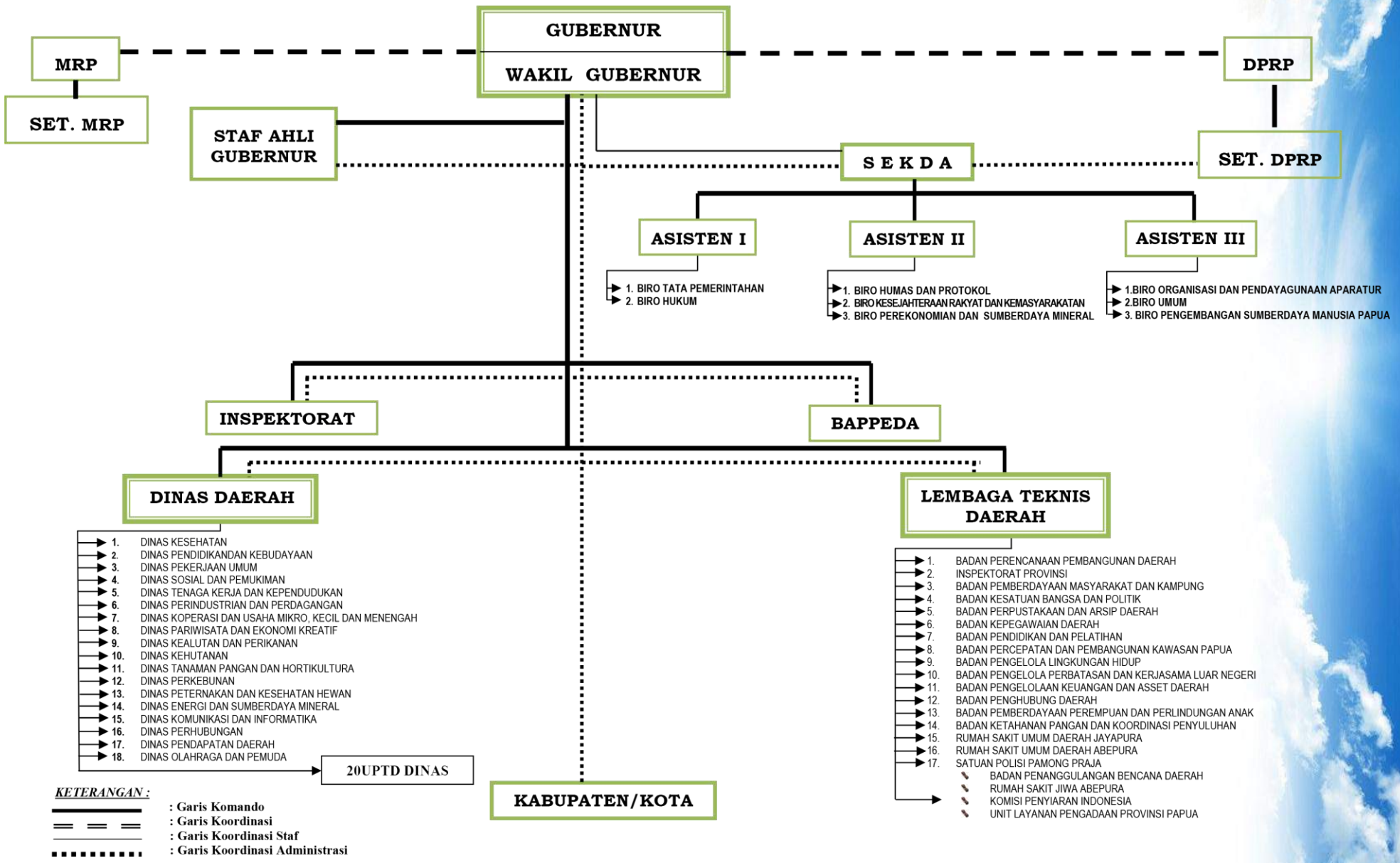

1.1.4 Kondisi Perekonomian

A. Struktur Ekonomi

Hingga tahun 2016, distribusi PDRB Provinsi Papua termasuk tambang belum mengalami perubahan yang signifikan. Sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi nilai PDRB Papua, namun demikian kontribusi sektor ini perlahan -lahan mengalami penurunan, khususnya dalam lima tahun terakhir yakni dari 39,28 persen di tahun 2013 menjadi 35,50 persen tahun 2016. Ini menandakan terjadi transformasi ekonomi Papua dari sektor primer ke sektor-sektor tersier dan juga terjadinya geliat pembangunan di Provinsi Papua.

Setelah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, Kehutanan, Perikanan merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi kedua terhadap perekonomian Papua. Tahun 2016, sumbangan sektor ini sebesar 12,11 persen, turun jika dibanding kontribusi di tahun 2012 (12,53 persen). Di urutan ketiga dan keempat, dengan peranan masing-masing sebesar 12,92 persen dan 9,48 persen adalah sektor konstruksi dan sektor pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Berbeda dengan sektor pertambangan dan penggalian, kontribusi sektor bangunan dan sektor jasa-jasa terhadap total nilai PDRB Provinsi Papua justru mengalami peningkatan, yaitu tahun 2011, kedua sektor ini berperan hanya sekitar 4 sampai dengan 7 persen.

Sementara itu, lima sektor lainnya berperan di bawah 6 persen dan jasa lainnya merupakan kontributor terendah bagi total nilai tambah sektor-sektor ekonomi di Provinsi Papua tahun 2016.

Namun pada triwulan III tahun 2016, kategori ekonomi yang memiliki peranan terbesar terhadap perekonomian Papua adalah kategori pertambangan dan penggalian sebesar 39,31 persen. Namun, jika kategori pertambangan dan penggalian dieliminir, kategori Konstruksi merupakan kategori yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Papua, sebesar 20,29 persen.

Gambar 1.7 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Provinsi Papua Dengan Tambang Tahun 2011-2016 (%)

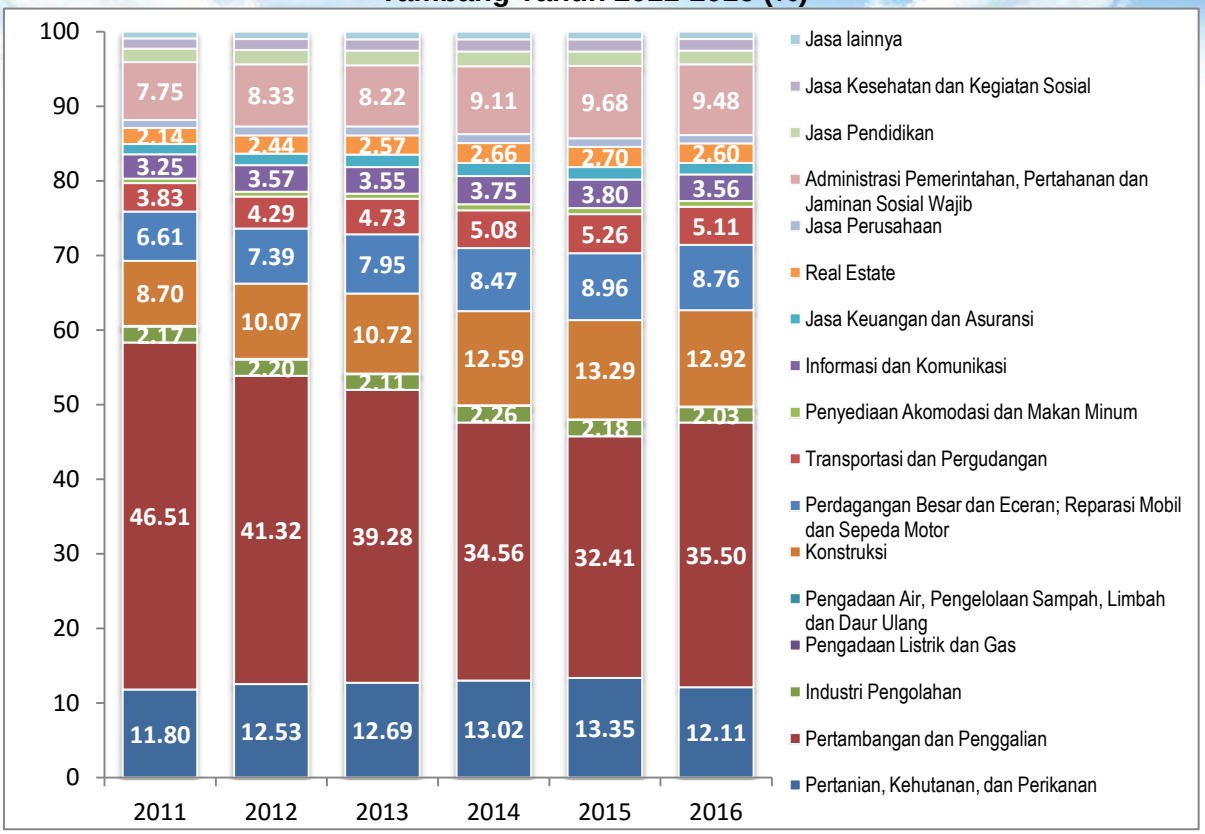

Gambar 1.8 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Provinsi Papua tanpa TambangTahun 2011- 2016 (%)

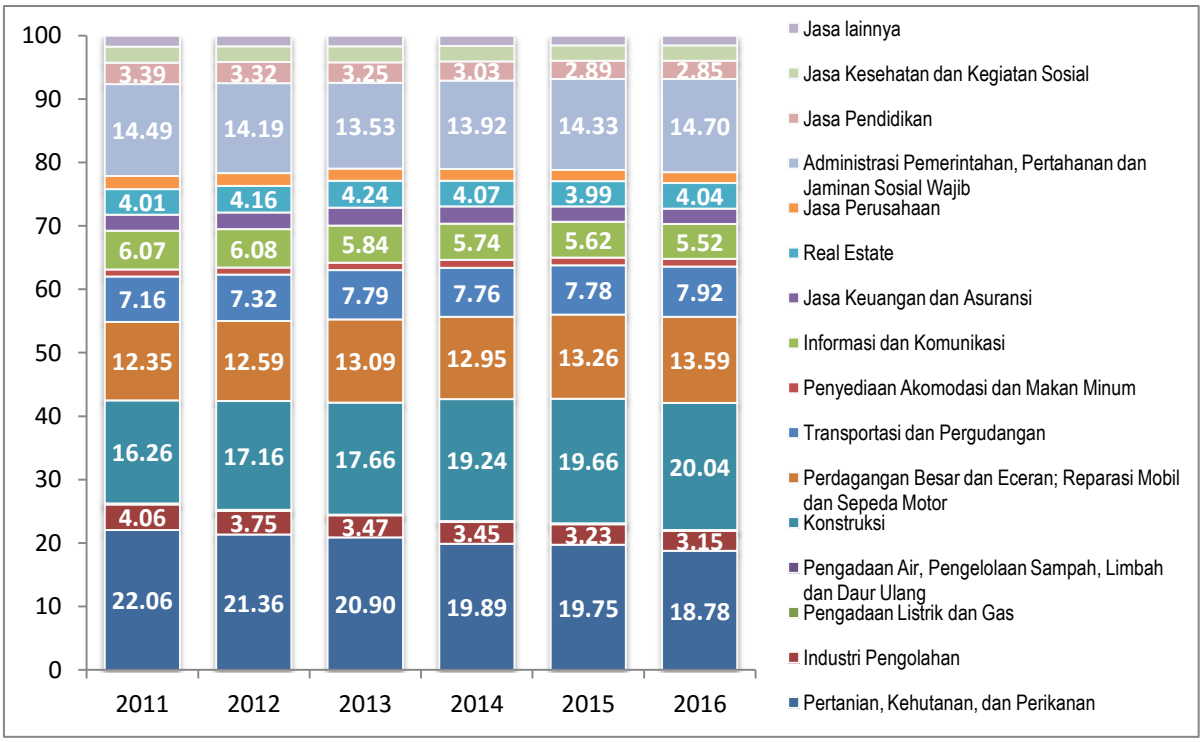

Sumber : PDRB Provinsi Papua, BPS 2016

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu di wilayah tersebut. PDRB dapat menggambarkan kondisi perekonomian di suatu wilayah pada waktu tertentu.

PDRB Papua yang diukur atas dasar harga berlaku Papua mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 nilai tambah yang dihasilkan sebesar 108,2 triliun rupiah. Pada tahun 2016 nilai tambah yang dihasilkan termasuk tambang mencapai 178,37 triliun rupiah meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 151,2 triliun rupiah.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2011 - 2016 (juta rupiah)

Tahun	Dengan Tambang		Tanpa Tambang	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2011	108,188,756.40	106,066,723.40	57,867,288.40	56,057,785.00
2012	112,812,560.50	107,890,942.60	66,200,779.30	61,089,708.40
2013	119,771,975.80	116,428,607.50	74,601,836.70	66,115,082.30
2014	133,329,981.21	121,391,233.95	87,256,179.46	71,811,420.99
2015	151,201,498.24	130,459,907.90	102,200,555.01	77,512,226.83
2016	178,370,342.93	142,476,351.89	115,053,624.64	82,566,157.41

Sumber : PDRB Prov Papua, BPS 2016

Sementara itu, PDRB dengan tambang atas dasar harga berlaku yang secara umum menggambarkan dinamika produksi seluruh aktifitas perekonomian di Provinsi Papua, pada tahun 2016 mencapai 178,37 trilliun rupiah. Nilai ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang telah mencapai 151,20 trilliun rupiah. Dengan mengeliminir nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas, PDRB Papua atas dasar harga berlaku tahun 2016 telah mencapai 115,05 trilliun. Sedangkan atas dasar harga konstan, PDRB Papua tahun 2016 tanpa tambang bernilai 82,57 trilliun rupiah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja *(performance improvement)* baik dalam bentuk

regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN), adalah :

1. Merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja *(performance improvement)* organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua.

1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi.

3.2 Capaian, Analisis, dan Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.3 Akuntabitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran sasaran dan program yang mendukung sasaran, yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : Penetapan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Papua untuk periode 5 tahun, yang memuat penjabaran visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pembangunan di Provinsi Papua. RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua tahun 2005-2025. RPMD Provinsi Papua disahkan melalui Perdasi No. 14 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2013 - 2018.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang diejahwantahkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD).

Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

”PAPUA BANGKIT, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”

Penjelasan masing-masing elemen visi diatas adalah sebagai berikut:

PAPUA BANGKIT :

Terwujudnya Masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi dilevel

individu, keluarga, komunitas, maupun regional.

Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dimana Orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik.

PAPUA MANDIRI :

Terwujudnya kondisi Masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan didukung Generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (*Enterpreneurship*) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya berbagai sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sektor kehutanan dan pariwisata harus dikembangkan sehingga memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, serta didukung pengembangan Industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

PAPUA SEJAHTERA :

Terwujudnya semua Masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat dikaitkan dengan terbebasnya masyarakat dari “rasa lapar” dan “rasa takut”. Di sini, kesejahteraan dikaitkan tidak saja pada konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Masyarakat

Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.

Gambar 2.1 Keterkaitan Visi Papua

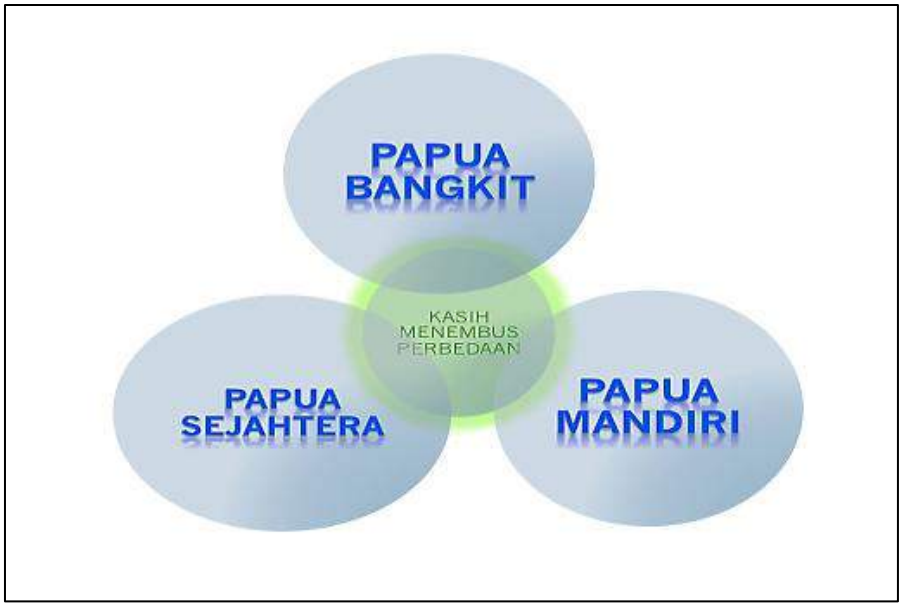

Sumber : Perdasi Nomor 14 tahun 2013

Dari gambar diatas tampak jelas bahwa **PAPUA BANGKIT** merupakan landasan utama untuk mewujudkan **PAPUA MANDIRI DAN SEJAHTERA**, selanjutnya untuk mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera diselimuti dengan prinsip **Kasih Menembus Perbedaan,** karena dengan kasih yang akan menembus segala sekat-sekat perbedaan yang ada, inilah yang disebut **Papua Yang Baru Dalam Bingkai Peradaban Baru Papua**.

Berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI.**
2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus.**
3. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia.**
4. **Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal.**
5. **Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.**

Penjelasan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Suasana Aman,Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI**

   Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana aman, tentram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua. Terwujudnya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*law enforcement*) dan terjaganya ketertiban umum. Kondisi dan suasana aman, tenteram dan nyaman merupakan potensi dan modal dasar pembangunan di Provinsi Papua.

2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta penguatan Otsus**

   Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta penguatan Otonomi Khusus Papua dalam Implementasinya sesuai dengan amanat UU No. 21 tahun 2001. Dinamika dan tuntutan masyarakat saat ini, menuntut setiap aparatur pemerintahan profesional dan akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upayanya, adalah dengan melakukan reformasi birokasi.

3. **Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia**

   Maksud dari misi ini adalah meningkatnya kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika dengan mengembangkan sistem nilai yang positif sesuai kearifan lokal budaya asli masyarakat Papua. Sebaliknya, kebiasaan masyarakat yang tidak baik perlu untuk terus diminimalisir. Sumber daya manusia adalah kekuatan yang bersumber dari manusia yang dapat disebut sebagai tenaga atau kekuatan (energi atau *power*). Daya yang bersumber dari manusia ini sering dipadankan dengan istilah ***man power.*** Membangun manusia berkualitas berarti membentuk manusia yang utuh dan bernilai positif dengan indikator-indikator kualitas antara lain adalah: sehat, sehingga mampu bekerja keras, tangguh dan ulet dalam menghadapi persoalan, cerdas berpikir dan bertindak, terampil dan memiliki kompetensi, mandiri, memiliki tanggung jawab, produktif, kreatif, inovatif, beorientasike masa depan, disiplin dan berbudi.

4. **Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal**

   Maksud dari tujuan Misi ini adalah membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal yang ditandai dengan terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari yang mendukung peningkatan pekenomian masyarakat khususnya di kampung-kampung.

5. **Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

   Maksud dari misi ini adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayahdalam mendukung pengembangan wilayah diwujudkan dengan meningkatkan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah, meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni, meningkatkan ketersediaan air bersih, meningkatnya ketersediaan energi listrik dan ramah lingkungan. Selain itu terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten. Penyediaan dan percepatan infrastruktur yang lebih merata dan terpadu yang ditujukan untuk mendukung perekonomian daerah dengan prinsip *Community dan Commodity Based Infrastructure, Integration dan Sustainability.*

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Penetapan Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Misi 1 : Mewujudkan Suasana Aman,Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI.

Tujuan 1: Mewujudkan suasana aman, tenteram dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan negara NKRI.

Terdapat 2 sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.
2. Meningkatnya Masyarakat Papua yang Berbudaya.

Tujuan 2 : Meningkatkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua.

Terdapat 2 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua.
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua.

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan otonomi khusus

Untuk mewujudkan maksud dari misi ini, dilakukan melalui 5 (lima) tujuan dan 14 (empat belas) sasaran pokok, yaitu :

Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel

Terdiri 5 sasaran pokok yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini, yaitu :

1. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur.
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi.
4. Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN.
5. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik.

Tujuan 2 : Mewujudkan Hubungan Kerja antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang harmonis

Tujuan ini dicapai dengan 3 sasaran pokok, yaitu:

1. Meningkatnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota.
2. Terbentuknya Badan Koordinasi wilayah Pembangunan berdasarkan 5 wilayah Adat.

3. Meningkatnya kemitraan antara Pemerintah, Lembaga Adat dan Agama (tiga tungku).

Tujuan 3 : Mewujudkan Hubungan Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Sasaran pokok untuk pencapaian tujuan ini, adalah :

1. Terwujudnya Hubungan Kerjasama yang Harmonis antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Tujuan 4 : Mewujudkan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Secara Konsekuen

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan 2 sasaran pokok yaitu :

1. Rekonstruksi Undang-undang No. 21 Tahun 2001 menjadi Undang-undang Otonomi Khusus Plus (UU Pemerintahan Papua).
2. Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.

Tujuan 5 : Penataan Sistem Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang mencerminkan Kebutuhan Fungsi-Fungsi Pemerintahan

Untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan 3 sasaran pokok, yaitu:

1. Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan.
2. Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan.
3. Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya PolaPikir (*Mindset*) Aparatur Pemerintah Daerah.

Misi 3 : Mewujudkan sumber daya manusia Papua yang sehat, berprestasi dan berakhlak mulia

Untuk mewujudkan misi ini dilakukan dengan melalui 2 (dua) tujuan dan 9 sasaran pokok, yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Layanan Sosial Budaya dan Keagamaan

Untuk mencapai tujuan meningkatkan layanan sosial budaya dan keagamaan dilakukan dengan 5 sasaran pokok yaitu :

1. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan.
2. Terwujudnya masyarakat religius, meningkatnya layanan sosial yang berkualitas.
3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.
4. Lestarinya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua.

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika

Terdapat 4 sasaran pokok untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika, yaitu:

1. Meningkatnya prestasi olahraga.
2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.
3. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil.

Misi 4 : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal

Untuk mewujudkan misi ini dilakukan melalui 2 tujuan dan 9 sasaran pokok :

Tujuan 1 : Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi lokal yang mandiri

Untuk mencapai tujuan pertama ini dilakukan dengan 7 sasaran pokok :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif.
2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi.
3. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah.
5. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakatdan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah.
6. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja.
7. Terselenggaranya promosi potensi kepariwisataan daerah.

Tujuan 2 : Menciptakan pengelolaan SDA secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan

Terdapat 2 sasaran pokok dalam perwujudan tujuan kedua ini, terdiri atas :

1. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perkenomian masyarakat.
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Misi 5 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mencapai maksud dari misi ini akan dilakukan atau diwujudkan melalui 2 tujuan utama dan 10 sasaran pokok :

Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah

Terdapat 6 sasaran pokok yang harus dipenuhi dalam pencapaian tujuan ini, yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah.
2. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah.
3. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah.
4. Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni.
5. Meningkatnya pemenuhan air bersih.
6. Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan.

Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan

Terdapat 4 sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten, terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia.
2. Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan.
3. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan.

2.1.3. Strategi Pelaksanaan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*).

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

a. Prinsip Dasar Pembangunan

Untuk periode 2013-2018, terdapat 5 (lima) prinsip dasar pembangunan adalah :

1. Perlindungan (*Protection*), sesuai amanat Undang-undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Papua diarahkan pada perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.
2. Keberpihakan (*Affirmative*), Afirmatif bagi orang asli Papua adalahkebijakan diskriminasi positif yang diambil dengan tujuan agar Orang Asli Papuamemperoleh kesempatan mendapatkan layanan yang lebih dengan alasan perbedaan kondisi awal sehingga dapat memperoleh peluang yang setara untuk bersaing dengankelompok/golongan lain dalambidang yang sama.
3. Pemberdayaan (*Empowerment*), bahwa arah kebijakan pembangunan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan.
4. Keberlanjutan (*Sustainability*), Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
5. Keterpaduan (*Integrated*), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua tahun 2013-2018 harus mampu memperkuat sinergi antar bidang, antar ruang dan waktu**.** Setiap SKPD pelaksana pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta pengendalian, monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.
6. Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), bahwa pelaksanaan pembangunan wajib mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Nilai-nilai Dasar Pembangunan

Adapun nilai-nilai dasar pembangunan adalah :

1. **Kecukupan *(Sustenance)*** : pembangunan diarahkan agar masyarakat merasa tercukupi semua kebutuhan dasar *(basic need)* seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. **Jati diri *(Self Esteem)*** : pembangunan membentuk motivasi seluruh masyarakat untuk berkeinginan untuk maju atau *need achievement*, menghargai diri sendiri & memiiki rasa percaya diri yg tinggi.
3. **Kebebasan *(Freedom)*** : pembangunan dilaksanakan dengan mendorong nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sehingga masyarakat bebas dalam bersikap dan berprilaku, rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan stigmasasi.

c. Orientasi Pembangunan

Orientasi pembangunan adalah pandangan yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, yaitu :

1. Pembangunan yang bertumpu pada rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat *(People Centered Development)*.
2. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (*Growth*), Pemerataan (*Equity*) dan Berkelanjutan (*Sustainable*).
3. Kewilayahan Dinamis Terpadu (*Spasial Dinamic Integrated*).

d. Strategi Pembangunan

Strategi untuk mencapai misi adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk mewujudkan suasana aman,tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI, yaitu :
   a) Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat.
   b) Penegakan Hukum dan revitalisasi peran Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

2. Strategi untuk **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan otonomi khusus, yaitu :**
   a) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.
   b) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

c) Penguatan fungsi koordinasi antar lembaga daerah dan penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Berbasis Otsus.

3. Strategi untuk **Mewujudkan sumber daya manusia Papua yang sehat, berprestasi dan berakhlak mulia, yaitu :**

   a) Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian kependudukan.
   b) Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial.
   c) Revitalisasi nilai-nilai budaya.
   d) Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda.
   e) Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan.

4. Strategi untuk **Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal, yaitu :**

   a) Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah.
   b) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam.

5. Strategi untuk **Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, yaitu :**

   a) Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah.
   b) Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kodisi dan budaya setempat.
   c) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan.

2.1.4. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016

a. Tema Pembangunan tahun 2016

Pelaksanaan pembangunan tahun 2015 merupakan tahun ke II pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua**.** Berdasarkan fokus pembangunan tahun 2015 yaitu Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perekonomian Berbasis Masyarakat Adat Dan Pencanangan Papua Investment Year 2016 dan tantangan serta permasalahan strategis tahun

2015, maka disusunlah arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2015.

Untuk itu tema pembangunan Provinsi Papua tahun 2016 adalah **"PENGUATAN KEMANDIRIAN DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN DAN INVESTASI YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN ".**

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 66A tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016.

Tema ini mengandung makna :

1. Untuk tahun 2016 akan diprioritaskan pada "Percepatan Kemajuan Perekonomian Daerah & Kualitas Hidup Masyarakat Papua" yang dilakukan melalui :
   - Mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat kampung, dengan program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung, serta pengembangan rantai ekonomi berbasis komoditas lokal.
   - Peningkatan Daya Saing, dengan prioritas pada peningkatan tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik, peningkatan Kualitas SDM Papua melalui Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh wilayah.
   - Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan konektivitas wilayah dan pemenuhan infrastruktur
   - Pemenuhan sarana prasarana dasar sosial (rumah, air bersih, energi listrik)
   - Percepatan Tuntas Buta Aksara dan Wajar 9 tahun serta kesehatan Ibu, Bayai dan Anak.
2. Pemantapan Sinergitas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
   - Memantapkan Pembangunan berbasis kewilayahan (5 wilayah pembangunan berbasis adat), yang dilakukan dengan percepatan pengembangan wilayah berbasis Kerjasama antar kabupaten/kota.

- Pemantapan pelaksanaan pemberian kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Penguatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah

3. Kemitraan Daerah
   - Pemantapan kemitraan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan dengan perwujudan kemitraan anatara Adat, Agama, Pemerinatah dan Swasta (AAPS)
   - Penguatan pemberdayaan masyarakat
   - Pemantapan koordinasi antar mitra kerja pembangunan (donors)

b. Prioritas Pembangunan Tahun 2016

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan tema pembangunan tahun 2016 sehingga lebih fokus, maka ditetapkan prioritas pembangunan, yaitu :

Tabel 2.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2016

No.	PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS
1	Peningkatan Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat Kampung	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil
		Terwujudnya masyarakat yang sehat
		Meningkatnya pemenuhan air bersih
		Meningkatnya pemenuhan energi Murah dan Ramah Lingkungan
		Meningkatnya prestasi olahraga
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
		Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
2	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan pendidikan Dasar dan Menengah	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil
3	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Derajat Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang sehat
4	Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dan Perekonomian Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berkelanjutan	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
		Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
		Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja

No.	PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS
		Implementasi Rencana Tata Ruang secara Konsisten
		Terwujudnya Papua sebagai Paru-paru Dunia
		Meningkatnya peran Sektor Pariwisata dalam perekonomian Daerah
		Terwujudnya Pengelolaan SDA secara Lestari mendukung Peningkatan Perekonomian Masyarakat
		Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi dan Daya Saing Daerah
5	Percepatan Pembangunan Infratruktur Dasar Kewilayahan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
		Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah
		Implementasi Rencana Tata Ruang secara Konsisten
6	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan, Ketentraman, Supremasi Hukum dan Penegakkan HAM	Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua
		Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatu
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi
		Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN
		Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan Kinerja (TAPKIN) pada dasarnya adalah pernyataan yang merepresentasikan tekad dan janji atau **Harapan Seluruh Rakyat (HASRAT)** Papua untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada antara Gubernur yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja dalam hal ini masyarakat. Dengan demikian, Penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Penyusunan TAPKIN 2016 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD dan IKU, RKPD tahun 2016, serta APBD Provinsi Papua tahun 2016.

Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan TAPKIN sebagai berikut.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Provinsi Papua Tahun 2016

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
1	Meningkatnya rasa aman, tenteram, nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	%	100.00
		2	Penururnan konflik horisontal berdasarkan SARA	%	18.00
		3	Angka kriminalitas	%	33.00
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	%	100.00
		2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	%	71.00
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	CC
		4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP
		5	Rata-rata kehadiran pegawai	%	90.00
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	50.00
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	%	100.00
		2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	%	55.00
5	Peningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Angka	70.00
		2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	4.00
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	%	100.00
		2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	400.00
		3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	54.00
		4	Penanganan Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	%	100.00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
		5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	%	70.00
		6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	%	100.00
		7	Angka usia harapan hidup	Angka	67.00
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1	Persentase angka melek huruf	%	85.00
		2	Rata-rata lama sekolah	%	6.00
		3	APK PAUD/TK	%	10.00
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	90.00
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	70.00
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	%	60.00
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	79.00
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	48.00
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	%	40.00
		10	Angka putus sekolah SD/MI	%	1.00
		11	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	1.00
		12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	%	1.00
		13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	%	60.00
		14	Persentase angka kelulusan SD/MI	%	100.00
		15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	%	100.00
		16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	%	100.00
8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase atlet/klub olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	%	25.00
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	%	8.00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	%	85.00
		2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA	%	60.00
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	%	11.00
		2	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	%	19.00
		3	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	%	25.00
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1	Tingkat pengangguran terbuka	%	3.50
		2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	83.00
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perkonomian daerah	1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	%	10.00
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	%	5.00
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	%	1.30
		2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	1.20
		3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	4.50
		4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	10.00
		5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	2.20
		6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	30.00
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	%	8.00
		2	PDRB per Kapita		31 Juta
		3	Inflasi	%	5.00
		4	Indeks Gini		0.41
		5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	2.50
		6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	%	10.00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	30.00
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	50.00
		3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	1:110
		4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	4 juta
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	%	65.00
		2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	%	60.00
		3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	%	15.00
		4	Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	%	2.00
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1	Pemenuhan Rumah Layak Huni	%	40.00
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1	Persentase RT yang terlayani air bersih	%	55.00
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1	Rumah Tangga pengguna listrik	%	40.00
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	%	100.00
22	Terwujudnya Papua sebagaiparu-paru dunia	1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	%	85.00
		2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	2.00
		3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	%	30.00

Tabel 2.3 Belanja Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016
(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	7.155.348.541.684,00	53,93
2	Belanja Langsung	6.113.111.815.020,00	46,07
JUMLAH		**13.268.460.356.704,00**	**100**

Sumber: BPKAD Provinsi Papua Tahun 2016

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2016

SASARAN		ANGGARAN	% ANGGARAN
1		*2*	*3*
1	Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua Jumlah peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	**97.438.660.400,00**	**1,60**
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	**65.320.215.154,00**	**1,07**
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	**579.650.000,00**	**0,01**
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	**16.751.090.000,00**	**0,28**
5	Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	**66.726.148.300,00**	**0,55**
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	**484.771.555.531,00**	**7,96**
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	**100.845.181.500,00**	**1,66**
8	Meningkatnya prestasi olahraga	**389.521.805.000,00**	**6,40**
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	**3.184.850.000,00**	**0,05**
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	**8.392.723.000,00**	**0,14**
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	**24.304.729.100,00**	**0,40**
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	**26.093.096.500,00**	**0,43**
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perkonomian daerah	**11.757.260.000,00**	**0,19**
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	**214.447.705.205,00**	**3,52**
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	**28.902.326.250,00**	**0,47**
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	**2.211.774.844.377,00**	**36,33**
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	**231.082.824.000,00**	**3,80**
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	**96.320.000.000,00**	**1,58**
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	**6.232.700.000,00**	**0,10**
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	**12.129.350.000,00**	**0,20**
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	**4.984.500.000,00**	**0,08**
22	Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia	**17.593.516.505,00**	**0,29**
JUMLAH ANGGARAN PRIORITAS IKU		**4.119.154.730.822,00**	**67,67**
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		**6.087.515.955.417,00**	

Pada tabel di atas, pada pos belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp4.119.154.730.822,00 atau sebesar 67,67 persen dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp1.968.361.224.595,00 atau 32,33 persen dari total anggaran belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran pembangunan dengan anggaran paling besar adalah sasaran Layanan publik meningkat, terutama pada Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan besaran anggaran 36,33 persen dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Sehat yaitu sebesar 7,96 persen. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi sebesar 0,01 persen dari total anggaran belanja langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah pemerintah daerah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua melaporkan dan mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana kinerja dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016.

Karena itu Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen membangun akuntabilitas melalui pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan, dan berorientasi pada pencapaian kinerja serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA
1		2		3	4	5	6
1	Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	persen	100,00	100,00	100,00
		2	Penurunan konflik horisontal berdasarkan SARA	persen	18,00	65,22	27,95
		3	Angka kriminalitas	persen	33,00	38,19	86,41

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA
1		2		3	4	5	6
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	persen	100,00	96,63	96,63
		2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	persen	71	31,00	43,66
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	CC	CC	100,00
		4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	100
		5	Rata-rata kehadiran pegawai	persen	90,00	97,94	108
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	persen	50,00	10,40	20,80
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	persen	100,00	100,00	100
		2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen	55,00	53.40	97,09
5	Peningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	persen	70,00	71,46	102,08
		2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	persen	4,00	3,33	83,25
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	persen	100,00	100,00	100,00
		2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	400,00	313,00	127,800
		3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	54,00	7,00	771,43
		4	Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	persen	100,00	48,00	48,00
		5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	persen	70,00	28,10	40,14
		6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	persen	100,00	100,00	100,00
		7	Angka usia harapan hidup	Angka	67,00	65,10	97,16

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2		3	4	5	6
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1	Persentase angka melek huruf	persen	85,00	84,84	99,81
		2	Rata-rata lama sekolah	persen	6,00	5,99	99,83
		3	APK PAUD/TK	persen	10,00	37,82	378,20
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	persen	90,00	93,14	103,49
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	persen	70,00	60,96	87,09
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	persen	60,00	54,04	90,07
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	persen	79,00	82,69	104,67
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	persen	48,00	41,68	86,63
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	persen	40,00	44,81	112,03
		10	Angka putus sekolah SD/MI	persen	1,00	0,88	133,63
		11	Angka putus sekolah SMP/MTs	persen	1,00	1,51	66,23
		12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	persen	1,00	1,04	96,15
		13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	persen	60,00	31,00	51,67
		14	Persentase angka kelulusan SD/MI	persen	100,00	99,98	99,98
		15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	persen	100,00	100,00	100,00
		16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	persen	100,00	100,00	100,00
8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase cabang olah raga yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional	persen	25,00	74,29	294,16
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	persen	8,00	7,71	96,37
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	persen	85,00	47,24	55,58
		2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA	persen	60,00	28,26	47,10
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	persen	11,00	4,73	43,00
		2.	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	persen	19,00	18,00	94,73
		3.	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	persen	25,00	37,70	150,80
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1	Tingkat pengangguran terbuka	persen	3,50	2,97	117,85
		2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	83,00	78,28	94,31

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA
1		2		3	4	5	6
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perkonomian daerah	1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	persen	10,00	12,92	129,00
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	persen	5,00	7,75	155
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (persen)	persen	1,30	1,30	100,00
		2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (persen)	persen	1,20	0,87	72,50
		3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (persen)	persen	4,50	5,14	114,22
		4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	persen	10,00	21,00	210,00
		5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	persen	2,20	2,90	131,82
		6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	30,00	35,50	118,33
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	persen	8,00	9,21	115,13
		2	PDRB per Kapita		31 juta	55,61	179,39
		3	Inflasi	persen	5,00	4,13	121,07
		4	Indeks Gini	persen	0,41	0,39	105,13
		5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	persen	2,50	2,03	81,20
		6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	persen	10,00	7,95	79,50
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	persen	30,00	21,08	70,27
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	50,00	25,45	50,90
		3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:110	1:106	103,77
		4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	4 juta	3.501.758	87,54
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	persen	65,00	67,33	103,58
		2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	persen	60,00	88,19	146,98
		3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	persen	15,00	28,50	190,00
		4	Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	persen	2,00	37,79	1889,50

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2		3	4	5	6
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1	Jumlah Rumah Layak Huni yang di butuhkan	persen	40,00	52,51	131,28
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1	Persentase RT yang terlayani air bersih	persen	55,00	43,82	79,67
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1	Rumah Tangga pengguna listrik	persen	40,00	50,97	127,43
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	persen	100,00	100,00	100,00
22	Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia	1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	persen	85,00	82,64	97,22
		2	Kerusakan Kawasan Hutan	persen	2,00	2,20	90,91
		3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	persen	30,00	25,72	85,73

3.2 CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA

Kesepakatan skala ordinal penilaian untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Ordinal

NOMOR	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	91 ≥	Sangat berhasil
2.	76 ≥ 90	Berhasil
3.	66 ≥ 75	Cukup berhasil
4.	51 ≥ 65	Kurang berhasil
5.	0 ≥ 50	Tidak berhasil

Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana program, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka perwujudan visi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan penyebab ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena Pemerintah Provinsi Papua memiliki struktur organisasi sebagai pelaksana kegiatan maka segala pencapaian komponen Rencana Stratejik tidak dapat dilepaskan dari bidang-bidang yang menangani pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pencapaian sasaran - sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2016 oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah sebanyak 22 sasaran stratejik, dan capaian yang dihasilkan berdasarkan Kategori Pencapaian Sasaran adalah:

Sasaran 1 : Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan Terhadap Hukum Seluruh Masyarakat Papua

Kondisi dan suasana aman, tenteram dan nyaman merupakan potensi dan modal dasar pembangunan di Provinsi Papua. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan iklim kondusif bagi terciptanya kenyamanan bagi seluruh Masyarakat Papua dan investasi ke Papua untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penciptaan tata kehidupan masyarakat Papua yang religius dan berbudaya melalui optimalisasi peran lembaga keagamaan dan lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka aktualisasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya asli Papua. Pijakan pada nilai-nilai agama dan adat diperlukan agar upaya penciptaan keamanan dan ketertiban itu dilembagakan sendiri oleh masyarakat. Selain itu meningkatkan rasa aman, tenteram dan nyaman diupayakan melalui penegakan hukum dan revitalisasi peran masyarakat, dengan mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah.

Terkait sasaran di atas, ada 4 (empat) indikator yang mengukur pencapaian kinerja untuk sasaran 1 ini, yaitu

1. Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif
2. Penururnan konflik horisontal berdasarkan SARA
3. Angka kriminalitas.

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran I

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	persen	100,00	100,00	100,00
2	Penurunan konflik horisontal berdasarkan SARA	persen	18,00	65,22	27,59
3	Angka kriminalitas	persen	33,00	38,19	86,41
Rata-rata Capaian Kinerja sasaran					**71,33**

Untuk tahun 2016, rata-rata capaian kinerja sasaran **Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan Terhadap Hukum Seluruh Masyarakat Papua** menunjukkan capaian kinerja sebesar **71,33** persen dengan predikat "**cukup berhasil",** terdapat 3 indikator yang terealisasi mencapai target.

Indikator **persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif** untuk tahun 2016, realisasi kinerjanya mencapai 100 persen atau mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung dari 5 (lima) Program yaitu : Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Peningkatan dan Pembinaan dibidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan, Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, yang menghasilkan :

- Keputusan Gubernur : 475 dokumen
- Peraturan Daerah (PERDA) : 20 dokumen
- Peraturan Gubernur (PERGUB) : 85 dokumen

Persentase konflik horizontal berdasarkan SARA Tahun 2016 untuk capaian indikator 2 sebesar 27,59 persen dimana jumlah konflik horizontal berdasarkan SARA dalam tahun 2016 terjadi sebanyak 23 kasus yang terjadi beberapa Kabupaten di Provinsi Papua.

Tabel 3.4
Jumlah Konflik Horizontal Berdasarkan SARA Tahun 2016

No	Wilayah Hukum	Jumlah Hukum	Penyebab Konflik
1	2	3	4
1	Kota Jayapura	8	MIRAS, Penganiayaan, Perselisian, Penyerangan
2	Jayapura	5	MIRAS, Penganiyaan, Sengketa Tanah
3	Keerom	1	Pencurian
4	Mimika	6	MIRAS, Perkelahian, Penganiayaan
5	Nabire	1	Penganiayaan
6	Lanny Jaya	1	Pembunuhan
7	Yahukimo	1	Kesalahpahaman
23 Kasus			

Sumber : POLDA Papua tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 23 Kasus yang terjadi di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota antara lain : Kota Jayapura, Kab.Jayapura, Kab.Keerom, Kab.Mimika, Kab. Nabire, Kab.Lanny Jaya dan Kab. Yahukimo dengan jumlah kasus terbanyak terjadi di wilayah hukum kota Jayapura 8 Kasus dengan prosentase sebesar 34,78persen dan konflik terendah terjadi di 4 (empat) Kabupaten yaitu Keerom, Nabire, Lanny Jaya dan Yahukimo dengan jumla kasus per Kabupaten 1 (satu) kasus. Adapun penyebab dari konflik yang terjadi antara lain MIRAS, Penganiayaan, Perselisihan dan Penyerangan.

Konflik-konflik yang terjadi, cenderung mengalami peningkatan dan lebih banyak disebabkan karena konflik antar etnis/suku atau adat mengingat masyarakat Papua masih kuat memegang nilai-nilai adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan diantar mereka dibandingkan pendekatan hukum positif.

Grafik 3.2 Perkembangan Konflik Akibat SARA tahun 2013-2016

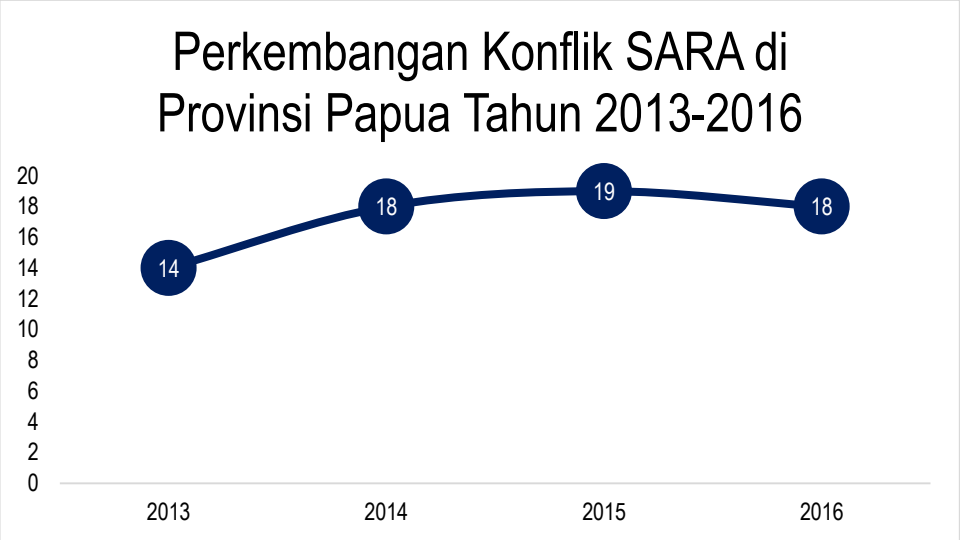

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua

Persentase Angka Kriminalitas Tahun 2016 untuk capaian indikator 3 sebesar 86,41 persen dengan jumlah kasus sebanyak 8765 kasus dan yang ditangani sebanyak 3347 kasus. Dalam tahun 2015 sesuai data dari POLDA Papua terjadi kasus kriminalitas sebanyak 5418 kasus dan dalam tahun 2016 terjadi sebanyak 8765 kasus sehingga terjadi kenaikan 3347 kasus yang tertangani dengan tingkat penyelesaian juga mengalami kenaikan sebayak

1842 kasus dari penyelesaian 2991 kasus tahun 2015 meningkat menjadi 3347 kasus di tahun 2016.

Grafik 3.1 Perkembangan Kasus Kriminalitas yang Ditangani Tahun 2012-2016

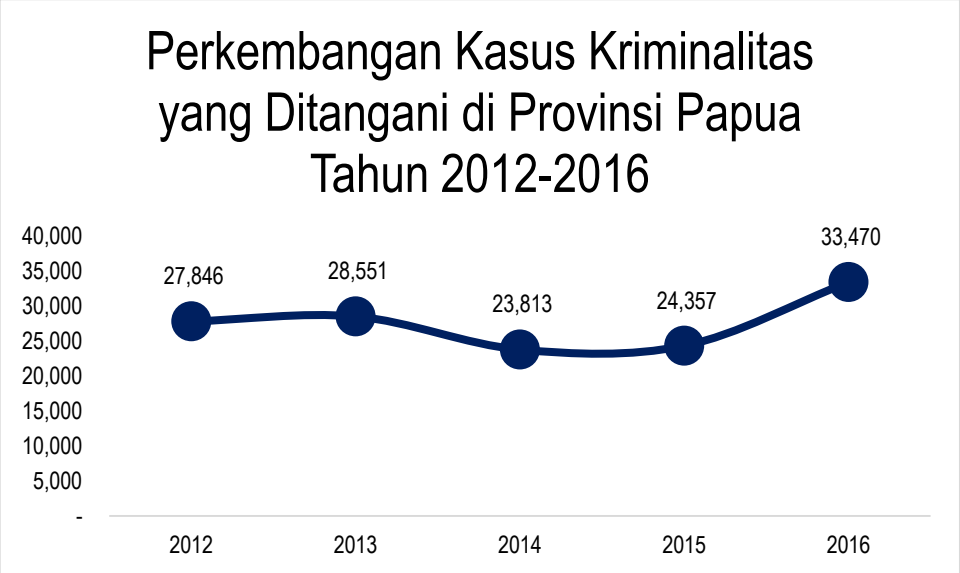

Sumber : Kepolisian Daerah Papua, 2016

Sasaran 2 : Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur

Sasaran Kinerja **Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur**" merupakan sasaran yang menggambarkan kondisi dan keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan Struktural maupun fungsional dalam pemerintahan serta hasil penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah melalui evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dan juga laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana dalam penyelenggaraan program-program pemerintah daerah serta tingkat disiplin aparatur.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur"** adalah 89,67 persen atau dalam skala ordinal adalah **"Berhasil"**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 5 (lima) indikator sasaran.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	persen	100,00	96.63	96,63
2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	persen	71,00	31.00	43.66
3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	CC	CC	100,00
4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	100,00
5	Rata-rata kehadiran pegawai	persen	90.00	97.94	108.00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**89,67**

Indikator **Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan** ditargetkan sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebanyak 96,63 persen dengan jumlah pejabat struktural sebanyak 880 pejabat dan jumlah pejabat yang memenuhi syarat menduduki jabatan sebanyak 874 pejabat, Capaian ini menunjukkan bahwa dari seluruh pejabat struktural yang telah dilantik, seluruhnya telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan, lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandan dilakukan pada tingkat nasional.

Target indikator **persentase struktural yang memenuhi jabatan** ditetapkan sebesar 100 persen dengan alasan masih terdapat beberapa SK jabatan struktural yang perlu dan telah di revisi dan masih terdapat jabatan eselon III dan eselon IV yang belum diisi atau belum ada pelantikan lagi sehingga apabila target ditetapkan 100persen maka pencapaian target indikator ini tidak akan tercapai. Dibanding tahun 2014 mengalami kenaikan dari 100 persen menjadi 99,32 persen. Kenaikan yg tidak terlalu signifikan namun sudah menggambarkan capaian yang melebihi target.

Indikator **Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan** tercapai 43,66 persen dari target yang ditetapkan sebesar 71,00 persen. Dibanding tahun 2014 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan namun sudah menggambarkan capaian yang melebihi target. Capaian indikator sebesar 43,66 persen disebabkan adanya jumlah jabatan fungsional yang ada ditahun 2016 sebanyak 286 pejabat dari 404 jumlah kebutuhan pejabat fungisional yang telah ditetapkan atau dilantik oleh SKPD yang bersangkutan seperti pada RSUD Jayapura tetapi data pejabat fungsional yang ditetapkan tersebut tidak dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua

sehingga data yang ada pada BKD belum menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Indikator persentase **Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN dan RB RI)** Hasil evaluasi KEMENPAN dan RB untuk nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2014 adalah C dengan nilai 48,42 persen dan tahun 2015 yaitu C dengan nilai 46,04 persen tidak terjadi peningkatan karena nilai evaluasi AKIP nya tetap sama C namun dari sisi nilai mengalami penurunan karena adanya penurunan Bobot penilaian oleh KEMENPAN dan RB yaitu pada bobot penilaian Perencanaan Kinerja tahun 2015 menjadi 30 persen sedangkan tahun 2014 mendapat bobot penilaian 35 persen. Target AKIP 2016 Pemerintah Provinsi Papua menargetkan CC sehingga capaian kinerja menjadi 100 persen.

Berikut Perkembangan AKIP Provinsi Papua untuk tahun 2014-2015 oleh KEMENPAN dan RB RI yaitu :

Tabel 3.6

No	Komponen Yang dinilai	2014		2015	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	**Perencanaan Kinerja**	**35**	*18,18*	**30**	*16,59*
2	**Pengukuran Kinerja**	**20**	*6,45*	**25**	*9,56*
3	**Pelaporan Kinerja**	**15**	*8,55*	**15**	*7,79*
4	**Evaluasi Internal**	**10**	*4,55*	**10**	*2,62*
5	**Capaian Kinerja**	**20**	*10,69*	**20**	*9,48*
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	*48,42*	**100**	*46,04*
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**C**		**C**

Berdasarkan penilaian AKIP 2015 Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPAN dan RB RI maka telah diberikan catatan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua. Berikut Hasil evaluasi secara singkat dari KEMENPAN dan RB RI tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum terdapat sedikit penurunan nilai akuntabilitas Pemerintah Provinsi Papua yang disebabkan selain karena standar atau kriteria penilaian yang semakin dalam dan subtantif, juga karena belum terlihat upaya serius yang nyata dan signifikan dan terukur dari Pemerintah Provinsi Papua untuk menerapkan manajemen berbasis kinerja atau sistem akuntabilitas kinerja. Kriteria penilaian yang ditetapkan saat ini, selain mengacu pada kebijakan tertulis yang ada, juga menuntut instansi pemerintah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan mempraktikkan manajemen berbasis kinerja dan mengacu pada praktik baik (best practices) yang berlaku ditempat lain dengan tetap mengacu dan selaras dengan kebijakan tertulis yang berlaku;
2. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), hal lain yang dievaluasi dan perlu mendapat perhatian serius dengan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan implementasinya adalah :
    a. Belum seluruh SKPD menerapkan sistem akuntabilitass kinerja (menyusun RENSTRA, Perjanian Kinerja, memiliki Indikator Kinerja Utama(IKU) dan menyusun Laporan Kinerja);
    b. Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun Indikator Kinerja Utama, namun dari hasil evaluasi masih terdapat Indikator yang belum spesifik, relevan dan terukur. Kondisi tersebut menganggu proses pengukurandan simpulan capaian kinerjanya;
    c. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau memprasyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Pengesahan anggaran lebih mengacu pada kesesuaian nama program dan kegiatan, kode rekening, serta pengangaran yang tersedia, kurang menekankan atau menagih hasil (outcome) yang mungkin belum selesai (tertunggak). Praktek seperti ini tidak mendorong SKPD untuk mengutamakan kinerja atau menerapkan anggaran berbasis kinerja;

d. Perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani belum dimonitor dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan keberhasilan pimpinan SKPD, dan penjenjangan kinerja (cascading) minimal sampai eselon IV belum terbentuk;

e. Inspektorat belum menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja yang berlaku dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, hal tersebut mempengaruhi kualitas evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerjaSKPD;

f. Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Terhadap permasalahan tersebut diatas, direkomendasikan :

a. Kepada BAPPEDA untuk memastikan tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikandan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan;

b. Menyusun, mereviu dan menyempurnakan IKU setiap SKPD dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur dan khas atau unik menggambarkan efektifitas dan alasan keberadaan pemilik IKU (SKPD) tersebut dan memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal;

c. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh SKPD mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud)sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh SKPD dapat mengaitkan kinerja utama (Indikator dan target) dengan penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya);

d. Kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) untuk memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau kesepakatan kinerja, yang menyajikan dan menjanjikan kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaandan alasan keberadaan entitas, mulai dari tingkat SKPD, eselon III, IV sampai kepada tingkatan paling rendah yang paling mungkin;

e. Melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati ditiap tingkatan dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward and recognition) atas capaian kinerja yang pantas;

f. Agar BAPPEDA melakukan evaluasi program dalam rangka memastikan tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan yang ada di Papua. BAPPEDA harus memastikan keberhasilan maupun kekurangberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan di akhir periode RPJMD Provinsi Papua;

g. Agar Inspektorat menyusun Pedoman Evaluasi Akuntabilitas, memastikan tersedianya evaluator cukup terlatih untuk meningkatkan kualitas hasil evaluasinya;

h. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu direkomendasikan agar Pemerintah Provinsi Papua lebih transparan dengan memastikan diunggahnya dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh public kedalam laman (website) resmi milikPemerintah Provinsi Papua dan/atau milik SKPD dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (updated);

i. Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk terus mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil AKIP 2015 yang telah disampaikan oleh KEMENPAN dan RB RI maka di tahun 2016 Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua antara lain :

1. SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua telah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU SKPD) dan Perjanjian Kinerja (PK) 2016 yang telah ditandatangani Gubernur Papua selaku pemberi amanah dan telah ditandatangani oleh Pimpinan SKPD selaku penerima amanah. Hal ini diberlakukan karena sejak 2014 dan 2015 hal tersebut tidak tuntas dilakukan karena mengalami kendala-kendala teknis.

   Tujuan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU SKPD) dan Penetapan Kinerja (PK) 2016 adalah :

   a. Komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
   b. Sebagai tolakukur kinerja dalam evaluasi;
   c. Sebagai dasar penilaian tujuan dan sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi;
   d. Monitoring, evaluasi dan supervisi serta
   e. Dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

2. Melakukan evaluasi kinerja yaitu :

   a. pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Tahun 2015 oleh Inspektorat Provinsi Papua terhadap Laporan Kinerja (LAPKIN) SKPD, sebagai hasil evaluasi telah disampaikan kepada SKPD yang tujuan agar dapat dilakukan perbaikan dari segi perencanaan sampai dengan penyusunan laporan dan evaluasi.

      Berikut hasil penilaian SAKIP SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Hasil Evaluasi SAKIP SKPD 2015 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Oleh INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA

Nomor : X.700.1/164/ITPROV

Hal : Ikhtisar Hasil Evaluasi SAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016

Tempat dan Tanggal, Jayapura 30 Oktober 2016

No	Nama SKPD	Kategori Penilaian		
1	Dinas Kehutanan	A	87,10	Memuaskan
2	Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah	A	86,69	Memuaskan
3	Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan DIKLAT)	A	86,09	Memuaskan
4	Dinas Sosial & Pemukiman	BB	79,32	Sangat Baik
5	Biro KESRA	BB	78,49	Sangat Baik
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BB	76,95	Sangat Baik
7	Dinas Pendapatan Daerah	BB	76,82	Sangat Baik
8	Badan Pengelola Lingkungan Hidup	BB	74,69	Sangat Baik
9	Dinas Perindustrian & Perdagangan	BB	73,60	Sangat Baik
10	Inspektorat Papua	BB	72,28	Sangat Baik
11	Dinas Perkebunan	BB	71,72	Sangat Baik
12	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah (BPAD)	B	68,72	Baik
13	Badan Kesatuan Bangsa&Politik	B	67,80	Baik
14	Dinas Tenaga Kerja & Kependudukkan	B	67,28	Baik
15	Biro Umum	B	62,32	Baik
16	Dinas Tanaman Pangan&Holtikultura	B	61,78	Baik
17	Biro Perekonomian & Sumber Daya Alam	B	60,16	Baik
18	Badan Perijinan Terpadu & Penanaman Modal	CC	59,96	Cukup
19	Dinas Perhubungan	CC	58,94	Cukup
20	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD)	CC	58,81	Cukup
21	Badan Penghubung Daerah	CC	65,26	Cukup
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	CC	56,10	Cukup
23	Dinas Komunikasi & Informatika (DISKOMINFO)	CC	54,70	Cukup
24	Dinas Pendidikan & Pengajaran (Din. P&P)	CC	54,66	Cukup
25	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	CC	54,53	Cukup
26	Biro Organisasi & Pendayagunaan Aparatur (Biro ORPA)	CC	53,69	Cukup
27	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	CC	51,57	Cukup
28	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Kampung	CC	50,89	Cukup
29	Biro Tata Pemerintahan	CC	50,68	Cukup
30	Badan Pengelola Perbatasan & Kerjasama Luar Negeri	CC	50,63	Cukup
31	Biro Humas & Protokol	CC	50,41	Cukup
32	Dinas Pekerjaan Umum	CC	50,35	Cukup
33	Sekretariat DPRP	C	47,83	Kurang
34	Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia	C	46,68	Kurang
35	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif	C	46,17	Kurang
36	Dinas Kesehatan	C	44, 99	Kurang
37	Dinas Kelautan & Perikanan	C	42,98	Kurang

No.	Nama SKPD	Kategori Penilaian		
38	Biro Hukum	C	42,48	Kurang
39	Sekretariat MRP	C	40,90	Kurang
40	Badan Ketahanan Pangan & Koordinasi Penyuluhan	C	41,27	Kurang
41	Rumah Sakit Jiwa Abepura (RSJ Abepura)	C	39,23	Kurang
42	Badan Percepatan Kawasan Papua	C	36,20	Kurang
43	Satuan Polisi Pamong Praja	C	30,25	Kurang
44	Rumah Sakit Daerah Abepura (RSUD Abepura)	D	27,74	Sangat Kurang
45	Badan Pemberdayaan & Perempuan Perlindungan Anak	D	17,30	Sangat Kurang
46	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	D	12, 78	Sangat Kurang
47	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (RSUD Jayapura)	D	10,89	Sangat Kurang
48	Dinas Olah Raga dan Pemuda (DISORDA)	Tidak membuat LAKIP		

Catatan :

SKPD yang masuk dalam IKU Prov.Papua berdasarkan PERGUB 33/2014 ttg "Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua" Periode 2014-2018

b. Pelaksanaan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi pada tanggal 5 sampai 6 Oktober 2016, di ruang Pusat Data Pembangunan Provinsi Papua, Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura-Papua. Peserta yang dihadirkan dalam Evaluasi SAKIP adalah SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua dengan sampel yaitu 17 SKPD yang nilai SAKIP 2015 oleh Inspektorat Provinsi Papua dikategorikan B, BB dan A. Perbaikan-perbaikan guna peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua dan juga untuk menaikan bobot penilaian dengan target nilai "CC" ke "B" maka Pemerintah Provinsi Papua kedepannya akan melakukan upaya-upaya yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) 2017 tidak hanya sampai tataran eselon II tetapi juga sampai pada tataran eselon III dan IV. Guna mendukung hal dimaksud maka akan dilakukan pemetaan indikator kinerja mulai dari Eselon II, III dan IV.
2. Menyediakan Sistem Informasi/elektronik–SAKIP (SI-SAKIP/e-SAKIP) di Provinsi Papua.

3. Hasil Evaluasi SAKIP 2016 untuk 48 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat meningkat. Evaluasi SAKIP 2015 oleh Inspektorat Provinsi Papua ada sekitar 17 SKPD yang memperoleh nilai Baik “B”/Sangat Baik “BB”/Memuaskan “A”, sehingga di harapkan pula bahwa hasil evaluasi SAKIP di tahun 2016 dapat terjadi peningkatan lagi menjadi 25-30 SKPD dengan perolehan nilai Baik “B”/Sangat Baik “BB”/Memuaskan “A”.

4. Adanya proses penguatan kapasitas di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua guna mendapat hasil evaluasi KEMENPAN dan RB dari nilai “C” menjadi CC”. Hal ini dilakukan karena hasil evaluasi AKIP oleh KEMENPAN dan RB untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua tahun 2015 (1 Kota, 8 Kab) dan tahun 2016 (1 Kota, 11 Kab) belum terjadi peningkatan nilai akuntabilitas yaitu dan masih tetap pada kisaran nilai “D” dan “C”.

   Berikut Perkembangan AKIP Kabupaten/Kota se Provinsi Papua untuk tahun 2015-2016 oleh KEMENPAN dan RB RI, yaitu :

Tabel 3.8

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2015	
		Nilai	Predikat
Pemerintah Provinsi Papua		46,04	C
1	Kab. Asmat	36,49	C
2	Kab.Jayapura	37,86	C
3	Kab.Jayawijaya	25,60	D
4	Kab.Keerom	20,08	D
5	Kab.Mappi	30,54	C
6	Kab.Merauke	30,66	C
7	Kab.Mimika	38,04	C
8	Kab.Nabire	21,78	D
9	Kota Jayapura	35,16	C
Rata-Rata		35,80	C

Tabel 3.9

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	2016	
		Nilai	Predikat
Pemerintah Provinsi Papua		belum ada nilai	
1	Kota Jayapura	44.70	C
2	Kab. Mimika	40.79	C
3	Kab. Jayapura	39.02	C
4	Kab.Merauke	37.23	C
5	Kab. Mappi	31.11	C
6	Kab. Jayawijaya	30.74	C
7	Kab.Nabire	26.27	D
8	Kab. Yalimo	25.08	D
9	Kab. Mamberamo Raya	24.26	D
10	Kab. Kep. Yapen	23.67	D
11	Kab. Waropen	21.68	D
12	Kab. Keerom	20.29	D
	Rata-Rata	30,40	C

Dari tabel perkembangan hasil evaluasi AKIP tersebut diatas, diketahui bahwa untuk level Pemerintah Provinsi Papua serta Kab/Kota se-Provinsi Papua masih memerlukan perbaikan-perbaikan guna peningkatan AKIP yang lebih baik, dan lebih bermanfaat baik secara internal dikalangan pemerintahan maupun kearah yang lebih baik khususnya bagi publik.

Indikator persentase **rata-rata kehadiran pegawai** dengan **target 90 persen** dengan **realisasi sebesar 97,94 persen** maka capaian kinerja menjadi 108 persen. Perhitungan capaian indikator ini didasarkan pada perhitungan data rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada masing-masing SKPD yang dihitung dari Januari-Desember 2016 (terlampir). Capaian Kinerja menjadi 108persen, dan berikut hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah adanya perhatian dan komitmen dari Pemerintah Provinsi Papua hal ini dipertegas melalui surat Gubernur Papua kepada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua dengan melakukan tahapan-tahapan kegiatan guna sosialisasi dan penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tahapan-tahapan kegiatan yang mendukung keberhasilan rata-rata kehadiran pegawai dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pendistribusian x-banner ke SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya terkait “Tidak Masuk Kantor (TMK)” dengan Sanksi Ringan, Sanksi Sedang dan Sanksi Berat.

2. Pemantauan Disiplin PNS melalui Rekapan Absen Harian setiap bulan dan Sanksi bagi PNS yang Tidak Masuk Kantor;
3. Sosialisasi Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016. Kegiatan ini oleh BKD Provinsi Papua tetapi telah berkontribusi juga dalam mendukung IKU Provinsi Papua yaitu tentang Disiplin Pegawai

4. Diskusi Kelompok Terarah bagi SKPD tentang Disiplin PNS yang masuk dalam IKU Provinsi Papua sesuai PERGUB 33/2014 tentang Penetapan IKU Provinsi Papua, pada 7 Desember 2016 di Gedung Pusat Data BAPPEDA Provinsi Papua Dok II Jayapura.

5. Perhitungan RekapitulasiRekapan Absen Harian ini dimaksudkan untuk mendapatkan indikator Gubernur Papua tentang rata-rata kehadiran pegawai dalam setahun sesuai IKU Gubernur No.33/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

6. Rencana Aksi program oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dimana Rencana Aksi Program ini terkait dengan pemberantasan Korupsi secara terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2016-2017. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Papua membentuk beberapa POKJA salah satunya adalah“ POKJA Tim Pembenahan SDM Aparatur” yang telah menindaklanjuti dengan merumuskan beberapa masalah salah satunya adalah tentang disiplin PNS khususnya tentang sanksi terhadap pegawai yang melakukan *Pelanggaran Disiplin* karena selama ini belum diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga masih banyak pegawai yang *datang terlambat, pulang lebih cepat* bahkan *tidak masuk kantor* tanpa mendapatkan *sanksi*.

   Kegiatan ini adalah kegiatan bersama oleh Kelompok Kerja (POKJA) Tim Pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

   POKJA Tim Pembenahan SDM Aparatur ini terdiri dari adalah *Biro ORPA, BKD, BAPPEDA, Inspektorat dan DISKOMINFO.*

Foto dari kiri : Rapat PemProv Papua dipimpin Ass.III Bpk Elisa Aury terkait Rencana Aksi Program KPK salah satu nya tentang Penegakkan Disiplin didampingi Inspektur Provinsi Papua Bpk Anggiat Situmorang serta Koordinator POKJA Kepala Dinas DISKOMINFO Ibu Kansiana Salle. Foto Tengah dan Foto Kanan : POKJA “POKJA Tim Pembenahan SDM Aparatur” melakukan perumusan beberapa masalah terkait pembenahan SDM dan salah satunya adalah tentang Disiplin PNS.

Dalam rangka pencapaian Sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur maka beberapa pencapaian telah diraih yaitu :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal menerima Piagam Penghargaan Apresiasi Kepatuhan Pemerintah Provinsi Papua dari Ombudsman RI Perwakilan Papua Tahun 2015 terlampir.
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua (Badan DIKLAT) mendapat Akreditasi A untuk penyelenggaraan Diklat PIM III dan IV serta Akreditasi B untuk Diklat Prajabatan yang diserahkan langsung oleh MENPAN dan RB RI kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH di Jayapura Provinsi Papua pada 3 Maret 2015 terlampir.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi informasi.

Yang dimaksud dengan pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara atau penduduk atas barang/jasa atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Sasaran " Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi informasi" merupakan sasaran yang harus diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator sasaran. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi"** adalah 20,80 persen atau dalam skala ordinal adalah **"Tidak Berhasil"**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator sasaran.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.10 Indikator Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	persen	50,00	10,40	20,80
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**20,80**

Tahun anggaran 2016 Persentase SKPD yang telah menyusun dan menetapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) terdiri atas 5 (lima) SKPD atau 10,4 persen dari target 50 persen dengan capaian kinerja 20,80 persen. Capaian kinerja Tahun 2016 termasuk kategori **"Tidak Berhasil"** dibandingkan capaian kinerja 2015 menurun 55,80 persen. Dengan asumsi jumlah SKPD yang menetapkan SOP dari Tahun 2015-2016 hanya 20 SKPD sedangkan 28 SKPD sesuai PERDA Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2013 belum menyusun tersusun. Pada Tahun 2014 realisasi keuangan mencapai 98,99 persen, Tahun 2015 mencapai 99,49 persen dan Tahun 2016 mencapai realisasi 99,03 persen.

Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Tujuan penyusunan SOP adalah :

1. Menjamin kelancaran pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Mempermudah kontrol menajemen dalam memperbaiki kinerja pelayanan.
3. Mendoromg terwujudnya aparatur penyelenggara pelayanan publik yang profesional, jujur dan bertanggungjawab.
4. Menjamin adanya kepastian hukum.

Pencapaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu 20,80 persen. Adapun ke-5 SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua
2. Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluh
5. Inspektorat Provinsi Papua (perubahan pertama).

Karena sampai dengan tahun keempat masa kepemimpinan Gubernur Papua periode 2014-2018, SKPD yang memiliki SOP sebanyak 20 SKPD atau 41,66 persen dan masih 28 SKPD atau 58,33 persen dalam taraf penyusunan SOP, realisasi capaian indikator kinerja Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah :

Tabel 3.11

NO	SKPD	THN 2015	THN 2016
1	JUMLAH SKPD	15	5

Pada Tahun 2016 melalui Surat Gubernur Papua Nomor 005/614/SET, Tanggl 20 Mei 2016 Biro Organisasi melaksanakan pendampingan penyusunan SOP bagi SKPD Provinsi Papua, dan out put dari kegiatan tersebut tersusunlah hasil identifikasi judul 15 SKPD, yaitu :

1. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.
2. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.
4. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.
5. Biro Hukum SETDA Provinsi Papua.
6. Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Provinsi Papua.
7. Biro Kesra dan Kemasyarakatan SETDA Provinsi Papua.
8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.
9. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.
11. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

12. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.
13. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
14. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.
15. RSUD Abepura Provinsi Papua.

Hasil identifikasi judul tersebut akan dikaji Biro Organisasi/Tim dan dikembalikan kepada SKPD untuk menindaklanjuti dalam penyusunan SOP SKPD sampai dengan penetapan.

permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target, yaitu :

1. SKPD belum menggunakan SOP sebagai instruksi tertulis yang dibakukan dalam melaksanakan proses administrasi dan belum ada perhatian pimpinan terkait keharusan SKPD mempunyai SOP dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
2. Pendampingan penyusunan SOP SKPD tidak dihadiri oleh peserta sesuai permintaan Surat Gubernur, sehingga out put dari kegiatan tidak berfungsi.
3. Peserta yang menghadiri kegiatan penyusunan tidak menindaklanjuti /menginformasikan kepada pimpinan tentang keharusan penyusunan SOP pada SKPD.

Hal-hal yang perlu dilakukan :

1. Melalui Surat Gubernur dapat menindaklanjuti/ mengawal penyusunan SOP bagi SKPD dengan memanggil Pimpinan SKPD terkait penyusunan dan penerapan SOP pada SKPD sehingga target dapat tercapai.
2. Perlunya membentuk Tim Penyusun SOP pada masing-masing SKPD.
3. Perlunya Biro Organisasi dalam hal ini Tim fasilitasi membuka klinik penyusun SOP bagi SKPD, sehingga mempercepat penyelesaian /menyempurnakan SOP yang disusun oleh SKPD.
4. Perlunya meningkatkan pengawasan secara berjenjang sehingga apa yang menjadi tugas-tugas organisasi dalam meningkatkan pelayanan dapat terlaksana dengan baik, karena ASN sesungguhnya adalah pelayan publik.

Sasaran 4 : Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan KKN

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN"** adalah 98,55 persen atau dalam skala ordinal adalah **"Sangat Berhasil"**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator sasaran.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Indikator Kinerja Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	persen	100,00	100,00	100,00
2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen	55,00	53,40	97,09
Rata-rata Capaian Kinerja sasaran					**98,55**

Capaian dari indikator kinerja sasaran **persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani** diperoleh melalui program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100 persen yaitu dari target yang ditetapkan 100 persen terealisasi 100 persen.

Capaian tersebut diperoleh dari telah dilakukannya penanganan terhadap 4 kasus pengaduan dari sebanyak 4 kasus pengaduan masyarakat yang masuk. Pengaduan berupa surat pengaduan masyarakat yang dikirimkan ke kantor Inspektorat baik secara langsung maupun melalui Gubernur Papua dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, serta pengembangan dari temuan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pengaduan masyarakat pada tahun 2016 yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat Keerom ke Kementerian Dalam Negeri tentang pembangunan kantor Bupati Keerom;
2. Pengaduan rekanan/masyarakat tentang pengadaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP);
3. Pengaduan masyarakat mengenai perijinan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
4. Pengaduan masyarakat tentang rehabilitasi gedung kantor Bappeda Provinsi Papua.

Capaian kinerja sasaran strategis ini pada tahun 2014 adalah sebesar 166,67 persen sedangkan capaian kinerja tahun 2015 adalah 142,86 persen sehingga mengalami penurunan sebesar 23,81 persen, dan capaian kinerja tahun 2016 sebanyak 100,00 persen, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2016 menurun dibanding tahun 2015. Penurunan nilai capaian kinerja ini bukan merupakan indikator kinerja penanganan pengaduan masyarakat yang menurun tetapi lebih mengarah kepada berkurangnya jumlah pengaduan yang masuk ke Inspektorat yaitu dari 5 kasus pada tahun 2015 menjadi 4 kasus pada tahun 2016. Kasus-kasus pengaduan tersebut telah ditangani seluruhnya dengan capaian kinerja indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang masuk dan ditangani tercapai 100 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja ini tercapai karena adanya komitmen aparat pengawasan intern pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberantasan KKN melalui penanganan pengaduan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selanjutnya target Indikator kinerja sasaran **persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan** yang telah ditetapkan sebesar 55 persen tercapai 53,40 persen sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 97,09 persen.

Target indikator ini terdiri dari dua komponen pengukuran yaitu penyelesaian rekomendasi keuangan dengan bobot 60 persen dan penyelesaian rekomendasi administrasi dengan bobot 40 persen.

Tabel 3.13

Pencapaian target yang ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

TINDAK LANJUT	BOBOT persen	TARGET persen	REALISASI INDIVIDU	CAPAIAN REALISASI INDIVIDU	CAPAIAN BOBOT
Keuangan	60	50	49,67	99,30	59,60
Administrasi	40	50	59,07	118,10	47,20
Capaian TL					106,80

Capaian kinerja tindak lanjut keuangan 99,30 persen disebabkan adanya penambahan LHP pemeriksaan kinerja pengelolaan Otsus tahun 2011 – 2012 yang terbit pada bulan Februari 2016 dengan nilai rekomendasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp563.659.062.492,00. Nilai tersebut belum seluruhnya ditindaklanjuti karena masih proses rekonsilisasi data antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Bank Papua. Hal ini menyebabkan persentase tindak lanjut penyelesaian kerugian keuangan daerah yang sebelumnya telah mencapai target menjadi berkurang.

Pencapaian target indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian dan BPK RI dengan target seluruh SKPD yang telah diperiksa dan mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dan telah terealisasi atau terpantau seluruhnya atau 100 persen.

Cara perhitungan capaian kinerja di atas baru dilakukan pada penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2016. Ini disebabkan adanya perubahan formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Inspektorat khususnya pada indikator kinera persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan perhitungan berdasarkan jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan yang ada kemudian dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti, sedangkan

perhitungan tahun 2016 dilakukan pembobotan untuk masing-masing jenis rekomendasi yaitu jenis rekomendasi bernilai keuangan dengan bobot 60 persen dan rekomendasi administrasi dengan bobot 40 persen.

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2016 secara keseluruhan, dari hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua maupun Irjen Kementerian dan BPK RI adalah sebanyak 3.244 rekomendasi dan yang ditindaklanjuti sebanyak 1.732 rekomendasi sehingga diperoleh angka realisasi kinerja 53,40 persen. Capaian kinerja diperoleh dari perhitungan realisasi kinerja dibagi target yang telah ditetapkan dikalikan 100 persen sehingga diperoleh angka 100,36 persen.

Dibanding tahun 2014, persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebesar 46,95 persen, tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 55,36 persen dan tahun 2016 sebesar 49,67 persen untuk rekomendasi keuangan dan 59,07 untuk rekomendasi administrasi. Apabila diambil nilai rata-ratanya maka tahun 2016 jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 53,40 persen atau menurun 0,99 persen dibanding tahun 2015.

Penurunan terjadi disebabkan oleh hal yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya dan kurangnya kesungguhan para pimpinan satuan kerja selaku pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Kerjanya untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, selain itu juga karena adanya sikap enggan atau tidak berani oleh pejabat/pimpinan instansi untuk memberikan sanksi atau mengambil tindakan tegas terhadap bawahannya yang melakukan kesalahan/penyimpangan sesuai rekomendasi temuan hasil pemeriksaan serta, mengakibatkan pelaksanaan tindak lanjut tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang belum optimal disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan pemantauan tindaklanjut, adanya reorganisasi pada SKPD, adanya mutasi/pensiun/meninggalnya pegawai maupun pihak ketiga yang bertanggungjawab dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kurangnya kesadaran pejabat pengganti pada SKPD penanggungjawab tindak lanjut untuk menyelesaikan tindak lanjut yang menjadi kewajibannya

dengan alasan bahwa yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi adalah pegawai atau pejabat yang sebelumnya.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran kinerja ke empat adalah sebesar Rp2.405.000.000,00 dan terealisasi Rp2.183.904.750,00 atau 90,81 persen. Efisiensi kinerja sasaran ini adalah sebesar 106,80 persen dibanding 90,81 persen yaitu 1,17 persen sehingga dapat dikatakan bahwa dengan penyerapan anggaran sebesar 90,81 persen tercapai kinerja dengan kategori sangat berhasil yaitu sebesar 106,80 persen.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.

Salah satu amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah terpenuhinya hak-hak dasar orang asli Papua. Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.

Untuk melihat kinerja pencapaian sasaran ini, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu : Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun pencapaian masing-masing indikator dimaksud sebagai berikut :

Tabel 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	persen	70,00	71,46	102,08
2	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen	4,00	3,33	83,25
Rata-rata Capaian Kinerja sasaran					**92.66**

Pencapaian Kinerja untuk sasaran ini berada dalam kategori **Sangat Berhasil**, dimana rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran mencapai **92,66** persen.

Indikator **persentase penduduk miskin** dengan realisasi capaian kinerja sebesar 102,08 persen, di atas target yang ditetapkan yakni sebesar 70.00 persen. Selama lima tahun terakhir (tahun 2011 – tahun 2015) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 2,84 persen, yaitu dari 31,24 persen pada September 2011 menjadi 28,4 pada September 2015 walaupun mengalami kenaikan di tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2014. Penurunan angka kemiskinan ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

Grafik 3.4 Perkembangan Persentase Kemiskinan Tahun 2011-2015

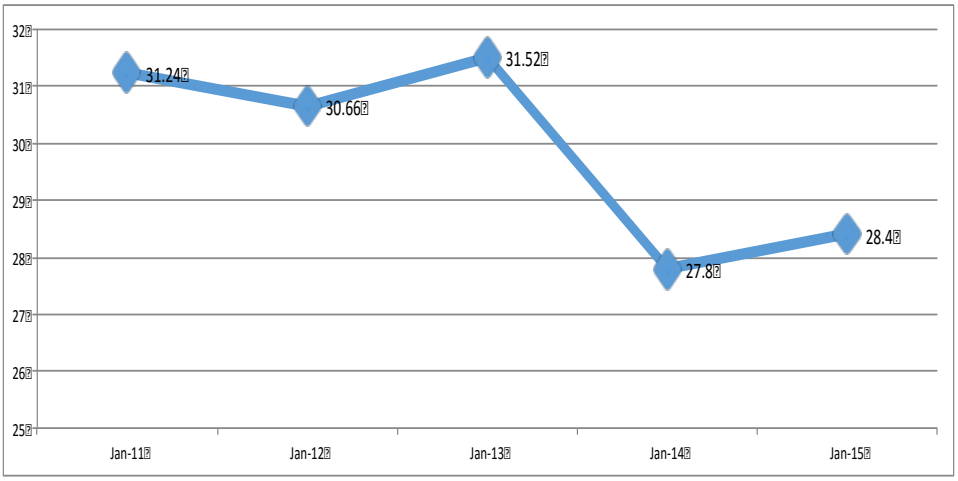

Sumber : BPS Provinsi Papua, tahun 2016

Di lihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di kawasan perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di kawasan perkampungan. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk miskin masih berada di di kampung. Hal ini bisa dipahami karena penduduk kampung memiliki akses layanan publik yang lebih rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian di mana nilai produk pertanian telah semakin menurun. Karenanya, masyarakat kampung memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan

penduduk perkotaan. Grafik berikut menunjukkan sebaran dan trendnya dari tahun ke tahun.

Tabel 3.15 Penduduk Miskin berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan

Tahun 2001-2015

Tahun	Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa
1	2	3	4
2001	9.23	53.14	41.8
2002	9.76	51.21	41.8
2003	8.32	49.75	39.03
2004	7.71	49.28	38.69
2005	9.23	50.16	40.83
2006	8.71	51.31	41.52
2007	7.97	50.47	40.78
2008	7.02	45.96	37.08
2009	6.1	46.81	37.53
2010	5.55	46.02	36.8
Mar-11	4.6	41.58	31.98
Sep-11	4.75	40.53	31.24
Mar-12	4.24	40.55	31.11
Sep-12	5.81	39.39	30.66
Mar-13	6.11	39.92	31.13
Sep-13	5.22	40.71	31.52
Mar-14	4.47	38.92	30.05
Sep-14	4.46	35.87	27.8
Mar-15	4.61	36.66	28.17
Sep-15	3.61	37.34	28.4

Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka penurunan angka kemiskinan telah dilakukan secara konsisten melalui pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) dan Program Strategis Pembangunan Kampung (PROSPEK). KPS memberikan jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat khususnya Orang Asli Papua untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat puskesmas sampai dengan rujukan. Untuk PROSPEK mengalokasikan anggaran rata-rata 100 Juta per kampung di seluruh kampung untuk pengembangan ekonomi kampung sesuai dengan masing-masing komoditas unggulan lokal sehingga diharapkan masyarakat yang berada di kampung dapat mandiri dalam mengelola potensi yang dimiliki menuju kesejahteraan.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pencapaian kinerja dari indikator ini berada pada kategori **Berhasil** dengan capaian kinerja sebesar **83,25** persen. Capaian kinerja ini dihasilkan dari target kinerja di tahun

2015 sebesar **4,00** persen sedangkan realisasinya sebesar **3,33** persen. Di Provinsi Papua ada 20 (dua puluh) kategori/kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau sebanyak 515.199 orang, yang dapat tertangani dalam tahun anggaran 2016 adalah sebanyak 7 (tujuh) kategori/kelompok PMKS yakni atau sebanyak 17.114 jiwa.

Kategori/kelompok tersebut adalah :

1. Penyediaan sarana dan prasarana bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).
2. Perlindungan dan jaminan sosial bagi lansia.
3. Perlindungan dan jaminan sosial bagi anak.
4. Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat.
5. Pelayanan terhadap tuna sosial.
6. Penanganan korban Napza.
7. Penanganan korban bencana alam dan sosial.

Tabel 3.16

PMKS	TAHUN				
	SATUAN	2012	2013	2014	2015
Penderita Sakit jiwa	Jiwa	589	589	662	662
Jumlah Pecandu Narkoba	Jiwa				335
Fakir Miskin	Jiwa	117.445	129.119	129.119	437.640
Bayi Terlantar	Jiwa	126	-	143	255
Anak Terlantar	Jiwa	65	194	344	344
Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	3.435	5.376	5.571	7.534
Komunitas Adat Terpencil	Jiwa	41.252	41.252	26.433	**29.559**
Penyandang Cacat	Jiwa	267	898	1.200	16.500
Penyandang Tuna Netra	Jiwa	423	430	430	2.384
Penyandang Tuna Rungu	Jiwa	997	1.029	1.029	1.029
Penyandang Tuna Wicara-Rungu	Jiwa				2.366
Penyandang Tuna Daksa	Jiwa				5.474
Penyandang Cacat Jiwa	Jiwa				1.447
Penyandang Cacat Ganda	Jiwa	77	77	99	188
Pengungsi dan Korban Bencana	Jiwa	215	310	310	310
Wanita Tuna Susila	Jiwa	1.039	234	1.039	1.044
Bekas Narapidana	Jiwa	39	468	652	805
Korban Penyalahgunan Napza	Jiwa	321	90	361	394
Bekas Penderita Penyakit Kusta	Jiwa	533	533	533	4.374
Anak Nakal	Jiwa	824	397	2.500	2.545

Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman

Apabila memperbandingkan antara jumlah yang tertangani dengan jumlah PMKS, memperlihatkan bahwa penanganan PMKS rata-rata hanya mencapai 0,36 persen pertahun dari tahun 2012-2015.

Grafik 3.5 Penanganan PMKS Provinsi Papua tahun 2012-2015

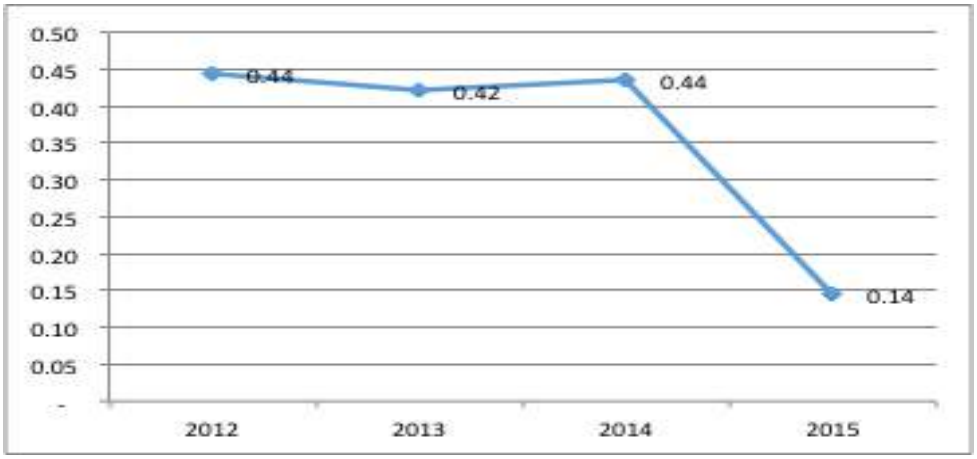

Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman

Diperlukan penanganan secara komprehensif dan lintas sektor untuk penanganan PMKS ini, bukan hanya menjadi ranah dari urusan Sosial tapi juga merupakan tanggungjawab berbagai sektoryang ada.

Ada beberapa strategi pokok yang digunakan dalam mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial sampai tahun 2016 ini, yaitu :

a. **Kampanye Sosial** yakni memberikan pemahaman, sosialisasi, penyadaran dan kepedulian terhadap pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan penyandang masalah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
b. **Kemitraan Sosial** yaitu adanya kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.
c. **Partisipasi Sosial**, adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
d. **Advokasi Sosial**, yaitu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak warga masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain agar mampu mendapatkan haknya kembali.

e. **Desentralisasi Sosial**, yaitu dengan melakukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada aparatur dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di daerah untuk menangani masalah sosial dengan mengoptimalkan sumber daya lokal sesuai karakteristik budaya setempat.

Pencapaian kinerja ini didukung oleh 2 (dua) sumber pembiayaan yakni dari APBN sebesar Rp. 33.899.435.000,- (tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.285.036.284,- (tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga pulh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 95,24 persen, sedangkan pembiayaan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 18.891.862.500,- (delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.661.749.331,- (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 93,49 persen.

Sasaran 6 : Terwujudnya Masyarakat yang Sehat.

Sasaran terwujudnya masyarakat sehat dapat diukur dari 6 (enam) Indikator yaitu dari Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam kartu Papua Sehat (KPS), Angka Kematian Ibu per 100.000 Ibu melahirkan, Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV, Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis, Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan, dan Angka usia harapan hidup.

Untuk tahun 2016 capaian kinerja sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat berhasi ldengan rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 183,50 persen dengan predikat **"sangat berhasil".**

Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan bidang urusan kesehatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Papua, telah menjawab tantangan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas di

seluruh wilayah Papua dalam rangka percepatan pembangunan secara merata di Provinsi Papua.

Tabel 3.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam kartu Papua Sehat (KPS)	persen	100	100	100,00
2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Ibu melahirkan	Angka	400	313	127,80
3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	54	7	771,43
4	Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	persen	100	48	48,00
5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	persen	70	28,10	40,14
6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	persen	100	100	100,00
7	Angka usia harapan hidup	persen	67	65,10	97,16
Rata-rata Capaian Kinerja sasaran					**183,50**

Persentase Penduduk Asli Papua yang terjangkau KPS dengan capaian 100 persen. Penduduk asli Papua yang mendapatkan KPS dimaksudkan adalah seluruh Orang Asli Papua yang mengakses pelayanan kesehatan dari pelayanan kesehatan dasar sampai dengan rujukan akan menerima pelayanan KPS. Capaian kinerja ini dapat dilihat dari pada tahun 2014 jumlah Orang Asli Papua yang mendapatkan pelayanan KPS sebanyak 1.457.377orang, tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 1.049.057 orang dan pada tahun 2016 Kartu Papua Sehat melayani sebanyak 598.496 jiwa. Untuk pelaksanaan KPS diharapkan membangun basis data yang berbasis sistem informasi dalam rangka peningkatan pelayanan bagi penerima KPS dan mengukur tingkat keberhasilan dari KPS. Untuk pembiayaan KPS mengalami peningkatan dari tahun 2014 mencapai Rp. 194,95 Milyar, di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 209,26 Milyar dan di tahun 2016 meningkat lagi sebesar Rp. 223,26 Milyar.

Tabel 3.18 Alokasi Dana KPS tahun 2014-2016

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KPS 2014	KPS 2015	KPS 2016
REGIONAL HA ANIM				
1	SRUD Merauke	8,500,000,000	7,250,000,000	7,250,000,000
	Yasanto		400,000,000	400,000,000
	Bunda Pengharapan		750,000,000	750,000,000
2	RSUD Boven Digoel	3,250,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
	RSUD Mindiptana		750,000,000	725,000,000
3	Kabupaten Mappi	2,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
4	Kabupaten Asmat	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
REGIONAL LA PAGO				
5	RSUD Jaya wijaya	13,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000
	Klinik Kalvari		400,000,000	400,000,000
	Klinik Advent		400,000,000	400,000,000
6	Kabupaten Yahukimo	2,000,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
7	Kabupaten Pegunungan Bintang	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
8	Kabupaten Tolikara			
9	Kabupaten Nduga			
10	Kabupaten Lanny Jaya	800,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
11	Kabupaten Puncak Jaya	5,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
	RS Imanuel		1,000,000,000	1,000,000,000
12	Kabupaten Mamberamo Tengah			
13	Kabupaten Yalimo			
14	Kabupaten Puncak			
REGIONAL MAMTA				
15	Kabupaten Jayapura	4,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000
16	Kabupaten Sarmi			
17	Kabupaten Keerom	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
18	Kabupaten Mamberamo Raya	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
19	Kota Jaypura			
	RSUD Jayapura	49,000,000,000	49,000,000,000	60,000,000,000
	RS Jiwa Abepura	7,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	RSUD Abepura	39,000,000,000	37,000,000,000	40,000,000,000
	RS Marten Indey	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000
	RS Dian Harapan	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
	RS Angkatan laut	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000
	RS Bhayangkara	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
	Walihole		750,000,000	750,000,000
	Klinik Angkatan Udara		400,000,000	400,000,000

REGIONAL MEE PAGO				
20	RSUD Nabire	11,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
	Santo Rafael		300,000,000	300,000,000
	GSI		400,000,000	400,000,000
21	RSUD Paniai	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000
22	RSUD Mimika	10,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000
23	Kabupaten Dogiay			
24	Kabupaten Intan Jaya			
25	Kabupaten Deiyai			
REGIONAL SAIRERI				
26	Kabupaten Kep. Yapen	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
27	Kabupaten Biak Numfor	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
28	Kabupaten Waropen			
29	Kabupaten Supiori	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
30	AMA, YAJASI, MAF, TARIKU		3,750,000,000	3,750,000,000
31	RUJUKAN LUAR PAPUA		10,000,000,000	10,000,000,000
32	RSUD yang operasional		3,816,700,000	3,816,700,000
	JUMLAH	**194,950,000,000**	**209,266,700,000**	**223,266,700,000**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, tahun 2017

Angka Kematian Ibu per 100.000 Ibu melahirkan, Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh faktor obstetrik dan non obstetric. Untuk tahun 2016 dengan capaian kinerja 127,8 persen atau berada ketegori sangat berhasil. Namun pencapaian AKI tahun 2016 sebesar 239/100.000KH leboh besar dibandingkan AKI tahun 2015 yang mencapai 239/100.000KH.

Angka kematian ibu diakibatkan karena pendarahan, hipertensi, infeksi, partus lama, aborsi dan persalinan di tolong oleh bukan tenaga kesehatan. Untuk Provinsi Papua masih tingginya angka kematian ibu di Papua lebih diakibatkan dari persalinan di tolong oleh bukan tenaga kesehatan dan partus lama atau terlambat mendapatkan pertolongan.

Beberapa indikator-indikator yang mempengaruhi angka kematian ibu, yaitu :

1. Sarana kesehatan

   Lembaga kesehatan seperti polindes, puskesmas, rumah sakit bersalin dan poskesda merupakan indikator-indikator kesehatan yang mempengaruhi tingkat mortalitas pada balita dan ibu pada masa kehamilan, persalinan atau nifas. Jumlah Rumah Sakit sebanyak 33 RS yang tersebar di 29 Kab/Kota, Puskesmas dan puskesmas pembantu sebanyak 365 Puskesmas, Posyandu sebanyak 1.212 buah dan Posyandu sebanyak 3.085 buah.

2. Tenaga Kesehatan

Tersedianya tenaga medis dan bidang juga merupakan faktor yang utama yang mempengaruhi mortalitas pada ibu melahirkan. Jumlah tenaga medis sebayak 802 orang, tenaga keperawatan sebanyak 4.383 orang, tenaga kebidanan sebanyak 1.841 orang, tenaga kesehatan lainnya sebanyak 1.161 orang, Dokter Spesialis sebanyak 124 orang dan Dokter Umum sebanyak 592 orang. Selain ketersediaan tenaga kesehatan dari sisi kuantitatif yang mempengaruhi pelayanan kesehatan, penyebaran tenaga kesehatan juga belum merata diseluruh wilayah daerah di Provinsi Papua masih terpusat pada wilayah yang mudah akses.

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan yang dinyatakan dlam 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Indikator sasaran AKB menunjukkan keberhasilan, dimana tahun 2016 capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan. Dari target 54/1.000KH, realisasi tahun 2016 menunjukkan bahwa AKI Provinsi Papua mencapai 7/1.000KH atau 771,43 persen dari tari target kinerja, atau mencapai kinerja yang sangat baik. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 172 persen dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2017, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Pencapaian AKI yang mengalami penurunan yang signifikan menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Pencapaian ini juga sangat dipengaruhi oleh sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan AKB antara lain dengan Pelacakan kasus kematian maternal-perinatal, meningkatkan surveilens KIA, meningkatkan pelaksanaan kelas ibu hamil, perbaikan sistem rujukan, melakukan bimbingan teknis ke puskesmas dan pelatihan teknis.

Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV, capaian kinerja mencapai 48,00 persen. Terjadi penurunan kinerja di 2016 bila dibandingkan tahun 2015. Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medisditargetkan pada tahun 2016 mencapai 70,00 persen, realisasinya mencapai 28,10 persen, atau sebanyak 40,14 persen dari

target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja kurang berhasil** untuk tahun 2016.

Jumlah penemuan kasus HIV(+) baru menunjukkan kecenderungan naik pada tahun 2015 bila dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Namun tidak semua pasien baru HIV (+) bisa dibawa ke PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) bahkan proporsinya cenderung turun bila dibandingkan tahun 2013. Idealnya 100 persen pasien baru HIV (+) harus dirujuk ke PDP untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.

Proporsi jumlah orang yang post tes dan ambil hasil dibanding jumlah orang yang tes sudah sangat baik berkisar 99 persen . Proporsi pasien baru HIV (+) yang dirujuk ke PDP selama kurun waktu 2010- 2015 berkisar 37persen sd 85,5persen. Pada tahun 2015 rujukan pasien mencapai 71,7persen lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 79,8 persen, proporsi rujukan tertinggi dicapai pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sekitar 85,5 persen. Proporsi jumlah pasien baru HIV(+) dibandingkan jumlah orang yang di tes selama kurun waktu 2010 sd 2016 berkisar 4,3 persen sd 8,3 persen, dimana selama 6 tahun terjadi kecenderungan proporsi yang semakin menurun dari 8,2 persen pada tahun 2010 menjadi 4,3 persen pada tahun 2015. Jumlah orang yang dites sejak 2010 sebanyak 323.792 orang dimana 17.909 diantaranya HIV(+) sehingga proporsi kasus baru HIV(+) sebesar 5,5 persen. Jika semakin banyak orang yang melakukan tes maka proporsi HIV(+) akan semakin mendekati angka prevalensi Papua.

Grafik 3.6 Persentase Rujukan Kasus HIV Provinsi Papua tahun 2010 sd 2015

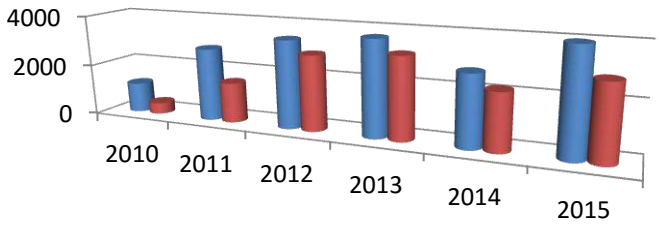

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HIV (+)	1179	2847	3431	3713	2749	3990
dirujuk ke PDP	436	1564	2930	3175	2194	2859

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, tahun 2016

Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis, dengan tingkat capaian 40,14 persen. Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis ditargetkan pada tahun 2016 mencapai 70 persen, realisasinya mencapai 28,1 persen, atau sebanyak 40,14 persen dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja kurang berhasil** untuk tahun 2016. Apabila melihat perkembangan cakupan persalinan tenaga kesehatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tahun 2010 prosentase kelahiran di tolong tenaga kesehatan pada kelahiran pertama sebesar 47,59 persen meningkat menjadi 53,94 persen di tahun 2014.

Grafik 3.7 Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan/Medis

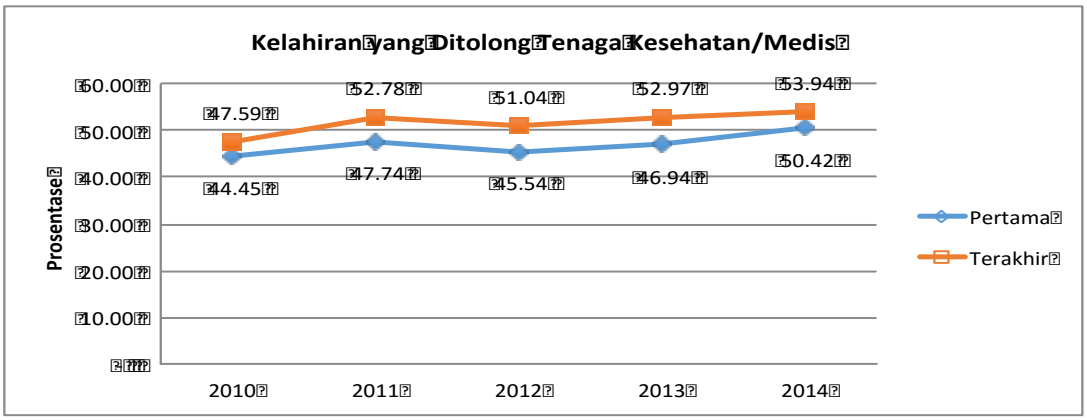

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua, tahun 2016

Dengan membandingkan antara bidan dan jumlah distrik maka rata-rata satu distrik akan dilayani oleh satu bidan, asumsi ini bisa dianggap mampu menjawab kebutuhan tenaga bidan apabila penyebaran bidan di setiap kabupaten merata.

Grafik 3.8 Penyebaran Tenaga Bidan di Kabupaten/Kota

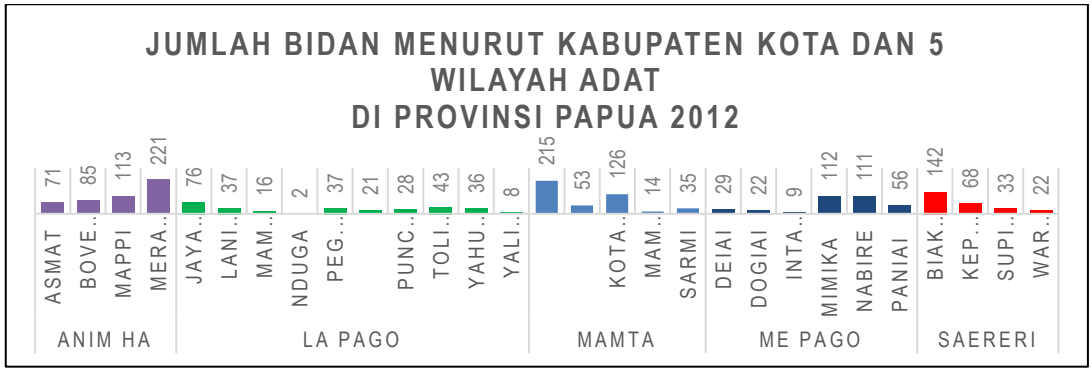

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua, tahun 2015

Namun berdasarkan penyebaran tenaga bidan di setiap kabupaten/kota, sebagaimana grafik di atas. Diperlukan redistribusi tenaga bidan dan tenaga kesehatan lainnya karena permasalahan yang tenaga kesehatan bukan dari kuantitas tetapi penyebaran yang tidak merata antar kabupaten/kota.

Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita adalah jumlah bayi yang gizi buruk dan gizi kurang dibagi seluruh jumlah bayi. Kondisi yang berbeda dari masing-masing wilayah maka menyebabkan keadaan kesehatan diwilayah berbeda pula. Namun hal tersebut tidak lagi menjadi hambatan dalam memajukan taraf kesehatan di setiap wilayah di Provinsi Papua terbukti realisasi yang didapatkan sangat baik yaitu prevalensi kekurangan gizi pada anak balita lebih kecil dari pada yang ditargetkan. Jadi prevalensi kekurangan gizi pada anak balita mengalami penurunan dari yang di targetkan. Dari target 100 persen, realisasi tahun 2016 menunjukkan bahwa **Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan** mencapai 100 persen atau 100 persen dari tari target kinerja, atau mencapai kinerja yang sangat baik.

Angka Harapan Hidup. Pencapaian AHH menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik juga akan sangat mempengaruhi. Angka Harapan HidupProvinsi Papua ditargetkan pada tahun 2016 sebesar 67 tahun, realisasinya mencapai 65,1 tahu atau sebanyak 97,16 persen dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja yang baik** untuk tahun 2016.

Gambar berikut menunjukkan trend dari tahun ke tahun angka harapan hidup.

Grafik 3.9 Perkembangan Angka Harapan Hidup 2010-2014

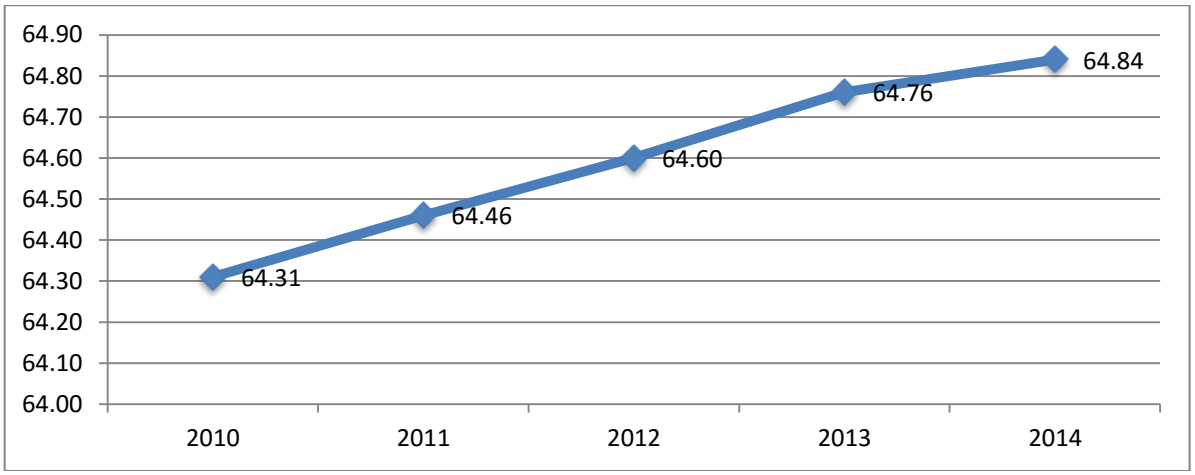

Sumber : BPS, 2016

Proporsi penduduk usia produktif juga semakin meningkat, yang juga dikenal sebagai bonus demografi. Pembangunan manusia dengan bertumpu pada bonus demografi perlu dikembangkan antara lain melalui pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan, dan pemerataan kesempatan kerja. Melalui cara-cara inilah, bonus demografi akan punya makna berarti untuk peningkatan status kesejahteraan rakyat.

Sasaran 7 : Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **"Terwujudnya** masyarakat **yang cerdas dan terampil"** adalah **116,03** persen atau dalam skala ordinal adalah **"Sangat Berhasil"** Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 16 (enam belas) indikator sasaran.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.19

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase angka melek huruf	persen	85,00	84,84	99,81
2	Rata-rata lama sekolah	persen	6,00	5,99	99,83
3	APK PAUD/TK	persen	10,00	37,82	378,20
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	persen	90,00	93,14	103,49
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	persen	70,00	60,96	87,09
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	persen	60,00	54,04	90,07
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	persen	79,00	82,69	104,67
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	persen	48,00	41,58	86,63
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	persen	40,00	44,81	112,03
10	Angka putus sekolah SD/MI	persen	1,00	0,88	88,00
11	Angka putus sekolah SMP/MTs	persen	1,00	1,51	151,00
12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	persen	1,00	1,04	104,00
13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	persen	60,00	31,00	51,67
14	Persentase angka kelulusan SD/MI	persen	100,00	99,98	99,98
15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	persen	100,00	100,00	100,00
16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	persen	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**116,03**

Dari gambaran data di atas, secara umum persentase pencapaian sasaran kinerja dalam tiga tahun terakhir berturut-turut mengalami pasang surut yaitu Tahun 2014 rata-rata pencapaiannya sebesar 92,24 persen, Tahun 2015 88,27 persen dan Tahun 2016 116,03 persen. Ini menunjukkan adanya peningkatan pencapaian kinerja sasaran yang sangat pesat.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka putus sekolah, serta Persentase angka kelulusan sekolah.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang ditulisnya/dibacanya. AMH digunakan untuk mengetahui pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Persentase pencapaian angka melek huruf di Provinsi Papua saat ini adalah 84,84 persen dengan capaian kinerja indikator sebesar 99,81 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut diperoleh dari jumlah penduduk yang melek huruf sebanyak 2.671.930 dari total penduduk Provinsi Papua sebanyak 3.149.375. Dibanding tahun 2015, angka melek huruf mengalami peningkatan sebesar 3,52 persen. Peningkatan ini terjadi disebabkan adanya kebijakan Gubernur Papua untuk meningkatkan pendidikan diseluruh pelosok Papua guna meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Papua melalui kegiatan-kegiatan pusat kegiatan belajar masyarakat yang diaktifkan hingga ke kampung-kampung.

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 7 tahun ke atas (di Provinsi Papua) untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang dijalani.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua adalah 5,99 persen. Angka ini diperoleh dari jumlah siswa SD, SMP, SMU dan Mahasiswa. Dibandingkan

dengan tahun lalu yaitu sebesar 5,76, maka angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,23 persen. dari jumlah penduduk di Papua usia 7 tahun ke atas.

Peningkatan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan komitmen Kepala Daerah untuk menuntaskan program wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak Papua, pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu, meningkatkan sarana prasarana sekolah, dan pembebasan uang sekolah bagi penduduk kurang mampu.

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka partisipasi kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar PAUD/TK sebesar 37,82 persen diperoleh dari jumlah siswa PAUD/TK dibandingkan dengan jumlah penduduk/anak usia PAUD yaitu 3-6 tahun. Jumlah siswa PAUD adalah 39.952 sedangkan jumlah anak usia PAUD sebanyak 259.500.

Angka Partisipasi Kasar SD/MI 93,14 persen. Angka Partisipasi Kasar SD/MI mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 90,67 persen. Angka ini diperoleh dari jumlah siswa SD/MI sebanyak 442.274 dibanding jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sebanyak 474.900.

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 60,96 persen diperoleh dari jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 115.272 dari total jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs sebanyak 189.100 Angka ini mengalami fluktuasi dibanding tahun – tahun sebelumnya seperti dapat dilihat pada tabel di bawah.

Angka Partisipasi Kasar SMU/SMK/MA 54,04 persen diperoleh dari jumlah siswa SMU/SMK/MA sebanyak 61.517 dibanding total jumlah penduduk usia sekolah SMU/SMK/MA sebanyak 113.838. APK ini juga mengalami peningkatan sebagaimana dalam tabel 3.20.

Peningkatan atau penurunan APK ini dapat terjadi karena meningkatnya atau menurunnya jumlah siswa dengan usia yang lebih tua atau lebih muda dari standar usia masuk sekolah pada jenjang tersebut.

Di bawah ini disajikan APK SD s/d SMU di Provinsi Papua beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.20

Jenjang Sekolah	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
APK SD	84,16	86,39	90,67	93.13
APK SMP	70,99	64,95	71,02	60,96
APK SMU	39,07	44,47	52,37	54,04

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Murni SD/MI 82,69 persen diperoleh dari jumlah siswa usia 7–12 tahun di tingkat SD/MI sebanyak 392.694 dibanding jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sebanyak 474.900 Angka ini meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 78,36 persen.

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 41,58 persen diperoleh dari jumlah siswa usia 13-15 tahun di tingkat SMP/MTs sebanyak 78.633 dibanding total jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs sebanyak 189.100. Kondisi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang mencapai 53,68 persen.

Angka Partisipasi Murni SMU/SMK/MI 44,81 persen diperoleh dari jumlah siswa usia 16-18 tahun di tingkat SMU/SMK/MA sebanyak 51.011 dibanding total jumlah penduduk usia sekolah SMU/SMK/MA sebanyak 113.838. APM SMU juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 43.11 persen.

Peningkatan Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua dari tahun ke tahun disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21

Jenjang Sekolah	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
APM SD	70,13	70,79	72,90	78,36	82,69
APM SMP	46,03	43,38	45,88	53,68	41,58
APM SMU	32,45	30,05	36,53	43,11	44,81

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua

Peningkatan persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Papua terjadi karena semakin ketatnya persyaratan masuk sekolah sesuai usia pada jenjang sekolah yang bersangkutan.

Dari 16 (enam belas) Indikator sasaran pada indikator kinerja utama (IKU) Provinsi Papua rata-rata capaian kinerjanya termasuk dalam kategori berhasil dan sebagian lagi masuk dalam kategori sangat berhasil.Namun secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Tahun 2016 pencapaian sasaran kinerjanya adalah 116,03 persen atau kategori **"sangat berhasil"**. Dibandingkan dengan pencapaian kinerja Tahun 2015 sebesar 82,27 persen maka telah mengalami peningkatan sebesar 33,26 persen. Semuanya itu dapat terwujud karena dukungan dan kerja keras dari semua pihak termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua yang secara proaktif melaksanakan berbagai program guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Papua.

Namun demikian disadari pula bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pendidikan di Provinsi Papua lebih baik sangatlah besar antara lain ketersedian guru-guru di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas masih kurang dibandingkan luas wilayah di Provinsi Papua,ketersedian sarana dan prasaran pendidikan yang relatif terbatas, tingkat kemahalan relatif sangat tinggi dan masih banyak lagi hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap proses peningkatan pendidikan di Provinsi Papua.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai 16 kinerja sasaran adalah sebesar Rp. 90.196.371.551 dan terealisasi sebesar Rp. 81.547.561.602 atau 90persen.

Dalam rangka pencapaian Sasaran 7 (tujuh) yaitu **Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil** maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Anugerah Aksara Pratama kepada Gubernur Papua atas Kinerja dan Kepedulian yang tinggi dalam percepatan pemberantasan Buta Aksara di Provinsi Papua terlampir.

Sasaran 8 : Meningkatnya prestasi olahraga

Peran olahraga sangat penting dan strategis dalam kehidupan era global yang penuh perubahan, persaingan dan kompleksitas, olahraga dianggap vital terutama menyangkut pembentukan watak dan kepribadian hingga karakter anak bangsa, sebab olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien dalam meningkatkan disiplin, sikap sportif, jujur, tanggung jawab, kreativitas, kerjasama dan daya inovasi, serta dapat mengembangkan kecerdasan. Olahraga dapat dilakukan sebagai latihan, pendidikan, hiburan, rekreasi, prestasi profesi, politik, bisnis, industri dan berbagai aspek lain dalam kebudayaan manusia. Karena itu, olahraga sangat penting dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Papua di mata dunia.

Olahraga mengandung potensi positif guna membina satu individu sebagai sumber daya manusia pendukung pembangunan bangsa, sehingga pada tahun 1981 Indonesia telah mencanangkan gerakan "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat" yang dikenal dengan nama panji olahraga.

Sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga merupakan sasaran untuk mencapai tujuan misi 3 yaitu Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia. Dalam sasaran ini diukur dengan pencapaian 1 (satu) indikator sasaranyaitu Persentase atlet/klub olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional,secara keseluruhan rata-

rata capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Prestasi Olahraga"** adalah 297,16 persen atau dalam skala ordinal adalah **"Sangat Berhasil"** dengan target indikator sebesar 25 persen dan realisasi sebesar 74,29 persen, pencapaian kinerja tahun 2016 meningkat sebanyak 150,87 persen dibanding tahun 2015 sebanyak 146,29 persen. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.22 Indikator Kinerja Sasaran 8

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase cabang olah raga yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional	persen	25	74,29	297,16
					297,16

Dari capaian kinerja olah raga yang mendapat penghargaan tingkat nasional **"sangat berhasil"**, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut belum memuaskan karena dipengaruhi oleh rendahnya penetapan target dalam perjanjian kinerja yaitu sebanyak 25 persen. Jumlah club/cabang olahraga yang mengikuti pertandingan sebanyak 35 cabang olahraga dengan jumlah medali sebanyak 68 dari 26 cabang olahraga ini masih sangat perlu ditingkatkan karena berdasarkan persentase atlit yang dikirim dalam pertandingan masih besar yaitu sebanyak 82,87 pesen yang belum mendapatkan penghargaan dibanding jumlah atlet yang telah menerima medali. Adapun cabang olahraga yang diikuti oleh para atlit-atlit Papua adalah cabang olahraga dayung, menembak, tinju, dansa, atletik, selam, pabbsi, silat, sepak bola, bola volly, kempo, wushu, balap sepeda, selancar/porlasi, taekwondo, gulat, bilyar, tarung drajat, sepatu roda, karate, berkuda, tenis meja, judo, panahan, renang, tenis lapangan dan bola volly pasir, terbang layang, hockey, layar, soft ball, angkat berat, bina raga, bola basket dan drum band.

Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan para atlit sudah mendatangkan pelatih-pelatih yang potensial untuk membina altit-atlit, dalam pembinaan tersebut diharapkan atlit-atlit dapat meningkatkan kemampuannya untuk persiapan Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat dan Pekan Olah Raga Nasional (PON) tahun 2020 yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua. Berikut disajikan tabel perolehan medali dan penerimaan medali PON XIX tahun 2016 di Jawa Barat :

PEROLEHAN MEDALI
PON XIX Jawa Barat

	KONTINGEN				
1	Jawa Barat	217	157	157	531
2	Jawa Timur	132	138	134	404
3	DKI Jakarta	132	124	118	374
4	Jawa Tengah	32	56	85	173
5	Kalimantan Timur	25	41	73	139
6	Bali	20	21	35	76
7	Riau	18	26	27	71
8	Papua	17	19	32	68
9	Sumatera Utara	16	17	33	66
10	Yogyakarta	16	16	25	57
11	Sumatera Barat	14	10	20	44
12	Sulawesi Selatan	12	23	28	63
13	Banten	11	10	26	47
14	Nusa Tenggara Barat	11	10	18	39
15	Lampung	11	9	16	36
16	Kalimantan Selatan	9	10	18	37
17	Aceh	8	7	9	24
18	Nusa Tenggara Timur	7	7	9	23
19	Kep. Riau	7	4	7	18
20	Maluku	7	3	9	19
21	Sumatera Selatan	6	11	14	31
22	Kalimantan Barat	6	8	16	30
23	Jambi	6	6	21	33
24	Sulawesi Tenggara	6	4	4	14
25	Papua Barat	4	2	10	16
26	Kalimantan Tengah	3	4	4	11
27	Kalimantan Utara	3	0	3	6
28	Gorontalo	2	0	1	3
29	Kep. Bangka Belitung	1	6	4	11
30	Maluku Utara	1	1	2	4
31	Sulawesi Utara	1	0	8	9
32	Sulawesi Tengah	0	4	7	11
33	Bengkulu	0	2	2	4
34	Sulawesi Barat	0	0	1	1
	Total Medali	**761**	**756**	**976**	**2493**

Sumber data : www.pikiran-rakyat.com

BIDANG PERTANDINGAN
PON XIX 2016 JAWA BARAT

Alamat:Jl.Dr.Radjiman6AKotaBandung-402171Notelp(022)4209690Nofax(022)4209690alamatemaildisorda@jabarprov.go.id

No	NamaAtlit	Kontingen	Juara	KelasPertandingan
1	AGUSTINUSMAHUZE	PAPUA	1	ATLETIK LemparLembingPutra
2	PAPUA	PAPUA	1	BERKUDA TeamNasionalU-23ShowJumpingYoungRide
3	JAMESLENGKANG	PAPUA	1	BILIAR Cadre47/11Putra
4	JAMESLENGKANG	PAPUA	1	BILIAR ThreeCushionSinglePutra
5	EDOAPCOWO	PAPUA	1	BINARAGA LightWeightabove65-70KgPutra
6	PAPUA	PAPUA	1	DANCESPORT PreAmateurLatinAmericaMixed
7	PAPUA	PAPUA	1	DANCESPORT RisingStarStandardBallroomMixed
8	PAPUA	PAPUA	1	DAYUNG10Pendayung250mPutri
9	ERNISOKOY	PAPUA	1	DAYUNGK-1200MPutri
10	ERNISOKOY	PAPUA	1	DAYUNGK-1500MPutri
11	PAPUA	PAPUA	1	DAYUNGK-2500MPutri
12	YOLANDAASMURUF	PAPUA	1	KARATEUnder68KgPutri
13	MARGARETHAHERAWATI	PAPUA	1	SELAM 100mBi-FinsPutri
14	VERRYDWIIRJAYANTO	PAPUA	1	SELAM OBA5PointCoursePutra
15	RAYSHADHAMATRA	PAPUA	1	SEPATURODAITT1.000MPutri
16	AKDAMINASUSANAEPA	PAPUA	1	TARUNGDERAJATKelas54.1Kg-58KgPutri
17	PAPUA	PAPUA	1	TENIS GandaMixed
18	PAPUA	PAPUA	1	TERBANGLAYANGPrecisionLandingDualSeaterMixed(
19	YUSAKREFASI	PAPUA	2	ATLETIK DasaLombaPutra
20	AGUSTINUSABADINDIKEN	PAPUA	2	ATLETIK LemparLembingPutra
21	MUHAMADJUNARTO KOSUGI	PAPUA	2	BILIAR 10BallSinglePutra
22	PAPUA	PAPUA	2	DAYUNG10Pendayung1000mPutra
23	PAPUA	PAPUA	2	DAYUNG10Pendayung1000mPutri
24	PAPUA	PAPUA	2	DAYUNG10Pendayung500mPutri
25	PAPUA	PAPUA	2	DAYUNGQuadrupleSculls(4X)Putri
26	MARYAM	PAPUA	2	DAYUNGSingleSculls(W1X)Putri
27	PAPUA	PAPUA	2	HOCKEYFieldHockeyPutra
28	PAPUA	PAPUA	2	HOCKEYIndoorHockeyPutri
29	CARLIMATATAR	PAPUA	2	KEMPO RandoriKelas65KgPutra
30	GEISKAF.SILAHOY	PAPUA	2	LAYAROptimistPutri
31	Monica	PAPUA	2	MENEMBAK 10mAirRifleMatchPutri
32	MARGARETHAHERAWATI	PAPUA	2	SELAM 200mBi-FinsPutri
33	MIFTACHULMUABIDIN	PAPUA	2	SELAM OBAM.CoursePutra
34	PAPUA	PAPUA	2	SOFTBALL BereguPutri
35	NORBERTHATAJUM	PAPUA	2	TINJU Bantam Putri
36	SALOMINAYERISETOUW	PAPUA	2	TINJU WelterRinganPutri
37	SEILAWAIMURI	PAPUA	3	ANGKATBERAT Kelas84KgPutri
38	ALOWESIUSMAHUZE	PAPUA	3	ATLETIK LemparCakramPutra
39	PAPUA	PAPUA	3	BERKUDA TeamEventing/ThreeDaysEvent(Open)
40	CORNELESAMO	PAPUA	3	BINARAGA FlyWeightabove-60KgPutra
41	PAPUA	PAPUA	3	BOLABASKET BereguPutra
42	PAPUA	PAPUA	3	BOLAVOLIPANTAI BereguPutri
43	PAPUA	PAPUA	3	DANCESPORT AmateurStandardBallroomMixed
44	PAPUA	PAPUA	3	DANCESPORT FFASlowfoxMixed
45	PAPUA	PAPUA	3	DANCESPORT RisingStarLatinAmericaMixed
46	PAPUA	PAPUA	3	DAYUNG10Pendayung250mPutra
47	PAPUA	PAPUA	3	DAYUNG10Pendayung500mPutra
48	PAPUA	PAPUA	3	DAYUNGDoubleScullKelasRingan(LW2X)Putri
49	PAPUA	PAPUA	3	DAYUNGDoubleSculls(W2X)Putri

DAFTAR PENERIMA MEDALI

No	NamaAtlit		Kontingen	Juara KelasPertandingan
50	PAPUA	PAPUA	3	DAYUNGK-4500MPutri
51	PAPUA	PAPUA	3	DRUMBAND LombaBerbarisJarakPendek(LBJP)2x400
52	PAPUA	PAPUA	3	HOCKEYFieldHockeyPutri
53	PAPUA	PAPUA	3	HOCKEYIndoorHockeyPutra
54	ERFITNANINTI	PAPUA	3	KARATEUnder61KgPutri
55	PETERYOUNGGRENWANDA	PAPUA	3	LAYAROptimistPutra
56	RONALDOAJABARWANIPAPARE	PAPUA	3	LAYARRSOnePutra
57	IKETUTSHASAKRISNAMURTI	PAPUA	3	LAYARRSXPutra
58	IKETUTSHASAKRISNAMURTI	PAPUA	3	LAYARRSXMarathon
59	FARID	PAPUA	3	MENEMBAK 10mAirRifleStandarPutra
60	PAPUA	PAPUA	3	SEPAKBOLA BereguPutra
61	PAPUA	PAPUA	3	TENIS BereguPutra
62	PAPUA	PAPUA	3	TENIS BereguPutri
63	SEPPIANANURZAHIROH	PAPUA	3	TENIS TunggalPutri
64	PAPUA	PAPUA	3	TENISMEJA BereguPutri
65	PAPUA	PAPUA	3	TENISMEJA GandaPutri
66	CHARLESDAUDA.WOMPERE	PAPUA	3	TERBANGLAYANGDurationFlightDualSeaterPutra
67	Taufan	PAPUA	3	TINJU BeratRinganPutra
68	RAHMATRENWARIN	PAPUA	3	WUSHU Kelas65KgPutra

Sumber data : Bidang Pertandingan PON XIX Bandung

Sasaran 9 : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua khususnya di dunia usahaperan pemuda sangat penting karenapara pemuda sangat berpengaruh dalam menggerakkan roda perekonomian yang akan berdampak positif dalam peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat serta dapat mengurangi pengangguran di Tanah Papua. Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, maka semangat pemuda asli Papua semakin tinggi untuk terjun kedunia usaha.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan serta Dinas Olahraga dan Pemuda memberikan perhatian khusus kepada pengusaha muda asli Papua dengan memberikan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan agar para wirausaha muda asli Papua dapat mengelola keuangan secara menguntungkan sesuai dengan prioritas kebutuhan, melatih cara berkomunikasi yang baik dan

mampu memahami orientasi lapangan yang objektif. Program pelatihan bagi wirausaha muda asli Papua ini telah berlangsung sejak tahun 2013 dalam Tahap I dengan mengirimkan 40 orang pengusaha, tahap II tahun 2014 sebnyak 50 orang pengusaha asli Papua dan Tahun 2015 sebanyak 46 orang pengusaha asli Papua.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan"** sebesar 96,37 persen dengan predikat **"Sangat Berhasil."** Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran.

Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.23 Indikator Kinerja Sasaran 9

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	persen	8.00	7.71	96,37
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**96,37**

Capaian kinerja sasaran **meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan** adalah 96,37 persen yang mengacu pada 1 (satu) indikator kinerja sebagai alat ukur untuk mencapai sasaran tersebut. Tahun 2016 IKU Guberur Papua menargetkan indikator Peningkatan wirausaha muda asli Papua sebanyak 8,00 persen dan realisasi sebesar 7,71 persen, dengan capaian kinerja sebesar 96,37 persen. Tahun 2015 capaian sasaran meningkat sebesar 4,85 persen dibanding tahun 2014 yang capaian sasarannya sebesar 105,33 persen.

Sasaran 10 : Terwujudnya iklim investasi yang kondusif

Terciptanya iklim investasi kondusif membuat para penanam modal/investor tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi, dan hal ini sangat mempengaruhi dalam meningkatkan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Dengan semakin banyak investor atau perusahaan dalam menanamkan modalnya akan berdampak positif terhadap pendapatan pajak Pemerintah Daerah/PAD meningkat, pelaku usaha memperoleh laba tinggi dan tenaga kerja terserap sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini terjadi jika pemerintah, swasta dan masyarakat umum sama-sama mempunyai pola kemitraan. Khusus pada Pemerintah mengenai peraturan-peraturan daerah (regulasi) harus lebih jelas sehingga tidak terjadi berbagai biaya tidak resmi (pungutan liar) dengan dalih adanya pelanggaran perda, perizinan atau alasan birokratik lainnya yang dianggap merepotkan karena dapat menyebabkan daya tarik para investor baik dari dalam maupun investor asing menurun dalam berinvestasi, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Papua menciptakan iklim usaha yang bersahabat dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sasaran **"terwujudnya iklim investasi yang kondusif"** yang dicapai adalah 51,34 persen, dengan predikat **"Kurang Berhasil".** Sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun dan Persentase peningkatan nilai Investasi PMA dari tahun ke tahun.

Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.24 Indikator Kinerja Sasaran 10

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*			
1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	persen	85,00	47,24	55,58
2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA dari tahun ke tahun	persen	60,00	28,26	47,10
					51,34

Capaian kinerja sasaran **"terwujudnya iklim investasi yang kondusif"** adalah sebanyak 51,34 persen. Dengan predikat **"Kurang Berhasil"** tidak tercapainya target kinerja dari 2 (dua) indikator sebagai alat ukur untuk mencapai sasaran "terwujudnya iklim investasi yang kondusif" disebabkan penetapan kinerja untuk tahun 2016 terlalu tinggi. Tetapi dilihat dari jumlah investasi PMDN mengalami peningkatan dari tahun 2015 Rp.46.650.707.000,00 menjadi Rp. 59.833.954.000,00 dan jumlah investasi PMA mengalami peningkatan dari tahun 2015 $47.393.674 menjadi $69.783.691

Sasaran **Terwujudnya iklim investasi yang kondusif** adalah sasaran dalam mencapai tujuan misi 4 yaitu Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **"*Terwujudnya iklim investasi yang kondusif*"** sebesar 51,34 persen dengan predikat **"kurang berhasil"**.

TABEL 3.25 Realisasi Investasi Perusahaan PMA selama 3 (tiga) tahun

TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	REALIASAI INVESTASI*)
2014	103	18.545.113
2015	108	47.393.679
2016	122	69.783.691

**) Nilai investasi dalam US$. Ribu*
Sumber data : BPTPM Provinsi Papua

TABEL 3.26 Rencana Dan Realisasi Investasi Perusahaan PMDN selama 3 (tiga) tahun

TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	REALISASI INVESTASI *)
2014	65	10.679.551
2015	78	46.650.707
2016	78	59.833.954

**) Nilai investasi dalam Rp. Juta*
Sumber data : BPTPM Provinsi Papua

Sasaran 11 : Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Papua salah satunya diprioritaskan pada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan yang dilakukan dengan sasaran meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal.

Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran ini, diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu : Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas), Persentase peningkatan jumlah industri kecil menengah, dan Persentase peningkatan Usaha Kecil Menengah.

Tabel 3.27 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*			
1	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	persen	11	4,73	43,00
2	Persentase peningkatan jumlah industri kecil menengah	persen	19	18,00	94,73
3	Persentase peningkatan Usaha Kecil Menengah	persen	25	37,70	150,80
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**96,18**

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang "**sangat berhasil"** dengan rata capaian kinerja sasaran mencapai 96,18 persen**.** Sasaran ini bertujuan meningkatkan koperasi yang sehat, berkualitas, meningkatanya partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan meningkatkan jumlah koperasi yang aktif.

Indikator Persentase Koperasi aktif yaitu bertambahnya komposisi koperasi aktif dari total koperasi atas berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif dari total koperasi. Sebuah koperasi dikatakan sebagai koperasi aktif, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memilliki kantor koperasi.
2. Kegiatan koperasi masih berjalan.
3. Anggota kepengurusan masih lengkap dan sesuai dengan peraturan.

Jumlah koperasi yang ada di Provinsi Papua pada tahun 2016 adalah 3.321 koperasi, yang terdiri dari beberapa jenis koperasi yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 3.10

Persentase Jenis Koperasi di Provinsi Papua

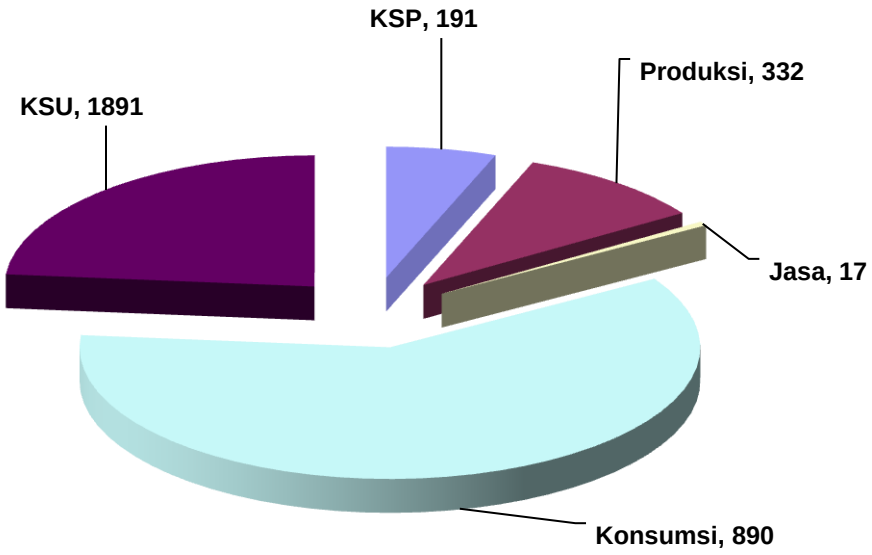

Dari total koperasi yang ada di Provinsi Papua tahun 2016 sebanyak 3.321 unit koperasi (5.89persen) dan tahun 2015 sebanyak 3.136 unit koperasi (1.12 persen), jumlah koperasi aktif sebanyak 1.792 unit koperasi (4.73 persen). Sedangkan pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif sebesar 1.711 unit Koperasi (4.09 persen).

Indikator Persentase Koperasi Sehat (aktif dan Melaksanakan RAT) yaitu bertambahnya komposisi koperasi sehat (aktif dan Melaksanakan RAT) dari total koperasi atas berkurangnya jumlah koperasi yang aktif tapi tidak RAT dari total koperasi. Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2016 sebanyak 442 unit koperasi sementara tahun 2015 sebanyak 347 Unit koperasi yang RAT.

Indikator Persentase Jumlah Anggota Koperasi yaitu bertambahnya partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi setiap tahun dimana partisipasi anggota juga sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan koperasi. Apalagi anggota koperasi merupakan pemilik *(owner)* sekaligus sebagai pengguna / pelanggan *(user)* koperasi. Artinya bahwa usaha koperasi memang ditujukan terutama untuk melayani kebutuhan anggota. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2016 mencapai 205.239 anggota sementara tahun 2015 sebesar 165.271 anggota.

Dari kondisi diatas terlihat pada tahun 2016 indikator sasaran ke -1 ada kenaikan namun tidak terlalu signifikan yaitu pada indikator No. 1 dan 2 walaupun tidak mencapai target dari tahun sebelumnya, sementara pada indikator No. 3 hasil yang dicapai cukup baik dan melampui target yang ada. Dari penjelasan yang ada hal ini kenyataannya masih terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan koperasi di Provinsi Papua diantaranya sebagai berikut :

1. Masih banyak rentenir yang berkedok koperasi.
2. Masih banyak koperasi aktivitas yang tidak sejalan dengan jati diri, prinsip, dan azaz sebuah organisasi koperasi.
3. Masih kurangnya akses permodalan bagi koperasi.
4. Masih banyak data yang sampai pembuatan laporan ini dibuat belum masuk atau disampaikan oleh Kab/kota ke Provinsi.
5. Tenaga SDM pembina dan pendamping Koperasi di daerah sangat kurang untuk mendampingi Koperasi-koperasi yang ada di Kab/kota karena banyak yang sudah dimutasikan ke instansi lain sehingga pembinaan kepada koperasi kurang optimal.
6. Belum semua koperasi melakukan RAT Tahun 2016 saat pembuatan laporan ini dibuat jadi data yang dipakai masih data sementara.

Dalam rangka Demokrasi ekonomi maka UMKM perlu terus diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat untuk memwujudkan struktru perekonomian nasional yang semakin berkembang, berimbang dan berkeadilan, mampu menyediakan kesempatan/lapangan kerja dan

penghidupan yang layak bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha khususnya UMKM, maka perlu upaya unntuk memberdayakan masyarakat untuk dipersiapkan menjadi wirausahawan yang tangguh dan berdaya saing sehingga wirausaha baru diharapkan dapat berdampak bagi perkembangan perekonomian daerah yang tentunya dapat berkontribusi paa PDRB serta mampu menyerap tenaga kerja baru. Untuk itu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua terus melakukakan beberapa hal untuk mendukung indikator diatas antara lain :

1. Meningkatkan pemberdayaan UMKM secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusifsehingga diharapkan mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM
2. Meningkatkan rintisan pemberdayaan bagi para pelaku usaha
3. Meningkatkan jumlah wirausaha baru

Persentase peningkatan jumlah industri kecil menengah dengan Target 19 persen, terealisasi 18persen dengan capaian Kinerja sebesar 94,73. Nilai Capaian Kinerja ini menunjukkan kategori **"Sangat Berhasil"**. Hal yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah adanya pembinaan, pelatihan, bantuan peralatan dan pemberian pinjaman modal yang disalurkan pemerintah melalui KUR (kredit usaha kecil) bagi Usaha Kecil sehinga dapat meningkatkan usaha dan pendapatan Usaha Kecil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke -11 sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator ke-3 tercapai melebihi target yang telah ditetapkan atau berpredikat ***amat baik*** . Realisasi jumlah UMKM tahun 2016 sebanyak 41.611 UMKM atau naik sebesar 37,70 persen dari target yang ditetapkan sebesar 25,00 persen , sedangkan tahun 2015 sebesar 30.213 UMKM (25,30 persen) dan Jumlah Wirausaha baru tahun 2016 10.245 atau naik sebesar 85,60 persen dari target yang ditetapkan sebesar 76.70 persen, sedangkan tahun 2015 sebanyak 5.521 (74,60 persen).

Faktor pendukung tercapainya kinerja sasaran meningkatnya jumlah UMKM dan meningkatnya jumlah wirausaha baru adalah :

1. Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM dari berbagai sektor termasuk peran serta lembaga swasta dan perbankan.
2. Pemberdayaan UMKM dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif.
3. Meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Papua, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat Papua serta penciptaan lapangan kerja yang secara tidak langsung ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua.
4. Meningkatnya jumlah wirausaha baru dikarenakan adanya peran pemerintah dalam mensosialisasikan gerakan kewirausahaan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota
5. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru sebagai salah satu solusi menciptakan lapangan kerja mandiri.

Sasaran 12 : Terwujudnya Peningkatan Penyediaan Lapangan Kerja

Salah satu alat ukur dari meningkatnya kemajauan suatu daerah adalah tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Pencapaian sasaran ini dikukur dari 2 (dua) indikator yaitu Tingkat Pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dari dua indikator tersebut peningkatan penyediaan lapangan kerja menunjukkan capaian kinerja sebesar 106,08 persen dengan kategori **"sangat berhasil"** sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.28 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 12

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*			
1	Tingkat pengangguran terbuka	persen	3,5	2,97	117,85
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	83	78,28	94,31
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**106,08**

Rumus untuk mendapatkan tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Jumlah angkatan kerja di Papua sebanyak 1.743.160 orang, sedangkan jumlah pengangguran adalah sebanyak 51.728 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), capaian kinerjanya mencapai 117,85 persen. TPT Provinsi Papua periode 2008-2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tahun 2008 TPT sebesar 4,39 persen dan tahun 2014 sebesar 3,44 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,95 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), tidak mencapai dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 94,31 persen. Pencapaian TPAK ini dipengaruhi dari penduduk usia kerja dan jumlah angkatan kerja, dapat kita lihat dari penduduk usia kerja umur 15-19 tahun paling dominan berkontribusi angkatan kerja pada tahun 2014 sebesar 374 orang (minta data dari pusat data) dan penduduk usia ini masih merupakan usia sekolah sehingga dapat diasumsikan bahwa meningkatnya angka melanjutkan pendidikan semakin baik berkontribusi dari TPAK secara keseluruhan.

Gambar 3.11 Perkembangan Usia Kerja umur 15-19 tahun (2008-2014) dan Kontribusi Gologan Umur pada Penduduk Usia Kerja tahun 2014 Provinsi Papua

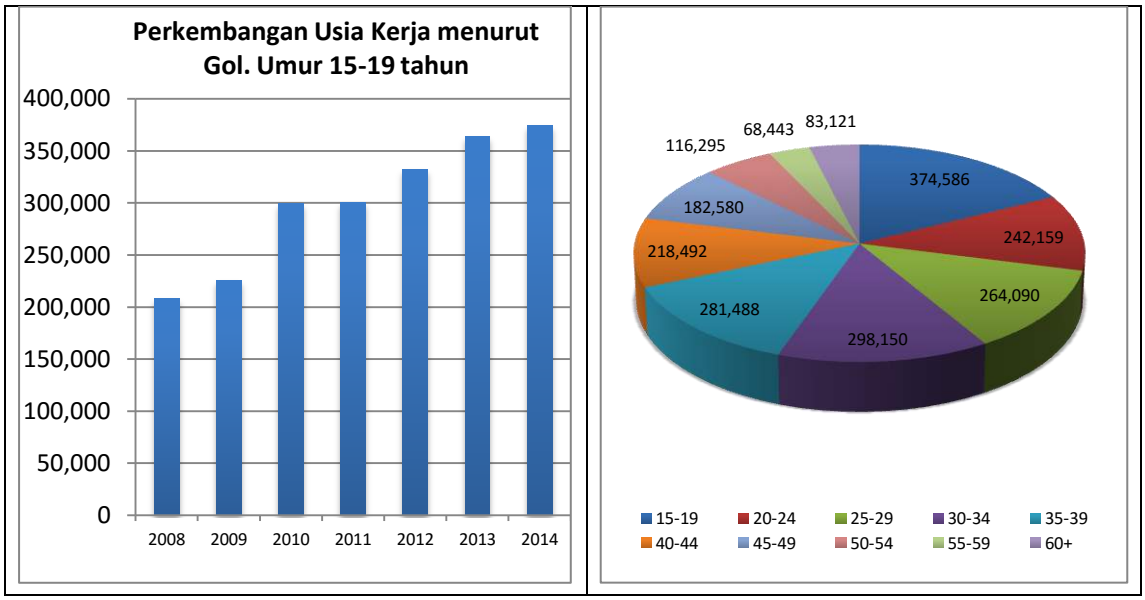

Namun apabila melihat rasio kesempatan dan angkatan kerja. Data tahunan menunjukkan bahwa rasio penduduk yang bekerja memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, walaupun penurunan pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2014, menunjukkan bahwa rasio penduduk yang bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja adalah 96.56 persen.

Tabel 3.29 Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Papua tahun 2008-2014

Uraian	TAHUN						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Angkatan Kerja	1,075,214	1,128,036	1,510,176	1,536,728	1,585,434	1,688,876	1,675,113
Bekerja	1,028,023	1,082,028	1,456,545	1,476,227	1,527,933	1,634,332	1,617,437
Rasio Penduduk yang Bekerja	95.61	95.92	96.45	96.06	96.37	96.77	96.56

Sumber : Dinas Tenaga Kerja

Sasaran 13 : Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah

Urusan Pariwisata merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan strategis di Provinsi Papua. Papua memiliki kekayaan multidimensional mulai dari keadaan alamnya yang menakjubkan mulai dari puncak gunung tertinggi, lembah dan ngarai yang indah, hutan terbentang luas dengan flora dan fauna unik dan endemik, pesisir pantai terbentang dan gugusan pulau yang indah, isi laut yang tiada tara, adat budaya masyarakat asli yang unik dan maka potensi wisata Papua patut ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah.

Provinsi Papua juga memiliki taman nasional, yaitu Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Nabire sehingga Papua memiliki potensi pariwisata terlengkap di Indonesia dan dunia. Terkait sasaran di atas, ada dua indikator yang mengukur pencapaian kinerja untuk sasaran 13 ini, yaitu Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran serta Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua.

Tabel 3.30 Indikator Kinerja Sasaran 13

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	persen	10,00	12,92	129,20
2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	persen	5,00	7.75	155,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**142,10 persen**

Untuk tahun 2016 capaian kinerjanya sebesar 142,10 persen atau naik sebesar 38,45 persen dari tahun sebelumnya. Adapun realisasi anggarannya sebesar 95 persen. Artinya dalam rangka pencapaian kinerja menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran tetapi dapat menghasilkan kinerja yang baik.

Terkait pencapaian dari Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2016 sumbangan sektor perdagangan mencapai 12,92 persen sedikit agak menurun dari tahun 2015 sebesar 8,92 persen. Adapun tingkat pertumbuhan sebesar 8,75 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 8,25 persen. Untuk peranan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam pembentukan PDRB sebesar 0,77 persen sedikit agak menurun dibanding tahun 2015 yang mencapai 0,81 persen namun pertumbuhannya tetap dikisaran 7,53 persen atau hampir sama pada tahun 2015 yang mencapai 7,52 persen. Hal ini menandakan adanya geliat pariwisata didukung dengan pertumbuhan hotel di Papua, seperti tabel berikut.

Tabel 3.31 Distribusi dan Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada PDRB Papua Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 r), Tahun 2015 Dan Tahun 2016*) (persen)

Lapangan Usaha	Distribusi			Pertumbuhan		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.46	8.92	8.76	7.30	8.25	8.75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.80	0.81	0.77	12.57	7.52	7.53

Sumber: BPS Papua, 2016

Adapun alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka meningkatkan peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah sebesar Rp. 11.575.260.000dan terealisasi sebesar Rp. 11.207.333.000 atau 95persen dari total anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian kinerja sektor dimaksud.

Sasaran 14 : Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran "Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat" adalah 124,52 persen atau dalam skala ordinal adalah **"Sangat Berhasil"**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.32 Indikator Kinerja Sasaran 14

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (persen)	persen	1,30	1,30	100,00
2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (persen)	persen	1,20	0,87	72,50
3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (persen)	persen	4,50	5,15	114,44
4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	persen	10,00	21,00	210,00
5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	persen	2,20	2,90	131,82
6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	30,00	35,50	118,33
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**124,52**

Indikator kinerja **Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB** (persen) ditargetkan sebesar 1,30 persen dan tercapai 1,30 persen sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100 persen. Capaian indikator kinerja tersebut mengalami penurunan sebesar 23,33 persen jika dibanding capaian tahun sebelumnya yaitu 123,33 persen.

Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan penetapan target yang tinggi namun dapat tercapai sehingga walaupun angka perbandingan dengan tahun sebelumnya menurun namun sebenarnya kinerja kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB adalah meningkat.

Kenaikan kontribusi PDRB sub sektor perkebunan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain meningkatnya aktivitas ekonomi dari sektor investor swasta yang bergerak dibidang perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit dimana kelapa sawit merupakan komoditas eksport sehingga secara ekonomi sangat menguntungkan. Selain kelapa sawit, komoditas lain yang mendukung peningkatan aktifitas ekonomi adalah kakao, kopi, kelapa dan karet.

Komoditas tanaman kakao di sentra kakao yaitu wilayah Mamta, Saireri dan La Pago pada tahun 2016 meningkat karena adanya upaya pengendalian hama serta sanitaasi kebun yang selalu dijaga dan pemangkasan rutin dilakukan oleh petani kakao.

Selain kakao, produksi tanaman kopi pada penetapan angka tetap tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,009 ton atau 53,148 persen dibandingkan dengan angka produksi tahun 2014. Peningkatan produksi kopi ini dipengaruhi tingginya nilai jual komoditi kopi yang merupakan komoditi eksport sehingga minat petani kopi untuk merawat kebun kopinya menjadi lebih tinggi terutama di daerah sentra kopi yaitu wilayah La Pago dan Mee Pago.

Untuk komoditi kelapa dalam, capaian angka produksi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 15.320 ton atau 51,973 persen dibandingkan produksi tahun 2014. Sentra produksi tananam kelapa dalam berada pada wilayah Mamta, Saireri, Ha Anim dan Mee Pago.

Sentra pengembangan dan produksi komoditas karet di Papua berada di wilayah Ha Anim tepatnya di Kabupaten Merauke, Boven Digul dan Mappi. Produksi karet tahun 2015 adalah 3.342 ton karet kering atau 50,43 persen dibanding tahun 2014 sebesar 3.285 ton atau 49,570 persen. Produksinya cenderung tetap karena pengaruh musim kemarau berkepanjangan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah selatan Papua. Upaya yang dilakukan untuk menignkatkan produksi karet adalah dilakukan perluasan wilayah perkebunan karet di Kabupaten Merauke seluas 150 Ha.

Angka produksi sagu tahun 2015 mencapai 24,959 ton atau 36,839 persen mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2014. Hal ini

disebabkan fokus petani sagu beralih ke kegiatan pengembangan tanaman khususnya kegiatan perluasan dan penataan tanaman yang bersumber dari Dana APBN seluas 750 Ha. Pengembangan komoditas sagu dilakukan di sentra-sentra yaitu wilayah Saireri, Mamta dan Mee Pago.

Grafik 3.12 Perbandingan Angka Produksi Komoditi Perkebunan (ton) Tahun 2014 dan 2015

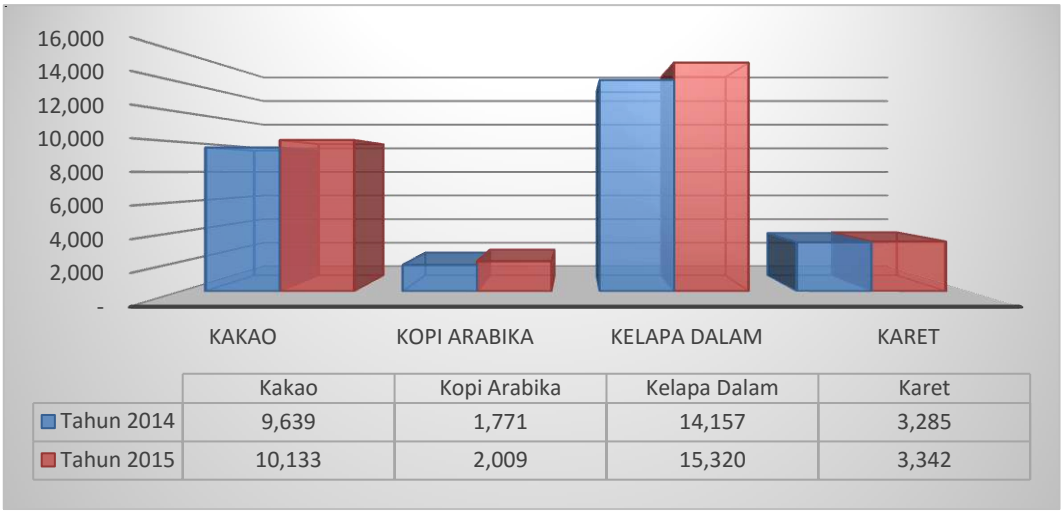

	Kakao	Kopi Arabika	Kelapa Dalam	Karet
Tahun 2014	9,639	1,771	14,157	3,285
Tahun 2015	10,133	2,009	15,320	3,342

Sumber data: Dinas Perkebunan Provinsi Papua

Secara umum produktivitas tanaman perkebunan yang ada di Provinsi Papua masih dibawah 60 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Penggunaan bibit/benih yang berasal dari benih asalan (tidak bersertifikat) menyebabkan produksi secara jangka panjang berkurang.
- Tingginya intensitas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
- Rendahnya kemampuan dan pengetahuan petani dalam penerapan sistem budidaya yang baik.
- Usia tanaman yang melewati batas usia produktif.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalah di atas adalah:

- Melakukan penendalian secara terintegrasi dan terpadu melalui gerakan massal pengendalian hama dan penyakit.
- Pelatihan dan pembinaan petani melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT), Bintek dan pelatihan di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura, Nabire, Waropen, Dogiyai, dan Pegunungan Bintang.

❖ Rehabilitasi tanaman kakao seluas 10 Ha di Kabupaten Waropen dan 10 Ha tanaman kopi di Kabupaten Dogiyai, Deiyai dan Pegunungan Bintang.

Grafik 3.13 Intensitas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pada Tanaman Kakao Tahun 2016

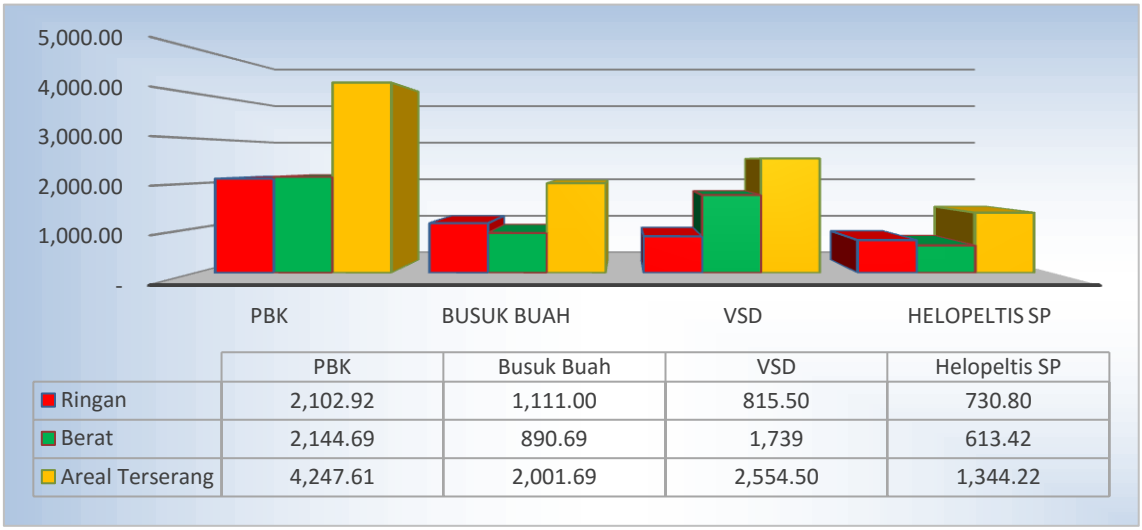

	PBK	Busuk Buah	VSD	Helopeltis SP
Ringan	2,102.92	1,111.00	815.50	730.80
Berat	2,144.69	890.69	1,739	613.42
Areal Terserang	4,247.61	2,001.69	2,554.50	1,344.22

Sumber data: Dinas Perkebunan Provinsi Papua

Indikator kinerja **Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB** (persen) dari target sebesar 1,20 persen terealisasi 0,87 persen dengan capaian kinerja indikator sebesar 72,50 persen. Kontribusi PDRB sub sektor peternakan terhadap PDRB Provinsi Papua dari yang ditargetkan 1,20 persen terealisasi sebesar 0,87 persen atau tingkat capaian sebesar 71,90 persen. Dibandingkan dengan tahun 2015 kontribusi PDRB subsektor peternakan mengalami penurunan sebesar 5,43 persen. Namun Kontribusi PDRB Sub sektor Peternakan mengalami peningkatan sebesar 5,01 persen dari tahun 2015 yang hanya meningkat 0,16 persen.Kontribusi PDRB Subsektor Peternakan Tahun 2016 secara rinci terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.33

PDRB DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

URAIAN		2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		**17,356,761.26**	**20,185,964.22**	**21,603,759.14**
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	7,993,683.87	8,924,195.46	9,521,984.96
	a. Tanaman Pangan	3,967,238.01	4,432,671.55	4,511,289.92
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	618,897.19	685,510.08	764,861.41
	c. Perkebunan Semusim	432.80	456.45	515.26
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	719,977.10	782,363.61	873,892.39
	e. Perkebunan Tahunan	1,368,658.04	1,499,548.37	1,667,518.91
	f. Peternakan	1,191,697.08	1,388,200.14	1,560,147.18
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	126,783.64	135,445.27	143,759.88
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,343,192.34	2,757,486.30	2,900,848.83
3	Perikanan	7,019,885.05	8,504,282.47	9,180,925.36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**133,329,981.21**	**151,201,498.24**	**178,370,342.93**

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Papua,2016/Data di Olah.

Dalam menunjang capaian output indikator kinerja tahun 2016 dilakukan kegiatan pasar murah, dan penguatan kelembagaan pelaku usaha peternakan. memang dilihat bahwa pada tahun 2016 investasi sub sektor peternakan masih sangat terbatas untuk itu perlu diambil langka-langka strategi dalam menumbuhkan investasi peternakan di Provinsi Papua juga melakukan pembinaan dan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil produk peternakan.

Grafik 3.14 Produksi Peternakan tahun 2012-2016

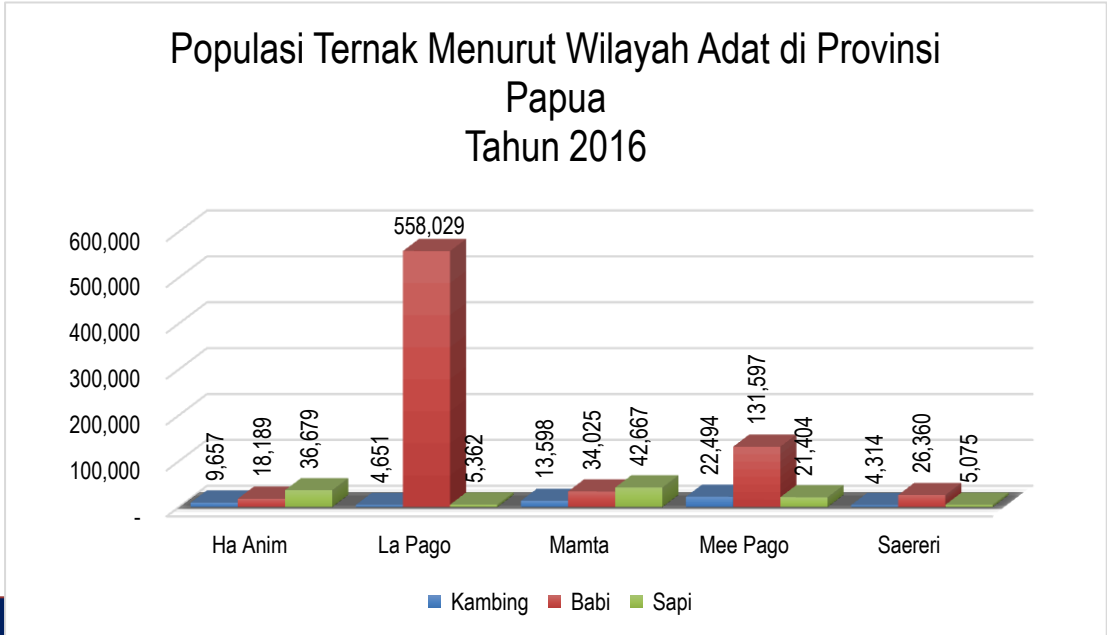

Tabel 2.34

Daging	TAHUN			
	2012	2013	2014	2015
Tenak Sapi Potong	15.259	1.516	15.043	15.649
Tenak Kambing	117.571	131.525	184.523	192.606
Tenak Domba	-	-	51	64
Tenak Babi	5.242.336	6.266.554	6.671.844	7.244.475
Ternak Kerbau	77856	63015	7518	82236
Ternak Kuda	-	-	765	915
Ayam Buras	1.258.688	2.093.688	3.253.882	3.510.250
Ayam Ras Petelur	15.518	16.613	204.687	226.081
Ayam Pedaging	2.283.795	2.310.701	2.203.623	2.866.139
Itik	57.619	35.672	36.706	37.779
Itik Manila	-	15.747	25.824	28.521
Burung Puyuh	50	136	2.005	2.103

Populasi	2012	2013	2014	2015
Tenak Sapi Potong	88.347	79.574	94.865	100.135
Tenak Kambing	34.636	35.251	49.247	49.849
Tenak Domba	20	11	14	18
Tenak Babi	577.407	579.024	680.099	722.768
Ternak Kerbau	1460	549	751	787
Ternak Kuda	1.421	1.559	1.611	1.635
Ayam Buras	1.881.217	1.942.197	1.752.471	1.887.883
Ayam Ras Petelur	102.164	12.369	279.398	308.601
Ayam Pedaging	2.506.219	2.518.146	2.429.707	3.160.195
Itik	8.239	56.893	58.674	60.386
Itik Manila	-	23.859	39.127	43.214
Burung Puyuh	2.936	3.024	9.115	9.559
Burung Merpati	130	476	165	185

Indikator kinerja **Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB** (persen) ditargetkan 4,50 persen dan terealisasi 5,15 persen dengan capaian kinerja 114,44 persen.

Produksi hasil perikanan pada tahun 2015 sebesar 293.827,60 ton (Data Statistik Perikanan Provinsi Papua Tahun 2015, Sementara). Hasil tersebut menurun sebanyak 17.057,80 ton jika dibanding hasil perikanan tahun 2014 yang mencapai 310.885,40 ton. Penurunan produksi hasil perikanan antara lain disebabkan pemanfaatan lahan usaha budidaya perikanan tahun 2015 menurun dibanding tahun 2014 dimana potensi lahan budidaya mencapai 11,8 juta Ha sedangkan yang dimanfaatkan sebesar 2.962,70 Ha (0,025 persen). Selain itu penurunan hasil perikanan juga dipengaruhi oleh penurunan jumlah armada perikanan tangkap yaitu pada tahun 2014 sebanyak 22.050 unit sedangkan tahun 2015 hanya sebanyak 17.686 unit sehingga turun 19,79 persen dan penurunan jumlah nelayan dan pembudidaya ikan tahun 2014 sebanyak 148,571 orang sedangkan tahun 2015 sebanyak 104.713 orang atau turun 29,52 persen.

Realisasi penerimaan daerah (PAD) dari sektor perikanan tahun 2015 adalah Rp721.573.350,00 dari target yang ditetapkan tahun 2015 yang sebesar Rp1.661.600.000,00 atau hanya tercapai 43,43 persen. Hal ini disebabkan kegiatan pengujian mutu hasil perikanan tidak terlaksana sesuai perencanaan akibat adanya moratorium larangan kapal perikanan asing beroperasi di perairan Papua.

Tabel 3.35 Data Produksi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tahun 2014-2015

No	Rincian	Realisasi		persen (+/-)
		2014	2015	
A. FUNGSI EKONOMI				
1	Produksi Perikanan (Juta Ton)			
	- Perikanan Tangkap	300.342,40	282.622,20	(17.720,20)
	- Perikanan Budidaya	10.543,00	11.205,40	662,40
2	Jumlah Tanaga Kerja Perikanan			
	- Nelayan	139.009,00	95.032,00	(43.977,00)
	- Pembudidaya dan Pembenih	9.492,00	9.680,00	188,00
	- Pengolah dan Pemasar	2.367,00	2.723,00	356,00
3	Komsumsi Ikan (Kg/Kap/Org)	38,00	38,59	0,59
4	Ekspor Hasil Perikanan ($)	39.044.750,30	66.769.762,00	27.725.011,70
5	Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang Bersertifikat (Unit/Tahun)	14,00	13,00	(1,00)
6	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan	102,36	102,40	0,04
B. FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP				
1	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha/Tahun)	1.090.347,00	62.660.000,00	61.569.653,00
2	Jumlah Pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil yang dikelola (pulau/thn)	2,00	6,00	4,00
3	Rasio Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perikanan	2,00	2,00	-

Capaian indikator kinerja **Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB** (persen) dari target sebesar 10,00 persen terealisasi 21,00 persen dengan capaian kinerja indikator sebesar 210,00 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka satu tahun. Unit- unit produksi tersebut di kelompokan dalam 17 (tujuh belas) lapangan usaha sebesar

Perkembangan PDRB sektor pertanian di Provinsi Papua selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan pertumbuah yang positif, yaitu rata-rata tumbuh 11,61 persen. Perkembangan PDRB sektor pertanian di Provinsi Papua selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36

Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Harga Berlaku) di Provinsi Papua selama Tahun 2013-2016.

No.	Sub Sektor	Produk Domestk Regional Bruto (Rp.juta)			Rata-rata Pertumbuhan
		2014	**2015**	**2016**	
1.	Tanaman Pangan	3.967.238	4.432.672	4.511.290	6,75
2.	Hortikultura	1.332.890	1.461.070	1.638.754	10,89
3.	Perkebunan	1.369.091	1.500.005	1.668.034	10,38
4.	Peternakan	1.191.697	1.388.200	1.560.147	14,44
5.	Jasa pertanian	126.784	135.445	143.760	6,49
6.	Kehutanan	2.360.545	2.770.737	2.900.848	11,04
7.	Perikanan	7.036.968	8.661.829	9.180.925	14,54
	Jumlah	**17.385.212**	**20.349.957**	**21.603.759**	**10,65**

Sementara kontribusi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura pada PDRB Provinsi Papua (Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), Tahun 2016 dapat dilihat pada grafik 3.15 di bawah ini :

Grafik 3.15

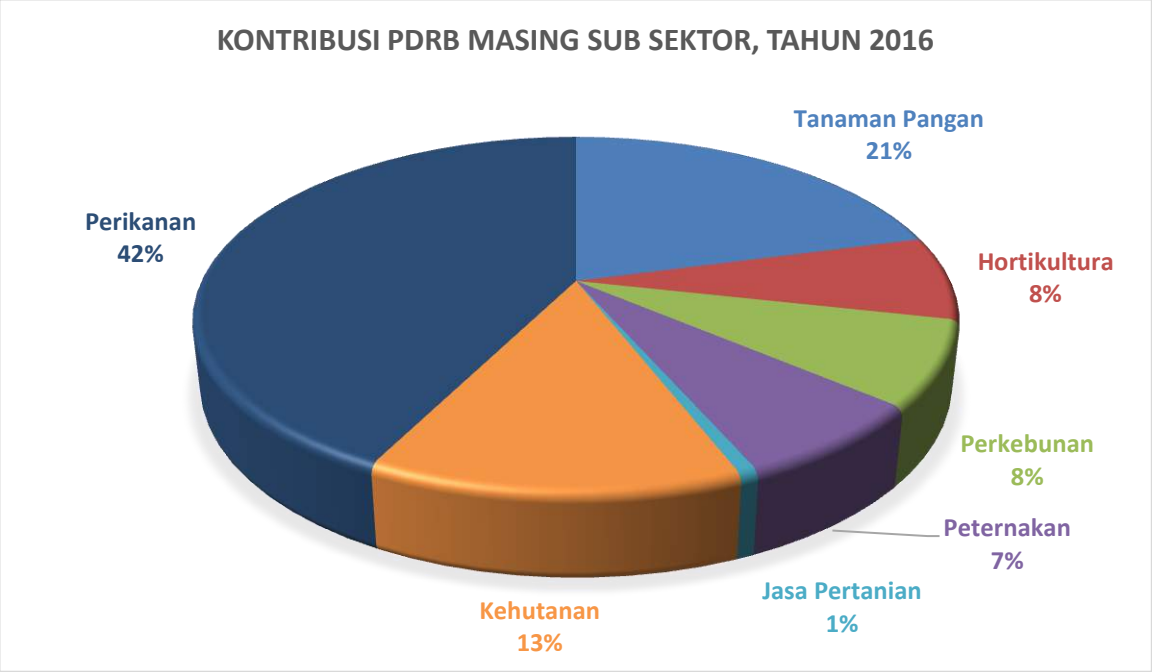

Nilai Tukar Petani (NTP) didefinisikan sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Arti angka NTP sebagai berikut:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas
- NTP < 100, berrati petani pengalami defisit

NTP digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani/daya beli petani dan tingkat daya saing produk pertanian/ kemampuan tukar produk pertanian dengan produk lain, Perkembangan NTP tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Papua selama tahun 2014-2016 dapat di lihat pada grafik 3.16 dibawah ini :

Grafik 3.16

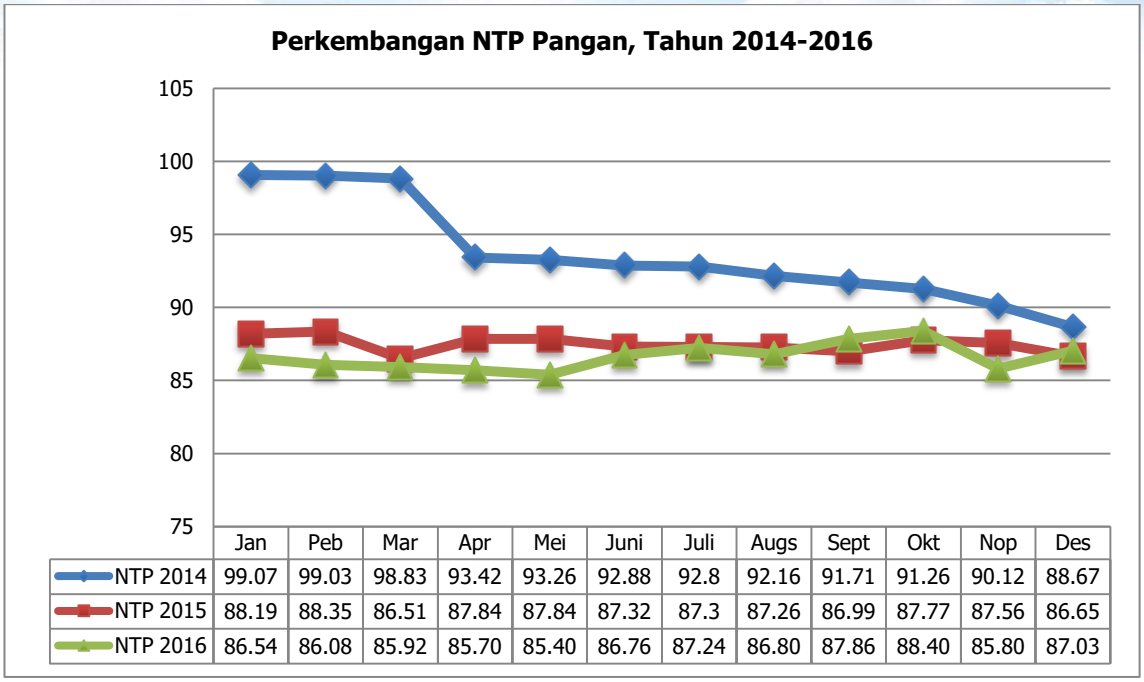

	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Augs	Sept	Okt	Nop	Des
NTP 2014	99.07	99.03	98.83	93.42	93.26	92.88	92.8	92.16	91.71	91.26	90.12	88.67
NTP 2015	88.19	88.35	86.51	87.84	87.84	87.32	87.3	87.26	86.99	87.77	87.56	86.65
NTP 2016	86.54	86.08	85.92	85.70	85.40	86.76	87.24	86.80	87.86	88.40	85.80	87.03

Grafik 3.17

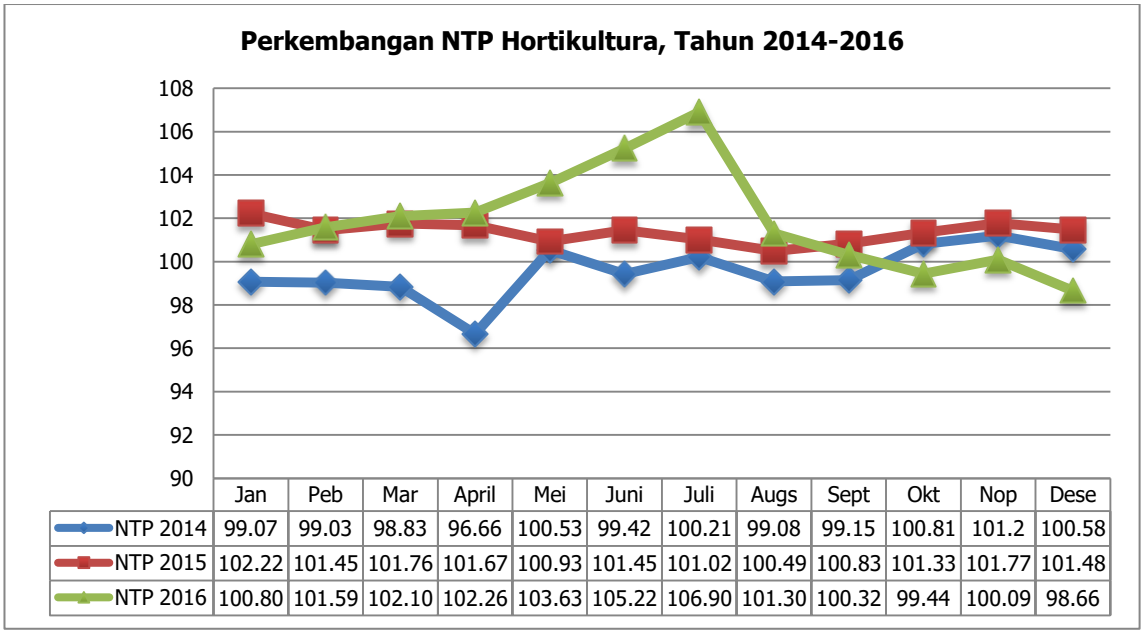

	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Augs	Sept	Okt	Nop	Dese
NTP 2014	99.07	99.03	98.83	96.66	100.53	99.42	100.21	99.08	99.15	100.81	101.2	100.58
NTP 2015	102.22	101.45	101.76	101.67	100.93	101.45	101.02	100.49	100.83	101.33	101.77	101.48
NTP 2016	100.80	101.59	102.10	102.26	103.63	105.22	106.90	101.30	100.32	99.44	100.09	98.66

Berdasarkan perkembangan NTP tanaman pangan dan hortikultura pada gambar 2 dan 3, dapat disimpulkan bahwa:

- Petani yang mengusahakan produk hortikultura memiliki tingkat kesejahteraan/daya beli yang lebih baik dari petani yang mengusahakan produk tanaman pangan.

- Petani yang mengusahakan produk hortikultura mengalami surplus pendapatan (memiliki tabungan) sementara petani yang mengusahakan produk tanaman pangan cenderung defisit.
- NTP hortikultura pada tahun 2015 jauh lebih baik dari NTP tahun 2014 (pertumbuhan positif) sementara tanaman pangan mengalami pertumbuhan negatif.

Target indikator tercapai berkat adanya pengembangan agroindustri tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Papua. Hal ini sejalan dengan RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018 yang menitikberatkan kepada peningkatan nilai tambah produk lokal Papua melalui strategi tanam, petik, olah dan jual komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Papua.

Produksi tanaman pangan dan hortikultura terus meningkat dengan signifikan namun disisi lain diperlukan adanya pengolahan hasil tanaman pangan untuk dapat menstabilkan ketersediaan pangan dan pendapatan pelaku usaha pertanian yang secara otomatis akan memberikan dampak bagi kondisi perekonomian di Provinsi Papua. Secara umum, sub sektor tanaman bahan makanan memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap total nilai tambah sektor pertanian.

Indikator ke enam dari sasaran ke 14 yaitu **Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB** (persen) tercapai dari target yang ditetapkan sebesar 2,20 persen dan terealisasi sebesar 2,90 persen dengan capaian kinerja sebesar 131,82 persen.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung dengan adanya peningkatan pendapatan negara dari sektor kehutanan yang mencapai Rp. 260 Milyar dari target Rp. 297 Milyar atau 87,54 persen. Peningkatan pendapatan negara sektor kehutanan tercapai berkat adanya pembangunan hutan tanaman masyarakat hukum adat melalui kegiatan pemeliharaan demplot hutan rakyat, pengembangan usaha pemanfaaatan kayu masyarakat hukum adat serta adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan dimana telah dilakukan pembinaan penatausahaan hasil hutan terhadap 16 pemegang ijin pengelolaan hasil hutan. Hasil dari pengawasan pengelolaan hutan adalah berkurangnya perambahan dan pencurian hasil hutan sehingga secara tidak langsung meningkatkan pendapatan negara dari sektor kehutanan.

Indikator ke enam dari sasaran ke 14 yaitu **Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB** (persen) tercapai 35,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar 30 persen dan terealisasi sebesar 118,33 persen.

Dari sektor Pertambangan memperoleh penerimaan sebesar Rp63.316.718.000.000,29 dengan kontribusi PDRB Rp35.497.335.000.000,07. Sementara total PDRB Provinsi Papua adalah Rp178.370.342.000.000,93,- atau dengan kata lain penerimaan dari sektor pertambangan berkontribusi sebesar 35,50 persen terhadap PDRB Provinsi Papua. Peningkatan sektor pertambangan dipengaruhi oleh program-program seperti :

1. Program pembinaan, pengawasan, pengusahaan mineral dan batubara;
2. Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi;
3. Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG);
4. Program pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi serta
5. Program penelitian dan pengembangan pada UPTD bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

Grafik 3.18
Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Tahun 2014-2016.

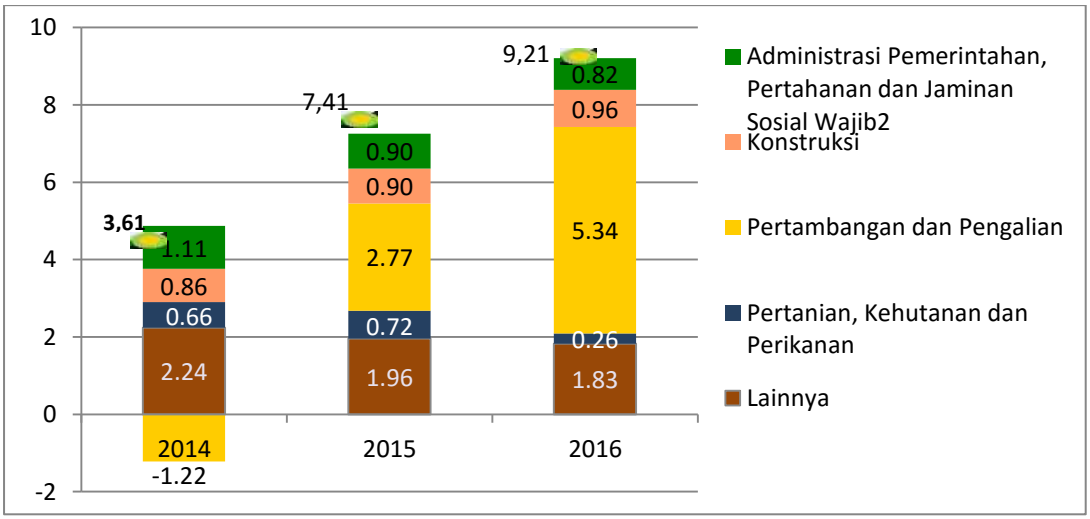

Sumber: BPS Prov. Papua 2016

Sasaran 15 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing

Secara keseluruhan aktivitas ekonomi Provinsi Papua menunjukkan trend baik, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, pengendalian inflasi dan kesenjangan atau indeks gini. Demikian pula daya saing daerah menunjukkan trend yang baik dapat dilihat dari kontribusi sektor industri dan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Pencapaian Kinerja untuk sasaran ini berada dalam kategori sangat baik, dari 6 (enam) indikator yang mengukur kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan dan daya saing daerah terdapat 4 indikator yang realisasi diatas target dan 2 indikator yang realisasi di bawah target.

Tabel 3.37 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 11

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	8	9,21	115,13
2	PDRB Perkapita	Juta	31	55,61	179,39
3	Inflasi	persen	5	4,13	121,07
4	Indeks Gini	persen	0,41	0,39	105,13
5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	persen	2,5	2,03	81,20
6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	persen	10	7,95	79,50
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**173,57**

Perekonomian Papua tahun 2016 tumbuh sebesar 9,21 persen atau dengan capaian kinerja 115,13 persen, Ini menunjukkan capaian **kinerja yang sangat baik** untuk tahun 2016. Kinerja ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Perekonomian Papua Tahun 2016 terjadi pada seluruh lapangan usaha, lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mendominasi perekonomian Papua tumbuh 13,15 persen, tumbuh lebih besar dibandingkan 2015 6,79 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua terjadi pada pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,86 persen dan yang ketiga adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,64 persen walaupun mengalami penurunan disbanding tahun 2015 yang tumbuh sebesar 10,89 persen.

Dilihat dari struktur perekonomian, di tahun 2016 lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih mendominasi ekonomi di Papua dengan sumbangan sebesar 35,50 persen. Lapangan Usaha lapangan Usaha Konstruksi berada pada posisi kedua dengan kontribusi sebesar 12,93 persen dan berada pada posisi ketiga Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan sumbangan sebesar 12,11 persen.

Grafik 3.19 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2016

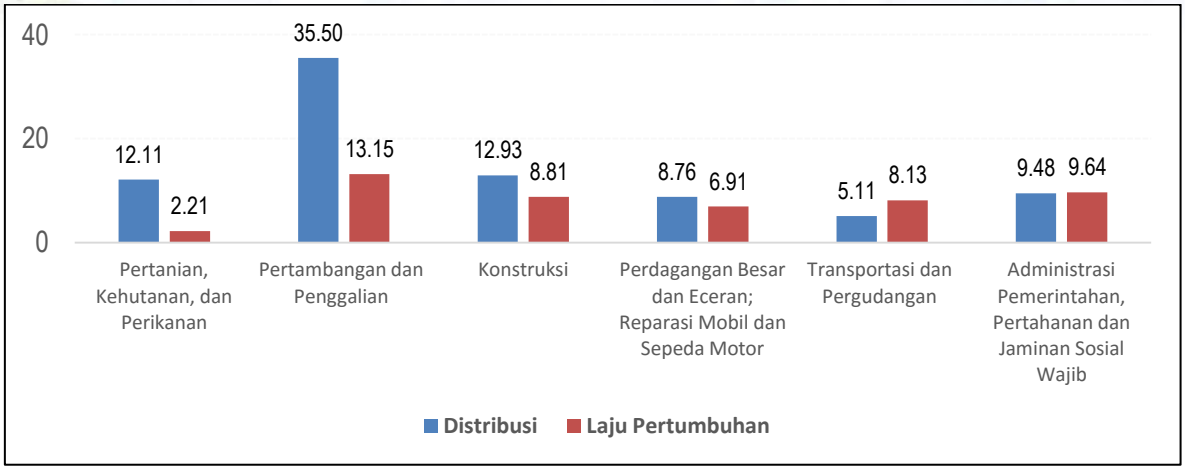

Sumber : BPS Papua, 2017

PDRB perkapita**,** peningkatan PDRB perkapita menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi yang diwakili antara lain oleh pendapatan tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri.Peningkatan PDRB perkapita juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan, peningkatan PDRB perkapita juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri. Peran dari pihak non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang menyumbang pada capaian peningkatan pendapatan.

PDRB Perkapita Provinsi Papua ditargetkan pada tahun 2016 RP 31 juta per kapita per tahun, realisasinya mencapai nilai pendapatan sebesar Rp 55,61 juta per kapita per tahun, atau sebanyak 179,39 persendari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja yang sangat baik** untuk tahun 2016. Selain itu, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, telah melebihi target akhir RPJMD untuk meningkatkan pendapatan sebanyak Rp 30 juta per kapita per tahun pada tahun 2018.

Tabel 3.38
PDRB Perkapita Papua Tahun Dasar 2010
Tahun 2010 – 2016*)

Tahun	PDRB Perkapita (ADHB)			
	Dengan Pertambangan dan Penggalian	Pertumbuhan	Tanpa Pertambangan dan Penggalian	Pertumbuhan
2010	38,785,113.29		17,891,045.15	
2011	37,111,147.92	-4.32	19,849,765.99	10.95
2012	37,935,005.38	2.22	22,261,057.70	12.15
2013	40,513,654.29	6.80	24,600,854.20	10.51
2014	43,134,245.84	6.47	28,228,680.92	14.75
2015 r)	48,010,001.43	11.30	32,451,059.34	14.96
2016*)	55,611,366.23	15.13	35,870,813.22	10.54

*Catatan : r)Angka Yang Diperbaiki *)Angka Sementara*

Walaupun sudah mencapai kinerja yang sangat baik, penting kita melihat dari bagaimana situasi pemerataan pendapatan tersebut pada masyarakat melalui **Indeks Gini atau koefisien Gini** merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin kecil nilai koefisien gini, mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan, sebaliknya semakin besar nilai koefisien Gini mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (senjang) antar kelompok penerima pendapatan. Secara ekstrim diartikan bahwa koefisien Gini sebesar 0 berarti terdapat kemerataan sempurna (setiap orang memperoleh pendapatan yang sama persis) dan Koefisien Gini sebesar 1 menunjukan ketidakmerataaan sempurna (di mana satu orang memiliki/menguasai seluruh pendapatan totalnya, sementara lainnya tidak memperoleh pendapatan sama sekali.
Perkembangan indeks gini Provinsi Papua selama 4 tahun dari tahun 2010-2013 menunjukkan trend yang semakin memperlihatkan ketimpangan yang semakin melebar di masyarakat. Namun periode tahun 2014-2016 Gini Rasio Papua cenderung mengalami perbaikan atau bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi dan program-program yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua telah berkontribusi terhadap kinerja pemerataan pembangunan yang ditunjukkan dari Indeks Gini. Tahun 2016 Indeks Gini mencapai 0,39 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,42.

Grafik 3.20 Perkembangan Gini Rasio Provinsi Papua

Tahun 2010-2016

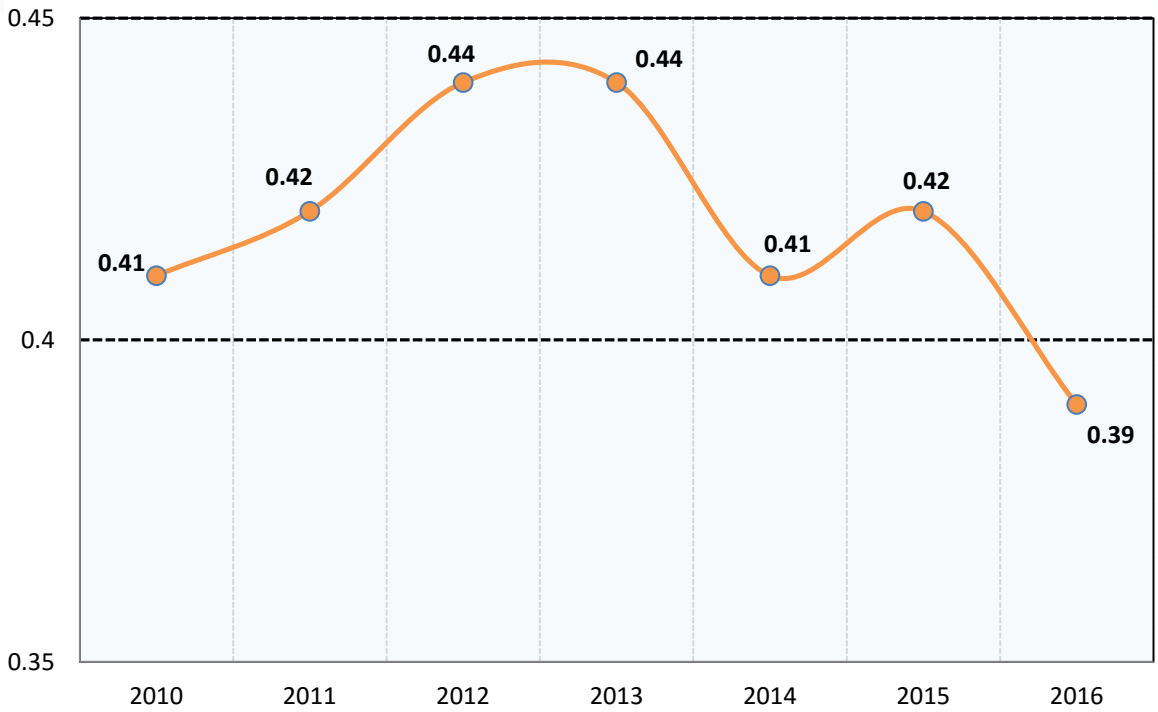

Sumber : BPS Provinsi Papua, diolah

Oleh karena itu perhatian akan pentingnya upaya pemerataan hasil pembangunan tetap akan menjadi prioritas di tahun 2017 dan 2018 dalam menurunkan indeks ketimpangan Provinsi Papua.

Inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Salah satu indikator yang mengukur kinerja pembangunan Provinsi Papua adalah Nilai Inflasi. Untuk tahun 2016 nilai inflasi ditargetkan 5 persen realisasinya mencapai 4,13 persen atau sebanyak 121,07persen dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja yang sangat baik** untuk tahun 2016. Namun mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,79 persen. Faktor adanya tekanan cukup tinggi inflasi di Papua adalah volative foods, seiring memasuki musim hujan pada komoditas tertentu serta curah hujan dan gelombang tinggi berdampak kenaikan harga ikan, gangguan penerbangan dan kapal sehingga berdampak pada kenaikan harga.

Grafik 3.21 Perkembangan Inflasi Provinsi Tahun 2010-2016

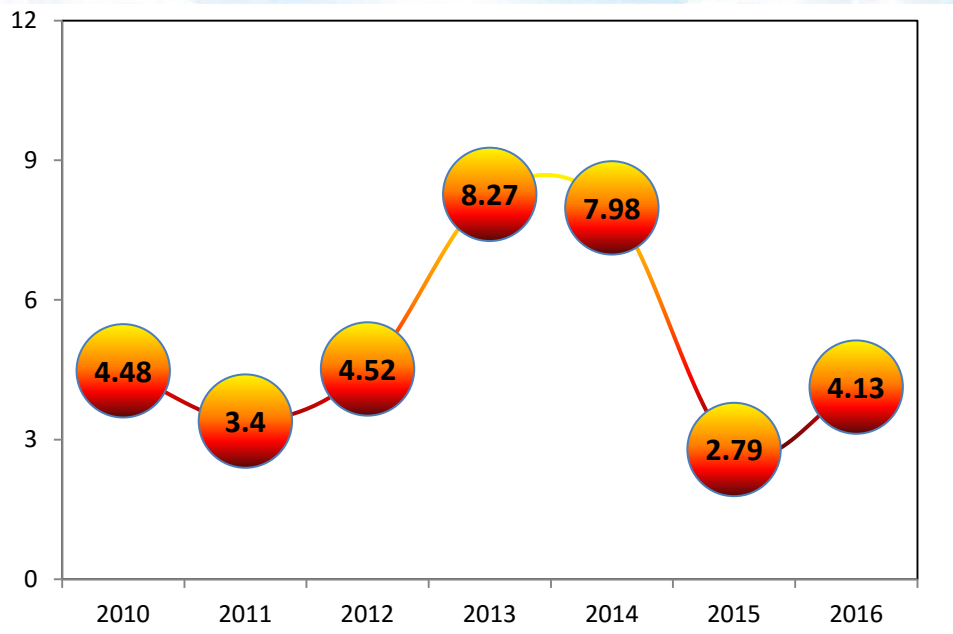

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017

Kontribusi **sektor industri pengolahan terhadap PDRB.** Salah satu untuk mengukur daya saing suatu daerah yaitu meningkat dan bertumbuhnya Industri Pengolahan. Untuk tahun 2016 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ditargetkan 2,5 persen, realisasinya mencapai 2,03 persen atau sebanyak 81,20 persen dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja yang baik** untuk tahun 2016. Selama empat tahun terakhir kontribusi sektor Industri pengolahan tidak mengalami perkembangan secara signifikan malah cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Apabila dilihat dari pertumbuhan industri pengolahan selalu berada pada nilai yang positif. Meskipun pertumbuhannya tidak mencapai dua digit. Pertumbuhan paling lambat pada industri besar sedang terjadi pada tahun 2013 (2,13 persen) tapi kemudian meningkat 8,72 persen di tahun 2014 dan mencapai 4,51 persen di tahun 2016.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Program Gerbangmas dan Prospek (Program Strategis Pengembangan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung) memfokuskan pada pengembangan komoditas unggulan dengan memperpanjang rantai nilai melalui mengintegrasikan Tanam, Petik, Olah dan Jual. Program prioritas ini merupakan bentuk keseriusan Provinsi Papua dalam mendorong pengembangan industry pengolahan di Papua.

Grafik 3.22 Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2013-2016

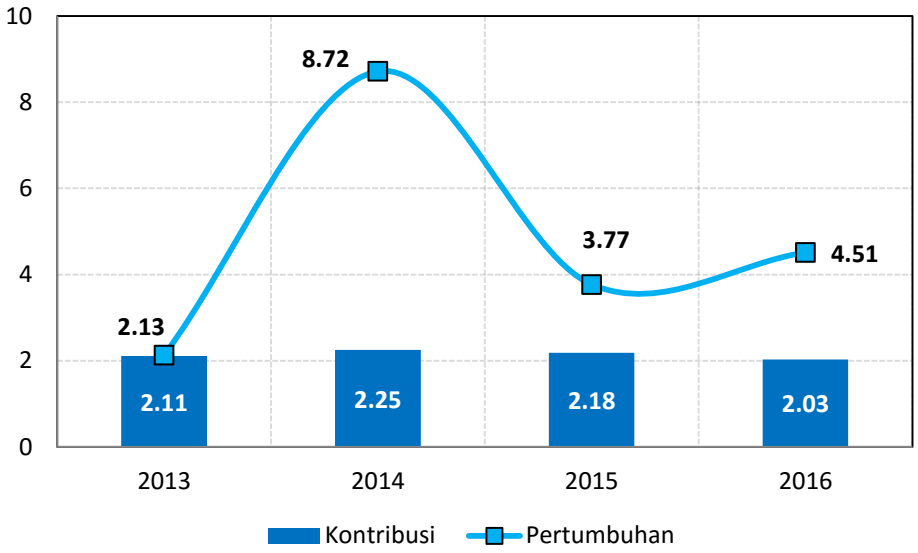

Pendapatan Asli Daerah, merupakan hakekat dari adanya Otonomi Daerah dan merupakan alat ukur bagi kemampuan dan kemandirian setiap daerah. Perkembangan pendapatan daerah terus mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya perekonomian Papua. Di tahun 2012 realisasi PAD sebesar Rp. 623,26 Milyar, selanjutnya mengalami peningkatan ditahun 2013 sebesar Rp.633,72 Milyar atau meningkat 13,35 persen. Untuk tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp. 905,39 Milyar. Untuk tahun 2015 penerimaan PAD sebesar Rp. 912,91 Milyar dan tahun 2016 penerimaan PAD mencapai Rp. 982,05 atau sebesar 7,95 persen dari keseluruhan Pendapatan daerah Provinsi Papua tahun 2016. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016 ditargetkan sebesar 10 persen, realisasinya mencapai 7,95 persen atau sebanyak 79,50 persen dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja yang baik** untuk tahun 2016.

Grafik 3.23 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2011-2016

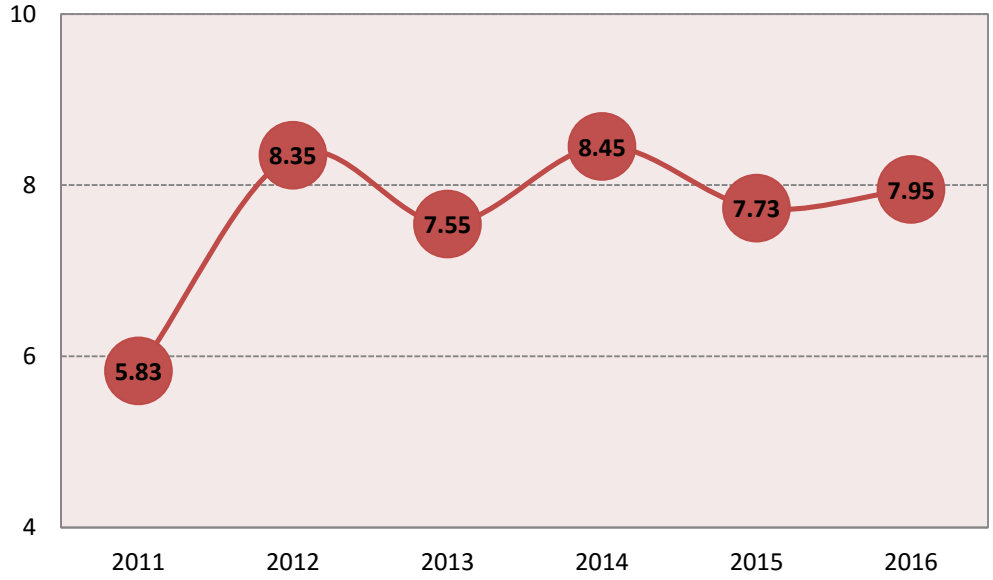

Grafik 3.24 Perkembangan PAD Provinsi Papua Tahun 2011-2016

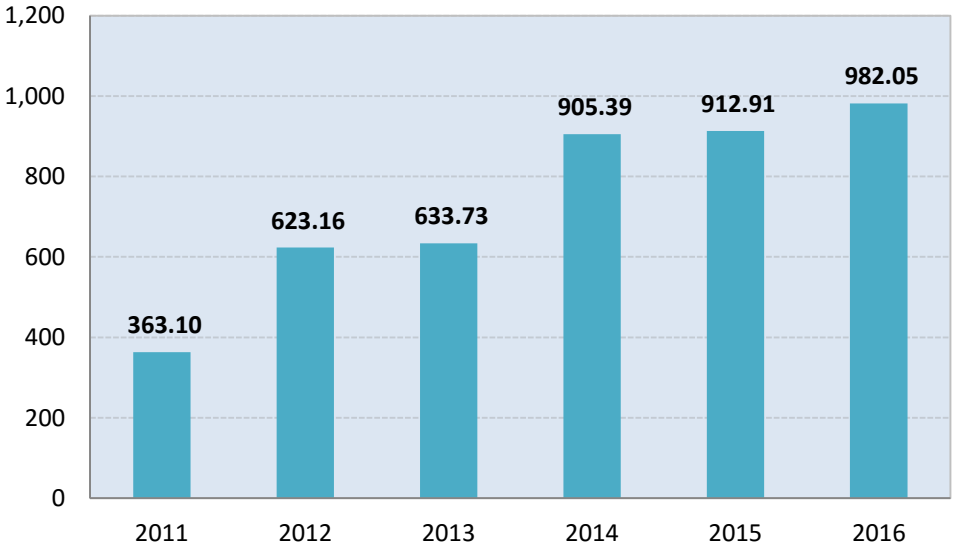

PAD di tahun 2016, terbesar disumbangkan dari pajak daerah sebesar 69,38 persen dari total PAD, selanjutnya penyumbang kedua adalah lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah dengan kontribusi 23,50persen, terbesar ketiga disumbangkan Retribusi daerah dengan kontribusi 5,38persen dan terakhir dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Kontribusi masing-masing dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.25 Pendapatan Asli Daerah

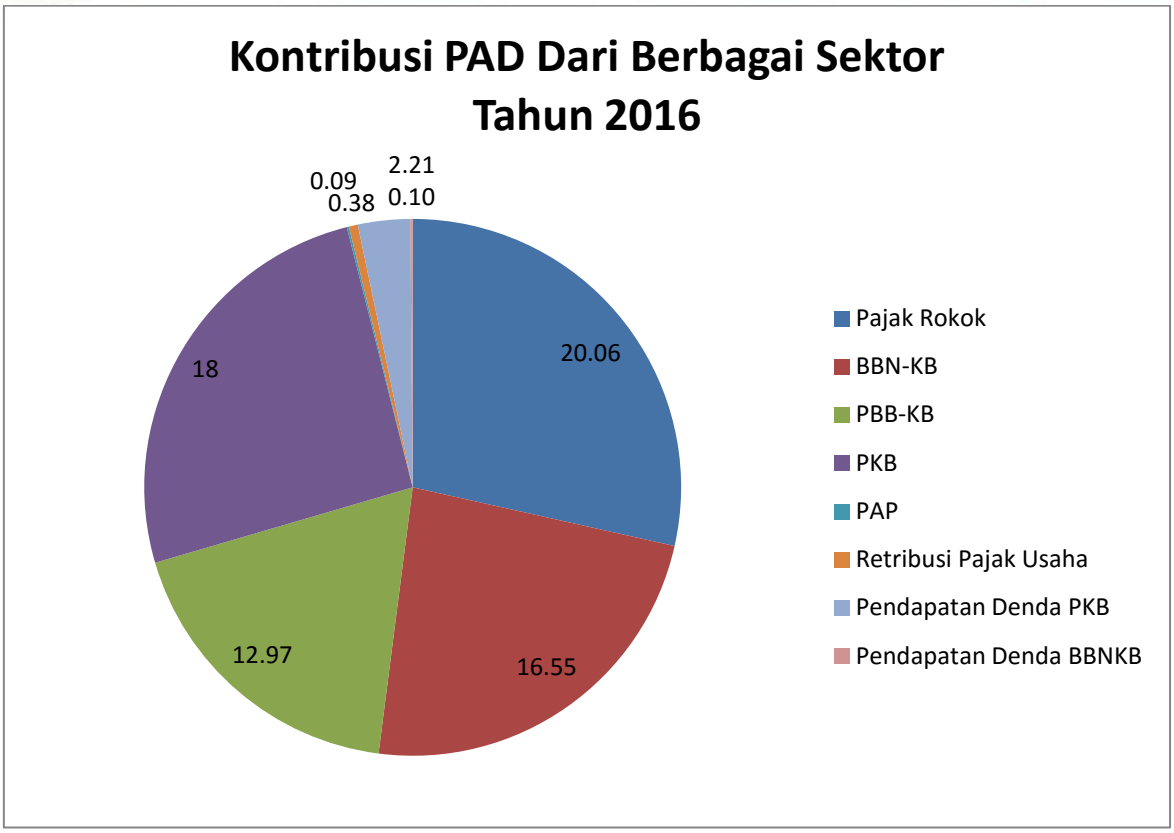

Sumber : BPKAD Provinsi Papua tahun 2017

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Papua sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat menggambarkan dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga telah dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang serta didukung oleh pengendalian Inflasi Daerah. Pertumbuhan ini pula telah berdampak dan berkontribusi pada pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Sasaran 16 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya konektivitas antar wilayah"** adalah 78,12 persen atau dalam skala ordinal adalah **"Berhasil".** Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.39 Indikator Kinerja Sasaran 16

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	persen	30,00	21,08	70,27
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	50,00	25,45	50,90
3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:110	1:106	103,77
4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	4 juta	3.501.758	87,54
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**78,12**

Indikator kinerja Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dengan target 30,00 persen terealisasi 21,08 persen atau tingkat capaian indikator sebesar 70,27 persen. Data dari Dinas Pekerjaan Umum tahun 2015 total panjang jalan provinsi adalah 4.748.31 km dan panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap adalah 1.306,31 km.

Jalan sebagai salah satu infrastruktur penting yang menghubungkan wilayah satu dengan lainnya di Provinsi Papua memerlukan pemeliharaan yang terus menerus serta peningkatan jalan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi baik sehingga aman dalam penggunaannya. Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi teknis pengelola infrastruktur telah melaksanakan pemeliharaan jalan yang ada di seluruh wilayah Provinsi Papua. Perkembangan jalan selama beberapa tahun dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.40

No	Uraian	Tahun (km)			
		s/d 2012	2013	2014	2015
1	Panjang Jalan kondisi Mantap	841,7	923,15	1149,56	1306,31

Capaian indikator Persentase jembatan dalam kondisi baik adalah 90,13 persen dengan target sebesar 50,00 persen terealisasi sebesar 45,15 persen dari panjang jembatan yang kondisi mantap sebesar 5.192,17 Meq dari total panjang 11.500 MEq. Selain jalan, jembatan juga merupakan infrastruktur penting dalam menghubungkan wilayah satu dengan lainnya sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah.

Pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada 29 jembatan di seluruh wilayah Provinsi Papua. Perkembangan pembangunandan pemeliharaan jembatan sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.41

No	Uraian	Tahun (MEq)			
		s/d 2012	2013	2014	2015
1	Jembatan kondisi mantap	2.834,00	3.263,79	3.783,82	5.192,17

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan jalan maupun jembatan di Provinsi Papua adalah distribusi bahan ke lokasi pemeliharaan jalan dan jembatan yang masih membutuhkan biaya sangat tingginya serta harga pembebasan lahan dan ganti rugi lahan yang diminta oleh masyarakat sangat tinggi pula.

Indikator Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari target yang ditetapkan sebesar 1:18 terealisasi 1:91 atau dengan capaian 505,56 persen dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Nilai capaian tersebut diperoleh karena adanya peningkatan jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Papua dari tahun 2013 sebanyak 52.183 menjadi 432.126 kendaraan pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat sebanyak 24.251

kendaraan sehingga total kendaraan sebanyak 456.377 unit dengan perbandingan 1:96 dari target 1 :100. Maka capaian kinerjanya pada tahun 2015 adalah 96 persen. Sementara itu panjang jalan yang ada masih berada pada angka 4.748.31 Km sehingga dapat dikatakan kondisi lalu lintas jalan semakin padat. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.42

No	Uraian	Tahun (Unit/km)		
		2013	2014	2015
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1 : 18	1:91	1:96

Pada indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun dari tahun 2013 sampai 2015 disajikan dalam tabel:

Tabel 3.43

No	Uraian	Tahun (orang)		
		2013	2014	2015
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	3.472.236	3.759.034	3.880.282

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peningkatan arus penumpang setiap tahunnya. Khususnya untuk tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 102,11 persen dari target yang ditentukan. Capaian ini menunjukkan bahwa arus penumpang yang datang maupun yang meninggalkan Papua semakin banyak. Hal ini dapat menjadi indkator meningkatnya konektivitas antara wilayah dari Papua ke luar wilayah Papua dan sebaliknya, juga semakin terbukanya konektivitas antar wilayah di dalam Provinsi Papua. Dengan semakin terbukanya konektivitas antar wilayah diharapkan akan meningkatkan akses pembangunan di Provinsi Papua sehingga dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sasaran 17 : Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah"** sebesar 582,52 persen dengan predikat **"sangat berhasil"**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.44 Indikator Kinerja Sasaran 17

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	persen	65,00	67,33	103,58
2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	persen	60,00	88,19	146,98
3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	persen	15,00	28,50	190,00
4	Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	persen	2,00	37,79	1889,50
Rata-rata Capaian Kinerja					**582,52**

Pemerintah Provinsi Papua sangat konsentrasi terhadap ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah Republik Indonesia untuk swasembada pangan. Sehingga untuk meningkatkan hal tersebut berusaha meningkatkan pelayanan irigasi untuk mengaliri sawah. Lahan pertanian didaerah Provinsi Papua sampai saat ini seluas **63.773 ha^2**, sedangkan yang dapat dialiri oleh saluran irigasi seluas **40.149 ha^2**. Pemerintah Provinsi Papua **menargetkan** saluran irigasi sebesar 65,00 persen dengan **realisasi** jaringan irigasi diwilayah provinsi Papua sebesar 67,33 persen dengan **capaian kinerja** 103,58 persen dengan kategori **sangat berhasil.** Hal ini dipengaruhi adanya perhatian Pemerintah Provinsi Papua untuk menjadi Papua sebagai salah satu Lumbung Pangan Nasional, hal ini terlihat dari luas lahan budidaya yang

mendapat layanan irigasi dimana terjadi peningkatan yaitu 2015 terdapat saluran irigasi seluas 38.040 ha^2 sedangkan 2016 menjadi 40.149 ha^2 terjadi penambahan saluran seluas 2.109 ha^2 .

Berikut luas lahan budi daya pertanian (baku sawah) di Provinsi Papua yang mendapat layanan Irigasi di tahun 2016 yaitu :

Tabel 3.45

No	Nama Kabupaten/Kota	Luas Sawah (ha^2)
1	Kab.Jayapura	1.863
2	Kota.Jayapura	740
3	Mimika	795
4	Keerom	1.900
5	Waropen	550
6	Nabire	3.164
7	Merauke	30.357
8	Sarmi	276
9	Jayawijaya	304
10	Mappi	200
Jumlah saluran Irigasi		**40.149 ha^2**

Sumber data : Dinas Pertanian Provinsi Papua Tahun 2016.

Jaringan irigasi yang kondisinya baik sebesar 58,78 persen dari target 60,00 persen sehingga capaianya sangat berhasil yaitu sebesar 97,97 persen. Pengambilan target ini sebesar 60,00 persen karena lahan pertanian yang paling banyak di Kabupaten Merauke, hampir 80,00 persen dari total lahan persawahan di Provinsi Papua. Di daerah Kabupaten Merauke sangat mudah terjadi sedimentasi karena dinding saluaran yang berada disana adalah tanah merah, sehingga bila terjadi hujan maka saluran irigasi tersebut menjadi rusak. Di daerah Kabupaten Merauke tidak ada batu bahkan kerikil sehingga bila dibuat talud akan sangat mahal biayanya karena materialnya didatangkan dari daerah Sulawesi atau daerah Maluku.

Ketersediaan air baku untuk irigasi masih sangat rendah dari total kebutuhan air baku irigasi seluas 38.040 ha, yang sudah terpenuhi 30.296,25 ha sedangkan yang belum tersedia air bakunya seluas 7.743,75 ha. Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua telah mengusahakan penggunaan air baku untuk seluas 525 ha dari total air baku seluas 7.743,75 ha. Dengan demikian realisasinya adalah sebesar 28,50 persen dari target 15,00 persen.

Realisasi cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi adalah 37,79 persen dari target 2,00 persen sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 1889,50 persen.

Luasan daerah yang berpotensi banjir dan abrasi adalah 150,00 km^2, sedangkan yang sudah ditangani 56,68 km^2. Daerah-daerah di Provinsi Papua yang berpotensi banjir cukup banyak dan sungai-sungai serta pesisir pantai sangat panjang dan luas sehingga potensi terjadinya abrasi sangat tinggi.

Sasaran 18 : Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi"** adalah 131,28 persen atau dalam skala ordinal adalah **"Sangat Berhasil."** Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator sasaran.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.46 Indikator Kinerja Sasaran 18

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Jumlah Rumah Layak Huni yang di butuhkan	persen	40,00	52,51	131,28 persen
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**131,28 persen**

Indikator **Rumah Layak Huni** yang dibutuhkan dengan Target 40,00 persen, realisasi 52,51 persen dengan capaian kinerja 131,28 persen dengan kategori berhasil. Kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Papua adalah sebesar 13.000. Realisasi sebesar 52,51 persen atau melampaui target menjadi 13.560 dan dimana ada beberapa instansi yang mengerjakan pembangunan Rumah Layak Huni, berdasarkan data yang dihimpun oleh BAPPEDA yaitu Pembangunan Rumah Layak Huni dibangun oleh :

1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Kementerian Pekerjaan Umum
3. Kementerian Sosial
4. Dinas Sosial dan Pemukiman
5. Dinas Pekerjaan Umum
6. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukkan
7. Perbatasan

Total rumah layak huni yang sudah dibangun dari data Bappeda Provinsi Papua 12.690 unit dan Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua 870 unit sehingga total menjadi 13.560 Unit.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni"** sebesar 131.28 persen dengan predikat **"Sangat Berhasil".** Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu indikator Jumlah Rumah Layak Huni. Capaian kinerja sasaran ini bila dibandingkan dengan RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018 dari 13.000 telah melebihi target sebanyak 13.560 berhasil.

Pada tahun 2016 kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Papua saat ini masih sangat besar yaitu 25.825 unit rumah yang tersebar di sejumlah Kabupaten dan Kota. Adapun Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten / Kota melakukan program pemenuhan kebutuhan tersebut. Pemerintah Provinsi Papua selama 5 (lima) tahun dari tahun 2013 - 2018 menargetkan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut sebanyak 13.000. Sampai tahun 2015 Pemerintah Provinsi Papua baru dapat menyelesaikan sebanyak 650 unit rumah yang sudah terbangun ada 2 SKPD yang menangani yaitu Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua jumlah rumah yang dibangun sebanyak 170 unit diantaranya Kabupaten Jayapura di Distrik Sentani 10 unit dan Yapsi 40 unit, Kabupaten Merauke di Distrik Tubang 50 unit, Kabupaten Lanny Jaya di Distrik Tiom Neri 30 unit, Kabupaten Mappi sebanyak 30 unit dan Kota Jayapura di Distrik Jayapura Utara 10 unit. Sedangkan 480 unit rumah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tahun 2015 membangun rumah layak huni28 Kabupaten dan 1 Kota, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.47

NO.	LOKASI	JUMLAH UNIT			
		2013	2014	2015	Jumlah Total
1	Kota Jayapura	24	15	13	52
2	Kabupaten Jayapura		54	19	73
3	Kabupaten Keerom		3	10	13
4	Kabupaten Sarmi		4	4	8
5	Kabupaten Mamberamo Raya		10	8	18
6	Kabupaten Mamberamo Tengah		14	11	25
7	Kabupaten Merauke		53	6	59
8	Kabupaten Mappi		6	36	42
9	Kabupaten Asmat		8	7	15
10	Kabupaten Boven Digoel		4	4	8
11	Kabupaten Biak Numfor		6	8	14
12	Kabupaten Supiori		4	4	8
13	Kabupaten Kep. Yapen		4	5	9
14	Kabupaten Waropen		6	5	11
15	Kabupaten Nabire		4	12	16
16	Kabupaten Paniai		6	5	11
17	Kabupaten Dogiyai		6	6	12
18	Kabupaten Deiyai		6	6	12
19	Kabupaten Intan Jaya		6	5	11
20	Kabupaten Nduga		6	6	12
21	Kabupaten Jayawijaya		9	11	20
22	Kabupaten Tolikara		14	10	24
23	Kabupaten Pegunungan Bintang		11	9	20
24	Kabupaten Puncak		14	8	22
25	Kabupaten Puncak Jaya		12	7	19
26	Kabupaten Yahukimo		15	11	26
27	Kabupaten Lanny Jaya		44	11	55
28	Kabupaten Yalimo		18	8	26
29	Kabupaten Mimika		3	6	9
	Jumlah	**24**	**365**	**261**	**650**

Sasaran 19 : Meningkatnya pemenuhan air bersih

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **"meningkatnya pemenuhan air bersih** adalah 79,67 persen atau dalam skala ordinal adalah **"Berhasil"** Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator sasaran.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.48 Indikator Kinerja Sasaran 19

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase RT yang terlayani air bersih	persen	55,00	43,82	79,67persen
Rata-rata Capaian Kinerja					**79,67persen**

Realisasi Rumah Tangga (RT) yang terlayani air bersih adalah 43,82 persen dari target 55,00 persen, dengan demikian capaian kinerja adalah 79,67 persen, dengan kategori **"Berhasil"**. Indikator sasaran terhadap persentase RT yang terlayani air bersih sampai saat ini baru tercapai sebesar 281.229 RT/KK dari jumlah RT/KK yang membutuhkan sebanyak 641.791.

Tabel 3.49

No	Uraian	Tahun (KK)			
		2013	2014	2015	2016
1	Persentase RT yang terlayani air bersih	195.874	220.432	257.587	281.229

Sasaran 20 : Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan"** sebesar 127.43 persen dengan predikat **"Sangat Berhasil".** Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran.Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.50 Indikator Kinerja Sasaran 20

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rumah Tangga pengguna listrik	persen	40,00	50,97	127,43
Rata-rata Capaian Kinerja					**127.43**

Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Papua hingga tahun 2016 berjumlah 409.163 pelanggan berlistrik, kondisi ini menunjukkan mengalami kenaikan mencapai 35.64 persen Peningkatan capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat dengan adanya kenaikan jumlah pelanggan listrik yaitu pada tahun 2014 jumlah pelanggan listrik sebesar 289.536 rumah tangga/KK, tahun 2015 mengalami kenaikan pelanggan listrik sebanyak 308.579 rumah tangga/KK dan pada tahun 2016 terus mengalami kenaikan pelanggan listrik sebanyak 409.163 yang tercatat sebagai pelanggan. Selain itu, peningkatan jumlah pelanggan listrik tersebut dapat ditunjukan dengan adanya penurunan jumlah pelanggan rumah tangga yang belum mendapatkan layanan listrik sekitar 501.105 rumah tangga/KK menjadi 393.597 rumah tangga/KK yang belum mendapatkan layanan listrik. Tahun 2016 secara keseluruhan jumlah rumah tangga/KK yang membutuhkan layanan listrik di Papua sebanyak 802.760.

Sasaran 21 : Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya

Papua adalah daerah yang unik dari segi keberagaman ekosistem. Papua juga kaya dengan dinamika hubungan antara masyarakat dan alamnya. Hal tersebut membuat alam Papua – tanah dan hutan, menjadi identitas budaya asli masyarakat Papua. Dimana hubungan manusia dan alamnya sangat erat, bahkan sebagian besar masyarakat asli Papua masih sangat bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 84,00 persen kampung juga masih terdapat di kawasan hutan, hal ini menggambarkan hubungan yang erat antara masyarakat dengan alam di sekitarnya. Arah pembangunan saat ini dan kecenderungannya di masa yang akan datang, ternyata mengarah pada jalur yang akan memisahkan masyarakat Papua dengan alamnya, kemudian melikuidasi alamnya untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Kesadaran ini diperoleh lewat penelaahan dan pemahaman terhadap struktur-struktur yang telah membuat berbagai peristiwa dan kondisi saat ini, serta kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Proses perencanaan tak lagi berfokus pada apa yang diinginkan untuk terjadi di masa yang akan datang, tapi juga mulai menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah dampak atau konsekuensi yang tak diinginkan (*unintended consequences*) di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dapat mengendalikan penggunaan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dalam rangka menjaga ruang hidup masyarakat Papua.

Berdasarkan hal tersebut, secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten"** tercapai sebesar sebesar 100 persen dengan predikat **"Sangat Berhasil"**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1(satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.51 Indikator Kinerja Sasaran 21

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	%	100	100	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					**100,00**

Dalam RTRW Provinsi Papua telah ditetapkan kawasan-kawasan yang biasa disebut Pola Ruang yang mengarahkan peruntukan atau penggunaannya dasar inilah menjadi alat dalam melakukan pengendalian Ruang Daerah, sehingga calon Investor sebelum mengurus ijin penggunaan lahan dapat melihat lahan yang ingin digunakan berdasarkan arah pola ruang Papua.

Gambar 3.1

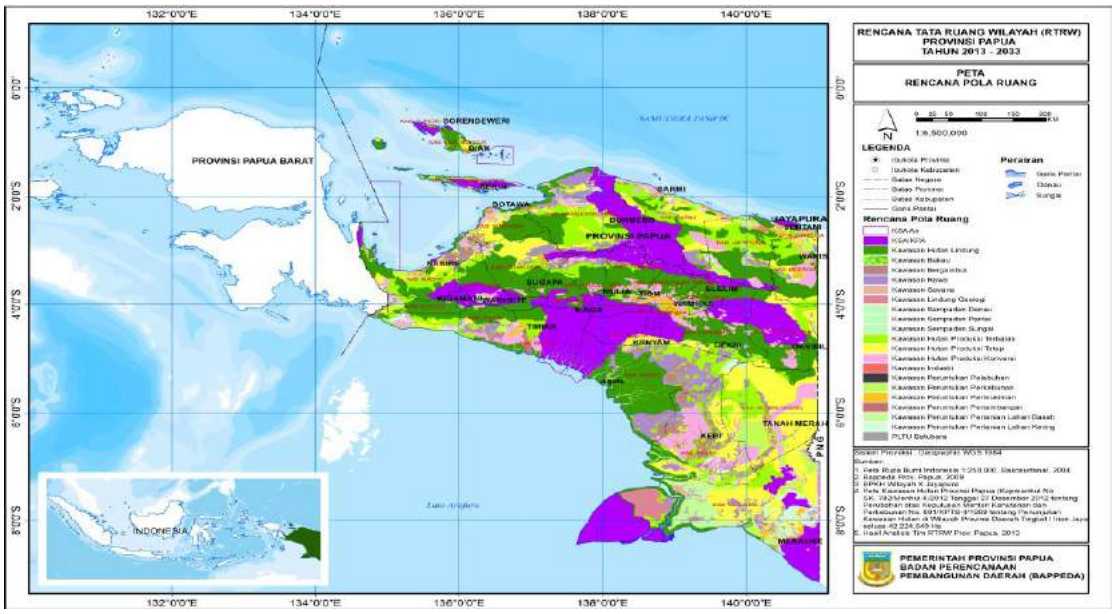

Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan Instrumen yang mendukung Pelaksanaan RTRW Papua, yaitu membangun sistem tata ruang (SIMTARU), sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 3.2

Tabel 3.52 Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Tahun 2016

Lokasi	Luas (Ha)	Bidang Usaha
Kab. Jayapura	13.389,60	Ijin Usaha Perkebunan
Kab. Jayapura	29.278	Ijin Usaha Perkebunan
Kab. Keerom	8.100	Ijin Usaha Perkebunan
Kab. Boven Digoel	15.214	Perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya
Kab. Boven Digoel	14.672	Perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya
Jumlah	**80.653,60**	

Sumber : BPTPM Provinsi Papua tahun 2016

Sasaran 22 : Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **"Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia"** mencapai 91.29 persen dengan predikat **"Berhasil"**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini, diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu :

Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.53 Indikator Kinerja Sasaran 22

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	persen	85,00	82,64	97,22
2	Kerusakan Kawasan Hutan	persen	2,00	2,20	90,91
3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	persen	30,00	25,72	85.73
Rata-rata Capaian Kinerja					**91,29**

Capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia** pada tahun 2016 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2015 yaitu 7.09 persen. Dimana pada tahun 2015 capaian kinerja sasaran hanya 84,19 persen bila dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 91,29 persen. Capaian kinerja sasaran ini dipengaruhi oleh tiga (3) indikator yang terdiri dari :

1. Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik tercapai 82,64 persen yang terdiri dari luas kawasan hutan mangrove yang kondisi baik 832.861 ha dan total luas area kawasan hutan mangrove 1.007.817 ha, bila dibandingkan dengan tahun 2015 maka tidak ada perubahan capaian kinerja yaitu 97,22 persen.
2. Kerusakan Kawasan Hutan mencapai 2,20 persen dari target 2,00 persen yang terdiri dari luas kerusakan kawasan hutan lindung 17.956 Ha dan luas kawasan hutan lindung 7.815.283 Ha, bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan capaian kinerja dari 66,67 persen menjadi 90,90 persen di tahun 2016.

Peningkatan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1) Pengembangan perbenihan tanaman hutan seluas 4 Ha, yang lokasinya tersebar di beberapa wilayah kabupaten, diantaranya di Kabupaten Keerom seluas 5 Ha, dengan jenis benih yang dikembangkan adalah sengon, Kabupaten Merauke seluas 4 Ha, dengan jenis benih acacia mangium dan acacia crassicarpa, di Kota Jayapura seluas 5 Ha.
2) Pengembangan Persemaian Tanaman Hutan yang dilakukan dalam beberapa lokasi/wilayah yaitu di Tanjung Bahari, Biak dengan eksplorasi bibit jenis manilkara sp, di Nimbugresi Kabupaten Jayapura dengan eksplorasi jenis bibit matoa, buah merah dan kombow, jumlah benih tanaman hutan yang siap tanam sebanyak 120.000 bibit.
3) Kampanye Papua Menanam, dengan bekerja sama dengan lembaga keagamaan maka telah dilakukan penanaman dan pemeliharaan pohon seluas 30 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Jayawijaya, Mimika, Dekai, Merauke, Mappi dan Kabupaten Nabire.
4) Pembinaan Kawasan Cagar Alam Cycloop, yaitu penanaman buah merah dan tanaman endemik seluas 9 Ha.
5) Pengelolaan Kawasan Lindung Danau Tigi, Tage dan Enarotali yaitu penanaman lanjutan seluas 4 Ha dari target 5 Ha, tidak tercapainya target seluas 5 Ha tersebut adalah terkendala dengan waktu pelaksanaan dan keterbatasan anggaran, dimana kegiatan tersebut dibiayai dari APBD Perubahan.
6) Pengembangan Kawasan Hutan Manggrove, yaitu pemeliharaan dan penanaman Manggrove di Kampung Tobati, Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke seluas 4 Ha, yang sejatinya direncanakan hanya 3 Ha.
7) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

   Tingginya kerusakan hutan yg mencapai 2,20 persen, terjadi akibat ekspansi industri yang berbasis lahan seperti penebangan hutan, perkebunan, hutan tanaman dan pertambangan serta pemekaran wilayah administrasi pemerintahan;

3. Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan hanya tercapai 25,72 persen terdiri dari luas area hutan lindung 7.815.283 ha dan total luas area kawasan hutan 30.387.499 ha, bila dibandingkan dengan tahun 2015 juga tidak terjadi perubahan capaian kinerja yaitu sebesar 88,70.

Hutan di Papua mencapai 30.387.499 ha, terdiri atas hutan lindung 7.815.283 ha , hutan produksi tetap 4.739.327 ha , hutan produksi terbatas 5.998.424 ha , dan hutan yang dapat dikonversi 4.116.365 ha. Ditambah areal penggunaan lainnya 1.712.591 ha . Hasil hutan di Provinsi Papua ini cukup besar manfaatnya yaitu hasil hutan non hph dan hasil hutan bukan kayu. Untuk hasil hutan non hph sebesar 39.569.055,99 M^3 yang terdiri dari kayu bulat sebesar 31.208,08 M^3 dan kayu olahan sebesar 39.537.847,91 M^3 sedangkan hasil hutan bukan kayu sebesar 81.106 M^3 yang terdiri dari kulit masohi sebesar 80.556 M^3 dan kulit gambir sebesar 550 M^3. Selama ini manfaat yang dapat diperoleh dari sumber daya hutan telah menempatkan hutan dalam peranan yang cukup besar dalam perolehan devisa, perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pembukaan isolasi daerah, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan rakyat di Papua tetapi juga masyarakat dunia internasional yaitu menempatkan hutan tropis sebagai paru-paru dunia, sumber bahan baku kayu serta sebagai sumber plasma nutfah dunia.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.54 Akuntabiltas Keuangan

SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		RENCANA	REALISASI	PERSEN	
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatnya rasa aman, tent ram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	99.558.660.400,00	83.968.371.130,00	84,34	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda
					Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
					Program Pengawasan Produk Hukum
					Program Dokumentasi dan Informasi Hukum
					Perampungan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kerjasama Dengan Universitas Samratulangi
					Program Dokumentasi dan Informasi Hukum
					Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
					Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
					Pembahasan Ranperda mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur, APBD 2015, Perubahan APBD 2016 dan Penyusunan APBD Tahun 2017
					Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
					Pembahasan Peraturan Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah serta Kebijakan Daerah Lainnya
					Program Pengelolaan Potensi dan Penataan Tata Ruang
					Program Pengelolaan Potensi dan Penataan Tata Ruang
					Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP
					Penyusunan PERGUB Tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Distrik di Provinsi Papua
					Penyusunan PERGUB Tentang Klasifikasi Pelimpahan Kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Distrik

SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		RENCANA	REALISASI	PERSEN	
1		*2*	*3*	*4*	*5*
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	65.320.215.154,00	61.342.418.736,00	93,91	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
					Program Data/Informasi
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
					Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
					Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
					Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua)
					Program perencanaan pembangunan daerah (Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah)
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
					Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
					Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
					Sosialisasi Pakaian Dinas PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	579.650.000,00	557.555.000,00	96,19	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
					Bimtek Standar Operasional Prosedur (SOP)
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	16.751.090.000,00	14.235.380.714,00	84,98	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
					Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
					Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
					Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		RENCANA	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
5	Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	66.726.148.300,00	51.576.541.738,00	77,30	Pembinaan Program Kesejahteraan, Sosial, Kependudukan, Pendidikan dan Kesehatan
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
					Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial
					Rencana Induk Pembangunan SDM Asli Papua Provinsi Papua
					Strategi Pengembangan SDM Lanjutan Asli Papua Provinsi Papua
					Pemetaan Kebutuhan SDM Papua Berbasis Potensi Unggulan Daerah di Provinsi Papua
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Papua
					Program perencanaan pembangunan daerah
					Program pengembangan data dan informasi
					Program Penyediaan Fasilitas Mahasiswa Daerah
					Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua)
					Program pembangunan infrastruktur perdesaan
					Fasilitasi Pelatihan manajemen Pemasaran dan Keterampilan Daya Saing Bagi Pengrajin Perempuan Asli Papua
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	484.771.555.531,00	396.328.990.895,72	81,76	Program Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat
					Pengadaan Obat dan Perbekalan Pelayanan Kesehatan Jiwa
					Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita
					Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan

SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		RENCANA	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat
					Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
					Program Sumberdaya Kesehatan
					Program Pengembangan Obat Asli Daerah
					Program Upaya Kesehatan Perorangan
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat
					Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium
					Program Pengawasan Obat dan Makanan
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
					Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (KEWAJIBAN)
					Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
					Program peningkatan kesehatan perorangan
					Program peningkatan kesehatan perorangan (KEWAJIAN)
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat
					Program Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		RENCANA	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
					Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
					Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
					Program peningkatan kesehatan perorangan
					Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
					Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat
					Program perencanaan sosial dan budaya (Perencanaan Dan Penganggaran Berbasi Bukti (PBB) Sektor Kesehatan Ibu Dan Anak)
					Program perencanaan sosial dan budaya (Pembinaan Program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Provinsi Papua)
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	100.845.181.500,00	92.185.174.751,00	91,41	Program Pendidikan Anak Usia Dini
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
					Program Pendidikan Menengah
					Program Pendidikan Menengan SMK
					Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
					Program Pendidikan Tinggi
					Program Pendidikan Non Formal
					Program Pendidikan Luar Biasa
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
					Program Pendidikan Layanan Khusus
8	Meningkatnya prestasi olahraga	389.521.805.000,00	336.055.571.080,00	86,27	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
					Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
					Evaluasi Kebijakan Presiden Terhadap Dukungan Anggaran PON 20 Tahun 2020
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
					Evaluasi Kebijakan Presiden Terhadap Dukungan Anggaran PON 20 Tahun 2020

SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		RENCANA	REALISASI	persen	
1		*2*	*3*	*4*	*5*
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	3.184.850.000,00	3.169.000.000,00	99,50	Program peningkatan peran serta kepemudaan
					Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
					Penyuluhan nilai-nilai budaya bagi masyarakat adat, remaja dan pemuda di papua
					Program peningkatan peran serta kepemudaan
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	8.392.723.000,00	3.979.038.697,00	47,41	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
					Program Peningkatan daya saing Investasi
					Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	24.304.729.100,00	19.798.063.253,00	81,46	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
					Program pengembangan data/informasi
					Program pengembangan industri kecil dan menengah
					Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
					Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
					Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
					Program Sistim Logistik dan Distribusi Bapokstra
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	26.093.096.500,00	24.682.723.734,00	94,59	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja
					Program Pengawasan Ketenagakerjaan
					Program Pembinaan Kependudukan
					Program Peningkatan Kinerja Organisai
					Program Pengembangan Produktivitas Kerja
					Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
					Program Pengembangan Kemitraan
					Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kampung, Kelurahan dan Kawasan Miskin Perkotaan
					Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Air Tawar (Mujair,Lele dan Gurame)

SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		RENCANA	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
					Pelatihan Pengembangan Produk Kerajinan dan Olahan Hasil Pangan Bagi Kelompok Usaha Rumah Tangga
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perkonomian daerah	11.757.260.000,00	11.207.333.000,00	95,32	Program pengembangan pemasaran pariwisata
					Program pengembangan destinasi pariwisata
					Program pengembangan Kemitraan
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	214.447.705.205,00	202.202.896.437,00	94,29	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
					Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
					Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
					Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian
					Program perencanaan pembangunan ekonomi
					Program Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
					Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
					Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
					Program Pengembangan Agribisnis
					Program Pengembangan Kawasan Agribisnis dan Daerah Khusus
					Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian
					Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan
					Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
					Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengolah dan Pemasaran
					Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
					Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
					Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan
					Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan
					Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
					Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan

SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		RENCANA	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
					Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
					Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
					Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
					Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
					Program peningkatan produksi hasil peternakan
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
					Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
					Program Peningkatan Keamanan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan
					Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
					Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian
					Program Pengembangan Kawasan Agribisnis dan Daerah Khusus
					Program Pengembangan Agribisnis
					Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
					Program pembinaan, pengawasan, pengusahaan mineral dan batubara
					Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)
					Program penelitian dan pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan
					Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
					Program Perencanaan Pembangunan
					Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
					Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian
					Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		RENCANA	REALISASI	PERSEN	
1		*2*	*3*	*4*	*5*
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	28.902.326.250,00	26.618.279.297,00	92,10	Program perencanaan pembangunan ekonomi
					Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
					Program pengembangan data dan informasi
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
					Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua
					Program pengembangan data/informasi
					Program perencanaan pembangunan ekonomi
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	2.211.774.844.377,00	1.790.101.327.606,00	80,94	Program pembangunan jalan dan jembatan
					Fasilitasi, Koordinasi dan Perencanaan Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan
					Peningkatan Jalan dan Jembatan
					Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
					Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
					Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
					Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
					Pogram peningkatan pelayanan angkutan
					Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan
					Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	231.082.824.000,00	230.048.747.056,00	99,55	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
					Program Pengendalian Banjir
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	96.320.000.000,00	84.770.590.681,00	88,01	Program Pengembangan Perumahan
					Program Pengembangan Perumahan
					Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lokal

SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		RENCANA	REALISASI	PERSEN	
1		*2*	*3*	*4*	*5*
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	6.232.700.000,00	3.762.925.000,00	60,37	Program pelayanan air bersih
					Perencanaan Jaringan Air Bersih di Prov. Papua (Tersebar)
					Pemasangan Jaringan Pipa dan Peningkatan Kapasitas Air Minum Kota Jayapura
					Studi Kelayakan SPAM Regional JAYATANI
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	12.129.350.000,00	11.058.305.265,00	91,17	Program pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi
					Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	4.984.500.000,00	4.616.433.957,00	92,62	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
					Program Perencanaan Tata Ruang
					Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi bidang ESDM
22	Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia	17.593.516.505,00	16.987.617.013,00	96,56	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
					Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
					Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
					Program Pengelolaan Hutan Masyarakat Hukum Adat
					Program Pengelolaan DAK Bidang Kehutanan
Anggaran Prioritas IKU		**4.121.274.730.822,00**	**3.469.253.286.040,72**	**84,18**	
Belanja Langsung		**6.087.515.955.417,00**	**5.233.514.550.634,22**	**85,97**	
Belanja Tidak Langsung		**7.571.119.344.402,00**	**6.789.596.483.126,00**	**89,68**	
TOTAL		**13.658.635.299.819,00**	**12.023.111.033.760,00**	**88,03**	

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2016 adalah Rp13.658.635.299.819,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp7.571.119.344.402,00 dan Belanja Langsung Rp6.087.515.955.417,00. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp4.121.274.730.822,00 atau 67,20 persen dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp3.469.253.286.040,00

dari realisasi belanja langsung atau 66,29 persen. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU adalah 84,18 persen. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 84,18 persen tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.

BAB IV
PENUTUP

A. SIMPULAN

Secara umum Pemerintah Provinsi Papua telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan selaku penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Papua.

Tugas-tugas tersebut secara operasional telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Biro, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melalui kegiatan masing-masing satuan kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua.

Akuntabillitas kinerja dan keuangan yang dilaksanakan dan dicapai dalam tahun 2016 adalah :

Keterangan	Jumlah
➢ Sasaran stratejik yang dilaksanakan dengan kategori :	22 sasaran
>Kategori “sangat berhasil”	16 sasaran
>Kategori “Berhasil”	3 sasaran
>Kategori “Cukup Berhasil”	1 sasaran
>Kategori “kurang berhasil”	1 sasaran
>Kategori “tidak berhasil”	1 sasaran
➢ Realisasi belanja pelaksanaan IKU	Rp3.469.253.286.041,00
>Prosentase realisasi belanja IKU terhadap anggaran IKU	84,18%
➢ Realisasi Belanja Langsung	Rp 5.233.514.550.634,22
> Prosentase realisasi belanja langung terhadap anggaran belanja langsung	85,97%

Realisasi keuangan tahun 2016 yang digunakan untuk melaksanakan 22 (dua puluh dua) sasaran tersebut adalah sebesar Rp3.469.253.286.041,00 atau 84,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 4.119.154.730.822,00.

Penjelasan sasaran sesuai kategori adalah sebagai berikut :

1. Kategori “Sangat Berhasil”, terdiri dari 16 (enam belas) sasaran yaitu:
    1) Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN
    2) Peningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua
    3) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil
    4) Terwujudnya Masyarakat yang Sehat
    5) Meningkatnya prestasi olahraga
    6) Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
    7) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
    8) Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja
    9) Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perkonomian daerah
    10) Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat
    11) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
    12) Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni
    13) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah
    14) Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan
    15) Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten
    16) Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia

2. Kategori “Berhasil”, terdiri dari satu sasaran yaitu:
    1) Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur
    2) Meningkatnya konektivitas antar wilayah
    3) Meningkatnya pemenuhan air bersih

3. Kategori “Cukup Berhasil”, tidak ada.
    1) Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan ketaatan terhadap hukum seluruh masyarakat Papua

4. Kategori “Kurang Berhasil”, terdiri dari satu sasaran yaitu:
    1) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif

5. Kategori “Tidak Berhasil”, tidak ada.
    1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi

Secara umum masih dijumpai beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan target kinerja dikarenakan Pemerintah Provinsi Papua baru memiliki IKU.
2. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain :
    1) Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2016.
    2) Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.
    3) Belum tersusunnya SOP pada beberapa unit kerja dikarenakan terjaadinya perubahan struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
3. Adanya tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kondisi geografis dan alam yang menghambat pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja sasaran.

B. UPAYA PERBAIKAN

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, maka Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendorong pemangku kepentingan untuk selalu memperbaiki kualitas penyajian data dengan memperhatikan metode pengumpulan data yang akurat dan dpat dipertanggungjawabkan. Selain itu perlu ditingkatkan komitmen semua SKPD untuk melaksanakan isi perjanjian kinerja yang telah ditandatangani bersama antara pimpinan SKPD dengan Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua, perlu juga dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh SKPD.
2. Memperbaiki target kinerja yang ditetapkan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi ril wilayah Papua.
3. Meningkatkan pemahaman pada seluruh pimpinan SKPD dan jajaran di bawahnya akan pentingnya penerapan SAKIP pada SKPD masing-masing sehingga mempermudah dalam mengawal kinerja SKPD terutama dalam mencapai kinerja yang ditetapkan sesuai visi misi SKPD dan visi misi Gubernur.
4. Meningkatkan pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan antar instansi yang terkait.
6. Mengutamakan penganggaran untuk melaksanakan program kerja yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2014

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Provinsi dalam suatu Peraturan Gubernur Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN ……./3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

BAB II
INDIKATOR KINERJA
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh SKPD untuk :

a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
b. penyampaian rencana kerja dan anggaran;
c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018.

BAB ...../4

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

BAPPEDA, Inspektorat Provinsi Papua dan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua, berkewajiban melakukan :

a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Provinsi Papua dan tingkat SKPD;
b. monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
c. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2014

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 31 Desember 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PEMERINTAH PROVINSI SETDA PAPUA

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 33 Tahun 2014
Tanggal : 30 Desember 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROVINSI PAPUA
TAHUN 2014 – 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
Misi 1 : Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam Kedaulatan NKRI						
1.	Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua Jumlah peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	1.	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	Jumlah Perda yg ditetapkan melalui uji publik / Jumlah Perda Provinsi yg diusulkan	X 100 %	Biro Hukum
		2.	konflik horisontal berdasarkan SARA	Jumlah konflik berdasarkan SARA (tahun sebelumnya - tahun sekarang) / Jumlah konflik horisontal berdasarkan SARA tahun sekarang	X 100 %	Badan KesbangPol
		3.	Persentase jumlah korban bencana alam yang tertangani	Jumlah korban bencana alam yang tertangani / Jumlah korban bencana alam seluruhnya	X 100 %	BPBD
		4.	Angka kriminalitas	Jumlah tindak kriminal yang tertangani selama satu tahun / Jumlah penduduk seluruhnya	X 100 %	Badan KesbangPol
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus						
1.	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1.	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	Jumlah pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan struktural / Jumlah seluruh Pejabat struktural di Pem. Provinsi Papua	X 100 %	Badan Kepegawaian Daerah
		2.	Persentase pemenuhanjabatan fungsional sesuai kebutuhan	Jenis jabatan fungsional yang telah diisi / jumlah kebutuhan jenis jabatan fungsional	X 100 %	Badan Kepegawaian Daerah

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
		3.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	sesuai rumusan penilaian evaluasi Akuntabilitas KEMENPAN dan RB RI		Biro ORPA
		4.	Opini BPK atas LKPD	sesuai rumusan penilaian evaluasi LKPD oleh BPK RI		BPKAD
		5.	Rata-rata kehadiran pegawai	Jumlah Pegawai yang hadir selama setahun / jumlah hari kerja	X 100 %	Biro ORPA
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah responden yang menyatakan setuju/puas terhadap pelayanan publik / Jumlah Responden yang ditetapkan	X 100 %	Biro ORPA
		2.	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) / Jumlah Seluruh SKPD	X 100 %	Biro ORPA
3.	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1.	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan yang diterima	X 100 %	Inspektorat
		2.	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi	X 100 %	Inspektorat
4.	Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	(100 % - % Angka Kemiskinan)		Dinas NAKERDUK
		2.	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelompok PMKS yang tertangani / Jumlah kelompok PMKS	X 100 %	Dinas Kessos dan Pemukiman
Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia						
1.	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1.	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	Jumlah Penduduk Asli Papua yang terjangkau dalam KPS / Jumlah penduduk Asli Papua di Provinsi Papua	X 100 %	Dinas Kesehatan
		2.	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	jumlah kematian ibu melahirkan / 100.000 ibu melahirkan	X 100 %	Dinas Kesehatan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
		3.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	jumlah kematian bayi yang lahir / 1.000 kelahiran hidup	X 100 %	Dinas Kesehatan
		4.	Penanganan Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	Jumlah Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatka ARV / Jumlah Penderita HIV/AIDS yang ditemukan	X 100 %	Dinas Kesehatan
		5.	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	Jumlah kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis / Jumlah kelahiran (partus)	X 100 %	Dinas Kesehatan
		6.	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	Jumlah Balita Gizi buruk yg ditemukan dan mendapat perawatan / Jumlah Balita Gizi buruk yang ditemukan	X 100 %	Dinas Kesehatan
		7.	Angka usia harapan hidup	rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua		Dinas Kesehatan
2.	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1.	Persentase angka melek huruf	Jumlah penduduk yg melek huruf / Jumlah penduduk	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.	Rata-rata lama sekolah	(jumlah siswa SD X 6 tahun) + (jumlah Siswa SMP X 9 tahun) + (jumlah Siswa SMA X 12 tahun) + (jumlah Mahasiswa X 5 tahun) / jumlah Penduduk usia 7 tahun ke atas	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3.	APK PAUD/TK	Jumlah siswa PAUD usia 4-6 thn / Jumlah penduduk/anak usia 4-6	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Jumlah siswa SD/MI / Jumlah penduduk usia sekolah SD/MI	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
		5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Jumlah siswa SMP/MTs / Jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	Jumlah siswa SMU/SMK/MA / Jumlah penduduk usia sekolah SMU/SMK/MA	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah siswa usia 7-12 thn di tingkat SD/MI / Jumlah penduduk usia sekolah SD/MI	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		8.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah siswa usia 13-15 thn di tingkat SMP/MTs / Jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		9.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	Jumlah siswa usia 16-18 thn di tingkat SMU/SMK/MA / Jumlah penduduk usia sekolah SMU/ SMK/MA	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		10.	Angka putus sekolah SD/MI	Jumlah anak yang putus sekolah SD/MI / Jumlah murid SD/MI saat pertama kali mengikuti pendidikan	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		11.	Angka putus sekolah SMP/MTs	Jumlah anak yang putus sekolah SMP/MTs / Jumlah Murid SMP/MTs saat pertama kali mengikuti pendidikan	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		12.	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	Jumlah anak yang putus sekolah SMU/SMK/MA / Jumlah siswa SMA/MA saat pertama kali mengikuti pendidikan	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		13.	Persentase guru yang telah bersertifikasi	Jumlah guru yang telah lulus sertifikasi nasinal / Jumlah seluruh guru	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
		14.	Persentase angka kelulusan SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		15.	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		16.	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMU/SMK/MA / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMU/SMK/MA	X 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Meningkatnya prestasi olahraga	1.	Persentase atlet/klub olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	Jumlah atlet/klub olahraga yang menerima penghargaan tingkat nasional / Jumlah klub olahraga yang dibina	X 100 %	Dinas Olah Raga dan Pemuda
4.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1.	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	Jumlah wirausaha muda asli Papua tahun sekarang - jumlah wirausaha muda Tahun lalu / Jumlah wirausaha muda asli Papua tahun lalu	X 100 %	Dinas Peridutrian dan Perdagangan
Misi 4 : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal						
1.	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1.	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	Nilai investasi PMDN tahun ybs-Nilai investasi PMDN tahun lalu / Nilai investasi PMDN tahun lalu	X 100 %	Badan PTPM
		2.	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA dari tahun ke tahun	Nilai investasi PMA tahun yang ybs- Nilai investasi PMA tahun lalu / Nilai investasi PMA tahun lalu	X 100 %	Badan PTPM
2.	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1.	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	Jumlah Koperasi Sehat/menghasilkan laba tahun ybs / Jumlah Koperasi di Papua	X 100 %	Dinas Koperasi dan UKM
		2.	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM tahun ybs- Jumlah IKM tahun lalu / Jumlah IKM di Papua tahun lalu	X 100 %	Dinas Peridutrian dan Perdagangan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
		3.	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menegah	Jumlah UKM tahun ybs- Jumlah UKM tahun lalu / Jumlah UKM di Papua tahun lalu	X 100 %	Dinas Koperasi dan UKM
3.	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1.	Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah Pengangguran / Jumlah angkatan kerja	X 100 %	Dinas NAKERDUK
		2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja / Jumlah Angkatan kerja	X 100 %	Dinas NAKERDUK
4.	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perkonomian daerah	1.	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	PDRB sub sektor pariwisata tahun ybs / Jumlah (Rp) PDRB tahun ybs	X 100 %	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		2.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	Jumlah kunjungan wisatwan ke Papua tahun sekarang - tahun lalu / jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu	X 100 %	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5.	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	1.	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	PDRB sub sektor perkebunan dan hasilnya tahun ybs / Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs	X 100 %	Dinas Perkebunan
		2.	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	PDRB sub sektor peternakan tahun ybs / Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs	X 100 %	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3.	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	PDRB sub sektor Perikanan tahun ybs / Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs	X 100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan
		4.	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	PDRB sektor Tanaman Pangan tahun ybs / Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs	X 100 %	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		5.	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	PDRB sektor Kehutanan tahun ybs / Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs	X 100 %	Dinas Kehutanan
		6.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	PDRB sektor pertambangan tahun ybs / Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs	X 100 %	Dinas ESDM

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1.	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	$\frac{\text{PDRB (t+1) - PDRB (t)}}{\text{PDRB (t)}}$	X 100 %	BAPPEDA
		2.	PDRB per Kapita	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk pertengahan tahun}}$	X 100 %	BAPPEDA
		3.	Inflasi	$\frac{\text{Inflasi (n+1) - Inflasi (n)}}{\text{Inflasi (n)}}$	X 100 %	BAPPEDA
		4.	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^{k} P_i (Q_i + Q_{i-1})$ Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi		BAPPEDA
		5.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB sektor pengolahan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}}$	X 100 %	Dinas Perindustrian dan Perdangan
		6.	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$	X 100 %	Dinas Pendapatan Daerah

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
Misi 5 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan						
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1.	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap / Total Panjang Jalan Provinsi	X 100 %	Dinas Pekerjaan Umum
		2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Panjang Jembatan Provinsi dalam kondisi baik / Total Panjang Jembatan (Provinsi)	X 100 %	Dinas Pekerjaan Umum
		3.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Total jumlah kendaraan di wilayah Provinsi / Total Panjang Jalan di wilayah Provinsi	X 100 %	Dinas Pekerjaan Umum
		4.	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Jumlah arus penumpang angkutan umum (angkutan laut dan angkutan udara) yang masuk dan keluar selama satu tahun	X 100 %	Dinas Perhubungan
2.	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1.	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	Luas lahan budidaya pertanian yg mendapat layanan irigasi / Luas lahan budidaya pertanian	X 100 %	Dinas Pertanian
		2.	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	Panjang jaringan irigasi di wilayah Provinsi yg berfungsi baik / Total panjang jaringan irigasi di wilayah Provinsi	X 100 %	Dinas Pekerjaan Umum
		3.	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	Rata2 ketersediaan air irigasi per tahun / Kebutuhan air baku untuk irigasi	X 100 %	Dinas Pekerjaan Umum
		4.	Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	Daerah banjir dan abrasi yang tertangani / daerah yang berpotensi banjir dan abrasi yang harus tertangani	X 100 %	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1.	Jumlah rumah layak huni yang dibutuhkan	Jumlah Rumah Layak huni yang dibangun / Jumlah yang KK yang membutuhkan layak huni	X 100 %	Dinas Kessos dan Pemukiman

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
4.	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1.	Persentase RT yang terlayani air bersih	Jumlah RT/KK yang mendapatkan layanan air bersih / Jumlah RT/KK yang membutuhkan air bersih	X 100 %	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1.	Rumah Tangga pengguna listrik	Jumlah rumah tangga pengguna listrik / Jumlah seluruh rumah tangga yang membtuhkan listrik	X 100 %	Dinas ESDM
6.	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1.	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	ijin penggunaan lahan skala luas yang diterbitkan yang sesuai ketentuan / Ijin penggunaan lahan skala luas yang diterbitkan	X 100 %	Badan PTPM
7.	Terwujudnya Papua sebagaiparu-paru dunia	1.	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	Luas area kawasan hutan mangrove yang kondisi baik / Total luas area kawasan hutan mangrove	X 100 %	Dinas Kehutaan
		2.	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kerusakan kawasan hutan lindung yang kondisi baik / Luas kawasan hutan lindung	X 100 %	Dinas Kehutaan
		3.	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	Luas area hutan lindung / Total luas area kawasan hutan	X 100 %	Dinas Kehutaan

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP,MH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PEMERINTAH PROVINSI SETDA PAPUA

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Jabatan : Gubernur Papua

Pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 28 Maret 2016

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

PERJANJIAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2016

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
1	Meningkatnya rasa aman, tenteram, nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	%	100.00
		2	Penururnan konflik horisontal berdasarkan SARA	%	18.00
		3	Angka kriminalitas	%	33.00
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	%	100.00
		2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	%	71.00
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	CC
		4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP
		5	Rata-rata kehadiran pegawai	%	90.00
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	50.00
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	%	100.00
		2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	%	55.00
5	Peningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Angka	70.00
		2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	4.00
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	%	100.00
		2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	400.00
		3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	54.00
		4	Penanganan Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	%	100.00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
		5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	%	70.00
		6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	%	100.00
		7	Angka usia harapan hidup	Angka	67.00
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1	Persentase angka melek huruf	%	85.00
		2	Rata-rata lama sekolah	%	6.00
		3	APK PAUD/TK	%	10.00
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	90.00
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	70.00
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	%	60.00
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	79.00
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	48.00
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	%	40.00
		10	Angka putus sekolah SD/MI	%	1.00
		11	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	1.00
		12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	%	1.00
		13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	%	60.00
		14	Persentase angka kelulusan SD/MI	%	100.00
		15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	%	100.00
		16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	%	100.00
8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase atlet/klub olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	%	25.00
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	%	8.00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	%	85.00
		2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA	%	60.00
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	%	11.00
		2	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	%	19.00
		3	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	%	25.00
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1	Tingkat pengangguran terbuka	%	3.50
		2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	83.00
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perkonomian daerah	1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	%	10.00
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	%	5.00
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	%	1,30
		2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	1.20
		3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	4.50
		4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	10,00
		5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	2.20
		6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	30.00
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	%	8.00
		2	PDRB per Kapita		31 Juta
		3	Inflasi	%	5.00
		4	Indeks Gini		0.41
		5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	2.50
		6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	%	10,00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	30.00
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	50.00
		3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:110
		4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	4 Juta
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	%	65.00
		2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	%	60.00
		3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	%	15.00
		4	Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	%	2.00
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1	Pemenuhan Rumah Layak Huni	%	40.00
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1	Persentase RT yang terlayani air bersih	%	55.00
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1	Rumah Tangga pengguna listrik	%	40.00
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	%	100.00
22	Terwujudnya Papua sebagaiparu-paru dunia	1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	%	85.00
		2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	2.00
		3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	%	30.00

Jayapura, 28 Maret 2016

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Jabatan : Gubernur Papua

Pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 22 Maret 2017

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

PERJANJIAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2017

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
1	Meningkatnya rasa aman, tenteram, nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	%	100.00
		2	Penururnan konflik horisontal berdasarkan SARA	%	18.00
		3	Persentase jumlah bencana korban		20,00
		4	Angka kriminalitas	%	33.00
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	%	100.00
		2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	%	71.00
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	B
		4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP
		5	Rata-rata kehadiran pegawai	%	95.00
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	25.00
		2	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	70,00
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	%	1000.00
		2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	%	55.00
5	Peningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Angka	71.00
		2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	4.00
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	%	100.00
		2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	300.00
		3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	7.00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
		4	Penanganan Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	%	100.00
		5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	%	70.00
		6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	%	100.00
		7	Angka usia harapan hidup	Angka	67.00
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1	Persentase angka melek huruf	%	85.00
		2	Rata-rata lama sekolah	%	6.00
		3	APK PAUD/TK	%	20.00
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	92.00
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	70.00
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	%	55.00
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	80.00
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	48.00
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	%	42.00
		10	Angka putus sekolah SD/MI	%	0.88
		11	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	1.00
		12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	%	1.00
		13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	%	31.00
		14	Persentase angka kelulusan SD/MI	%	100.00
		15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	%	100.00
		16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	%	100.00
8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase atlet/klub olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	%	30.00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	%	8.00
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	%	85.00
		2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA	%	60.00
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	%	11.00
		2	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	%	19.00
		3	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	%	38.00
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1	Tingkat pengangguran terbuka	%	3.00
		2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	83.00
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perkonomian daerah	1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	%	13.00
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	%	8.00
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	%	1,50
		2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	1.20
		3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	5.50
		4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	21,00
		5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	3.00
		6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	35.50
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	%	9.50
		2	PDRB per Kapita		56 Juta
		3	Inflasi	%	4.00
		4	Indeks Gini		0.35
		5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	2.50
		6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	%	10,00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		*2*		*3*	*4*
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	30.00
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	50.00
		3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	1:110
		4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	4 Juta
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	%	70.00
		2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	%	89.00
		3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	%	28.50
		4	Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	%	2.00
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1	Pemenuhan Rumah Layak Huni	%	50.00
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1	Persentase RT yang terlayani air bersih	%	55.00
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1	Rumah Tangga pengguna listrik	%	65.00
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	%	100.00
22	Terwujudnya Papua sebagaiparu-paru dunia	1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	%	85.00
		2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	2.00
		3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	%	27.00

Jayapura, 22 Maret 2017

GUBERNUR PAPUA

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA (PK) PROVINSI PAPUA TAHUN 2014, 2015, 2016 DAN 2017

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET
				2014				2015				2016				2017
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	%	100,00	100,00	100	%	100,00	100,00	100	%	100,00	100	100	100
		2	Persentase konflik horisontal berdasarkan SARA	%	28,50	(28,50)	-100	%	15,00	19,00	78,95	%	18,00	65,22	27,59	18,00
		3	Angka kriminalitas	%	34,50	32,72	105,16	%	33,00	84,42	84,18	%	33,00	38,19	86,41	33,00
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	%	80,00	80,83	101,04	%	100,00	99,32	99,32	%	100,00	96.63	96,63	100,00
		2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	%	100,00	26,35	26,35	%	63,67	70,79	111,18	%	71,00	31	43.66	71,00
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	C	C	100	Angka	B	C	66,67	Angka	CC	CC	100,00	B
		4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WDP	WDP	100	Opini	WTP	WTP	100	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP
		5	Rata-rata kehadiran pegawai	%	90,00	84,33	93,7	%	90,00	87,76	97,51	%	90,00	97.94	108	95
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100,00	30,61	30,61	%	41,00	31,00	76,60	%	50,00	10.4	20.8	70
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang [illegible]	%	60,00	100,00	166,67	%	100,00	100,00	100	%	100,00	100	100	100,00
		2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	%	40,00	82,14	205,35	%	55,00	55.36	100,65	%	55,00	55.4	97,09	55,00
5	Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	70,00	30,05	157,07	%	72,00	71,60	157,07	%	70,00	71.46	102.08	71
		2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah	%	4,00	4,02	100.5	%	5,00	0,95	19.00	%	4,00	3.33	83.25	4,00
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100	100	100,00
		2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	235,00	422,00	55,69	Angka	422,00	422,00	55,69	Angka	400,00	313	127.8	300
		3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	54,00	8,00	675,00	Angka	44,00	44,00	100,00	Angka	54,00	7	771.43	7
		4	Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	%	100,00	44,00	44,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	48	48	100,00
		5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	%	39,90	47,30	118,55	%	48,00	53,94	112,38	%	70,00	28.1	40.14	70,00
		6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100	100	100,00
		7	Angka usia harapan hidup	Angka	68,00	68,80	101,18	Angka	69,90	65,10	93,13	Angka	67,00	65.1	97.16	67,00
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1	Persentase angka melek huruf	%	75,83	75,92	100,12	Angka	76,00	84,84	111,63	%	85,00	84,84	99,81	85,00
		2	Rata-rata lama sekolah	%	6,87	6,87	100	%	6,90	5,76	83,48	%	6,00	5,99	99,83	6,00
		3	APK PAUD/TK	%	29,54	12,19	41,2	%	12,19	10,93	84,73	%	10,00	37,82	378,20	20,00
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	99,72	99,72	100	%	100,00	90,67	90,67	%	90,00	93,14	103,49	92,00
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	55,17	55,17	100	%	63,00	71,02	112,73	%	70,00	60,96	87,09	70,00
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	%	41,69	41,69	100	%	42,00	61,53	146,50	%	60,00	54, 04	90,07	55,00
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	70,80	75,84	107,12	%	79,00	78,36	99,19	%	79,00	82,69	104,67	80,00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET
				2014				2015				2016				2017
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	43,40	38,52	88,76	%	58,00	53,68	92,55	%	48,00	41,58	86,63	48,00
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	%	30,02	30,02	100	%	30,00	43,11	143,70	%	40,00	44,81	112, 03	42,00
		10	Angka putus sekolah SD/MI	%	0,77	0,77	100	%	0,30	1,46	20,55	%	1,00	0,88	133,63	0,88
		11	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,36	0,20	104,44	%	0,15	1,68	8,93	%	1,00	1,51	66,23	1,00
		12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	%	0,84	2,22	-64,29	%	0,32	1,58	17,98	%	1,00	1,04	96,15	1,00
		13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	%	60,05	24,88	158,57	%	60,00	60,00	100,00	%	60,00	31,00	51,67	31,00
		14	Persentase angka kelulusan SD/MI	%	99,80	99,92	100,12	%	100,00	99,92	99,92	%	100,00	99.98	99.98	100,00
		15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	%	99,50	99,11	99,61	%	100,00	99,98	99,98	%	100,00	100	100	100,00
		16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	%	98,00	98,05	100,05	%	100,00	99,79	99,79	%	100,00	100	100	100,00
8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	%	15,00	17,00	113,33	%	17,00	24,87	146,29	%	25,00	74.29	294.16	30
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	%	7,50	7,09	105,33	%	7,00	7,71	110,18	%	8,00	7.71	96.37	8,00
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke	%	30,00	79,19	263,97	%	80,00	143,76	179,71	%	85,00	47.24	55.58	85,00
		2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA dari tahun ke tahun	%	30,00	59,41	198,03	%	60,00	60,31	100,52	%	60,00	28.26	47.1	60,00
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	%	45,00	13,57	30,16	%	20,00	10,47	51,20	%	11,00	4.73	43	11,00
		2	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	%	3,00	19,40	646,67	%	20,00	18,75	93,75	%	19,00	18	94.73	19,00
		3	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	%	5,90	11,68	197,97	%	10,00	24,51	245,10	%	25,00	37.7	150.8	38,00
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,86	5,51	192,66	%	3,5	3,44	98,296	%	3,50	2.97	117.85	3,00
		2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	79,98	96,77	120,99	%	81	78,90	119,47	%	83,00	78.28	94.31	83,00
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perkonomian daerah	1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	%	10,35	9,10	87,92	%	10,00	9,75	97,30	%	10,00	12.92	129	13,00
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	%	3,00	0,56	18,67	%	3,00	3,30	110	%	5,00	7.75	155	8,00
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	%	0,74	0,95	128,38	%	0,90	1,11	123,33	%	1,30	1,30	100	1,50
		2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	0,82	1,28	156,10	%	1,20	0,91	75,83	%	1,20	0,87	72,50	1,20
		3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	4,00	4,40	110,00	%	4,50	4,40	97,7	%	4,50	5,14	114,22	5,50
		4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	5,45	8,54	156,70	%	8,50	9,56	112,47	%	10,00	21,00	210,00	21,00
		5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,57	2,20	140,13	%	2,0	2,20	110,00	%	2,20	2,90	131,82	3,00
		6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	45,92	32,05	69,80	%	35,00	28,87	82,49	%	30,00	35,50	118,33	35,50
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	%	7% - 8%	14,84	185,50	%	8,00	7,97	89,63	%	8,00	9,21	115,13	9,50
		2	PDRB per Kapita	Juta	26	24.616.649,43	94,68	Juta	25,00	30,97	123,88	Juta	31,00	55.61	179,39	56,00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET
				2014				2015				2016				2017
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Daerah	3	Inflasi	%	4,50	4,33	103,78	%	5,50	5,63	102,36	%	5,00	4,13	121.07	4,00
		4	Indeks Gini	%	0,35	0,41	82,86	%	0,35	0,41	117,14	%	0,41	0.39	105.13	0.35
		5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	3,54	2,50	70,62	%	3,54	2,17	61,30	%	2,5	2,03	81,20	2,5
		6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	%	7,30	8,22	112,60	%	7,30	8,22	112,60	%	10,00	7.95	79,50	10,00
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	61,50	23,26	37,82	%	30,00	27,51	91,70	%	30,00	21,08	70,27	30,00
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	24,00	49,28	205,33	%	50,00	45,15	90,30	%	50,00	25,45	50,90	50,00
		3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	01:18	1:'91	500,56	Rasio	1:'100	1:'96	96,00	Rasio	1:'110	1.106	103,77	1:'110
		4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	3,1 juta	3.850.112	124,20	Per Tahun	3,8 juta	3.88	102,11	Per Tahun	4 Juta	3,501,758	87,54	4 Juta
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	%	60,00	63,80	106,33	%	65,00	63,80	98,15	%	65,00	67,33	103,58	70,00
		2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	%	50,00	56,70	113,40	%	60,00	58,78	97,97	%	60,00	88,19	146,98	89,00
		3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	%	60,00	68,64	114,40	%	65,00	6,78	10,43	%	15,00	28,50	190,00	28,50
		4	Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	%	45,00	23,56	52,36	%	30,00	0,05	2.17	%	2,00	37,79	1889,50	2,00
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1	Jumlah Rumah Layak Huni yang di butuhkan	%	40,00	1,36	3,40	%	5,00	5,00	100,00	%	40,00	52,51	131,28	50,00
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1	Persentase RT yang terlayani air bersih	%	34,00	50,00	147,06	%	55,00	50,00	90,91	%	55,00	43,82	79,67	55,00
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1	Rumah Tangga pengguna listrik	%	36,00	36,46	101,28	%	37,00	38,44	103,89	%	40,00	50,97	127,42	50,00
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	%	70,00	30,52	103	%	70,00	100,00	142,86	%	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia	1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	%	80,00	82,64	103	%	85,00	82,64	97,22	%	85,00	82,64	97,22	85,00
		2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	10,00	3,00	130,00	%	2,00	3,00	150,00	%	2,00	2,20	90,91	2,00
		3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	%	60,00	26,61	26,61	%	30,00	26,61	88,70	%	30,00	25,72	85,73	27,00

Sasaran 1. Meningkatnya Rasa Aman, Tentram, Nyaman dan Ketaatan Terhadap Hukum Seluruh Masyarakat Papua

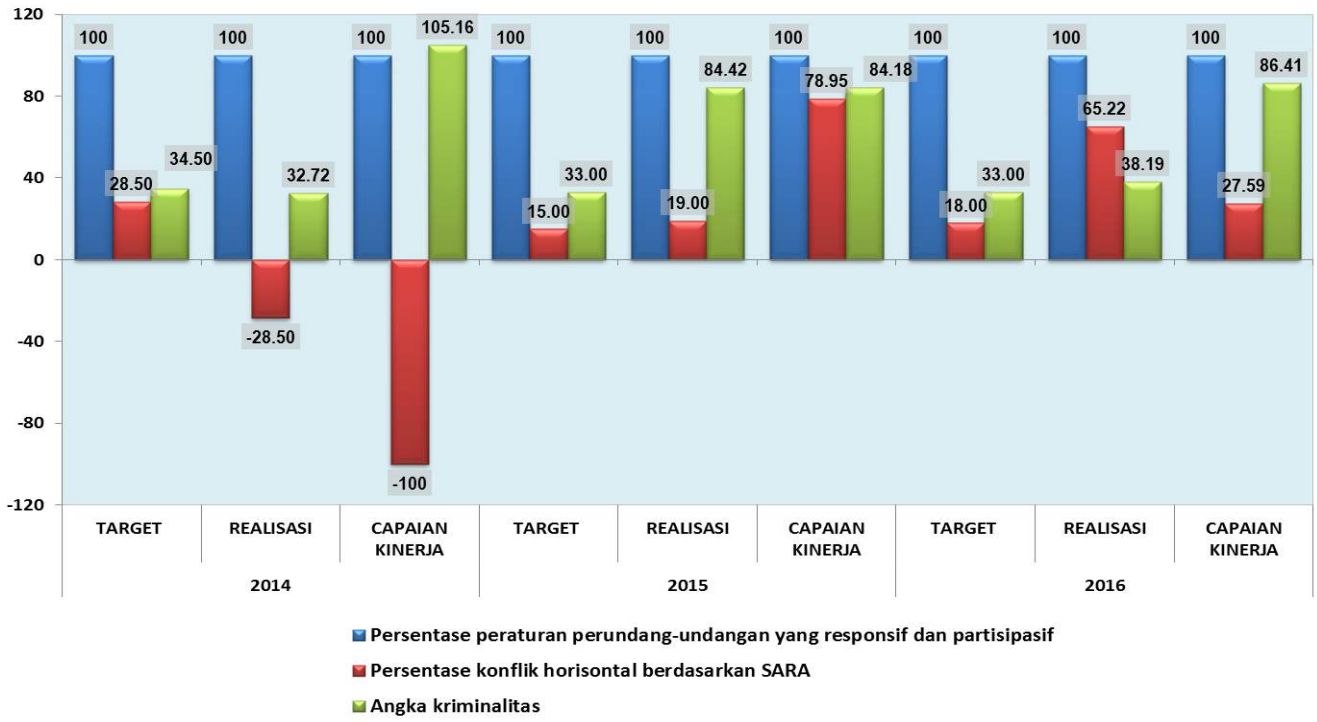

Sasaran 2. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Serta Disiplin Aparatur

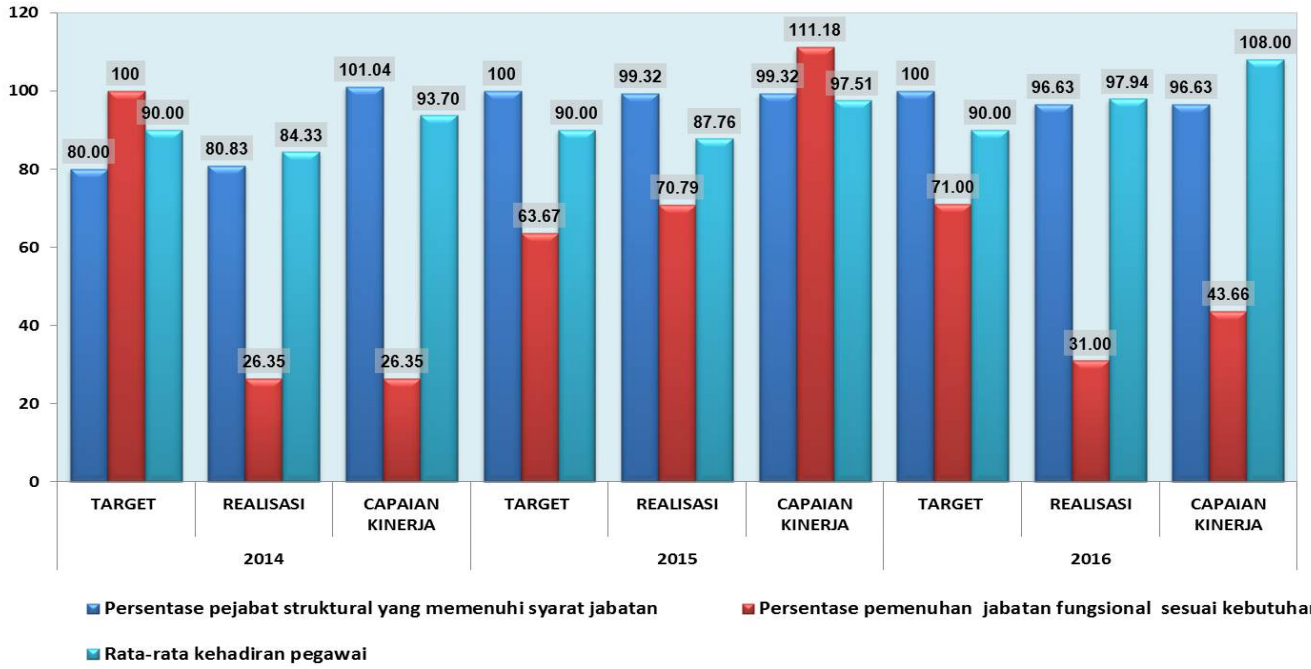

Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif Berbasis Teknologi Informasi

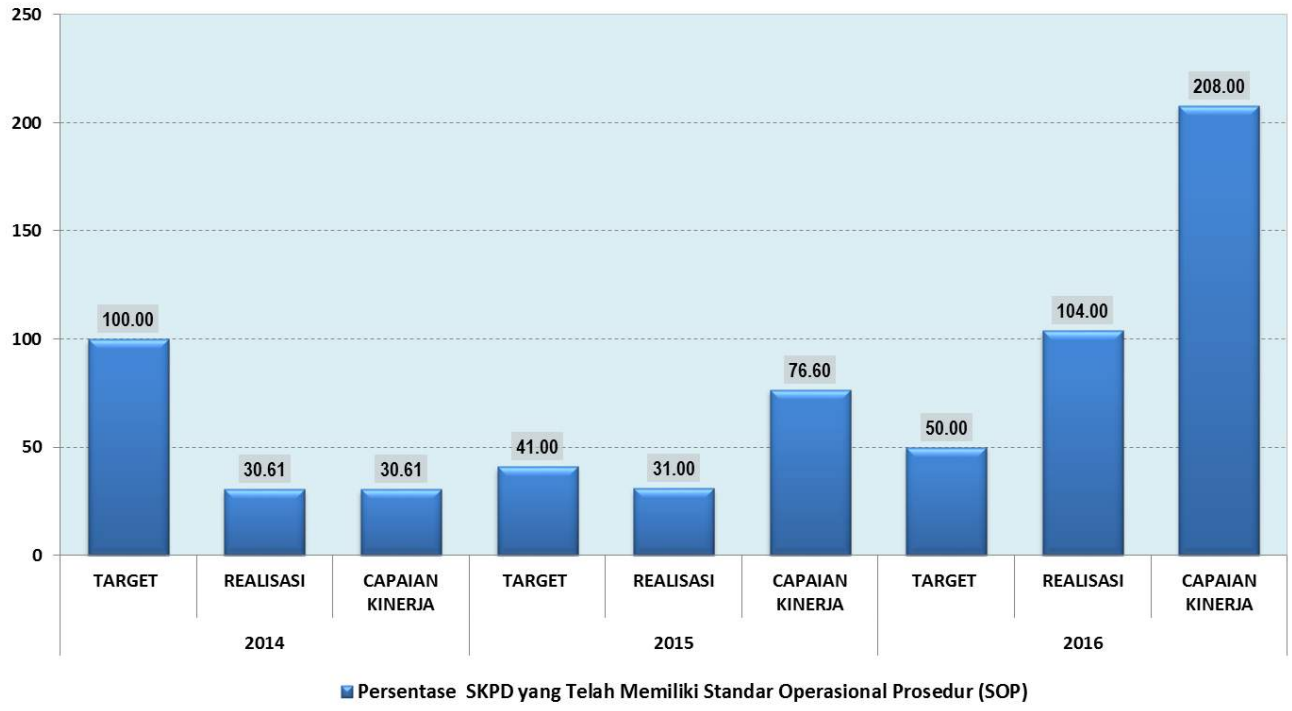

Sasaran 4. Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN

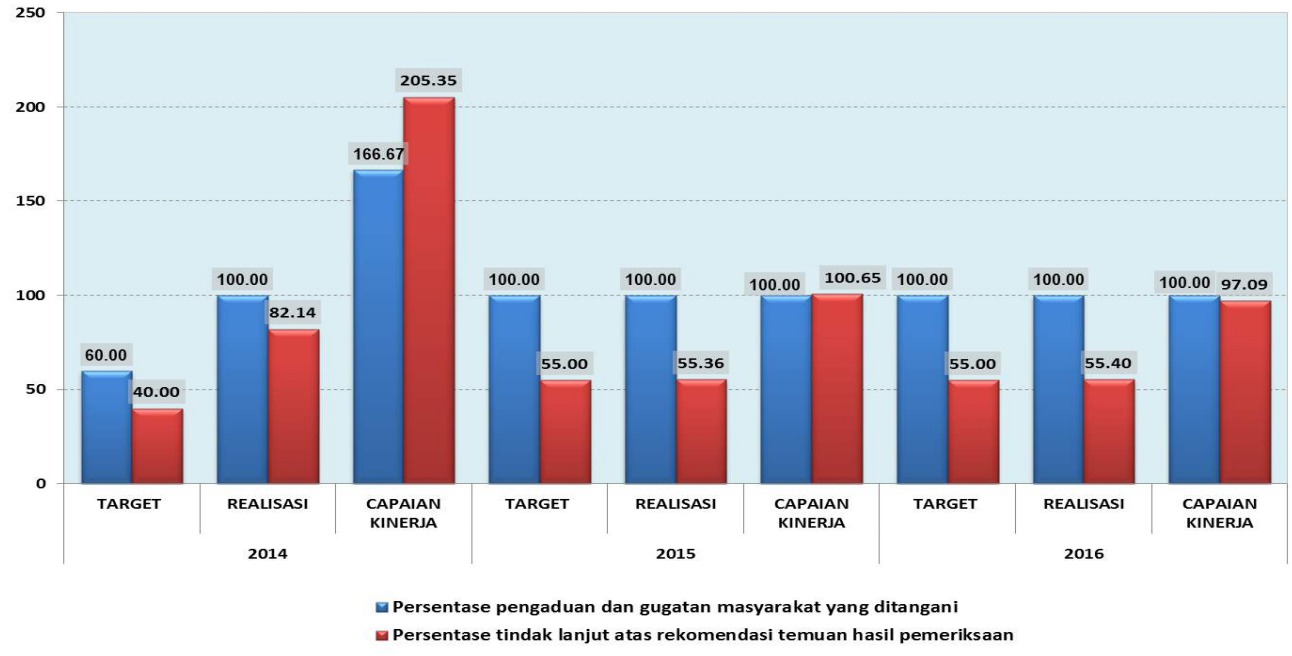

Sasaran 5. Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua

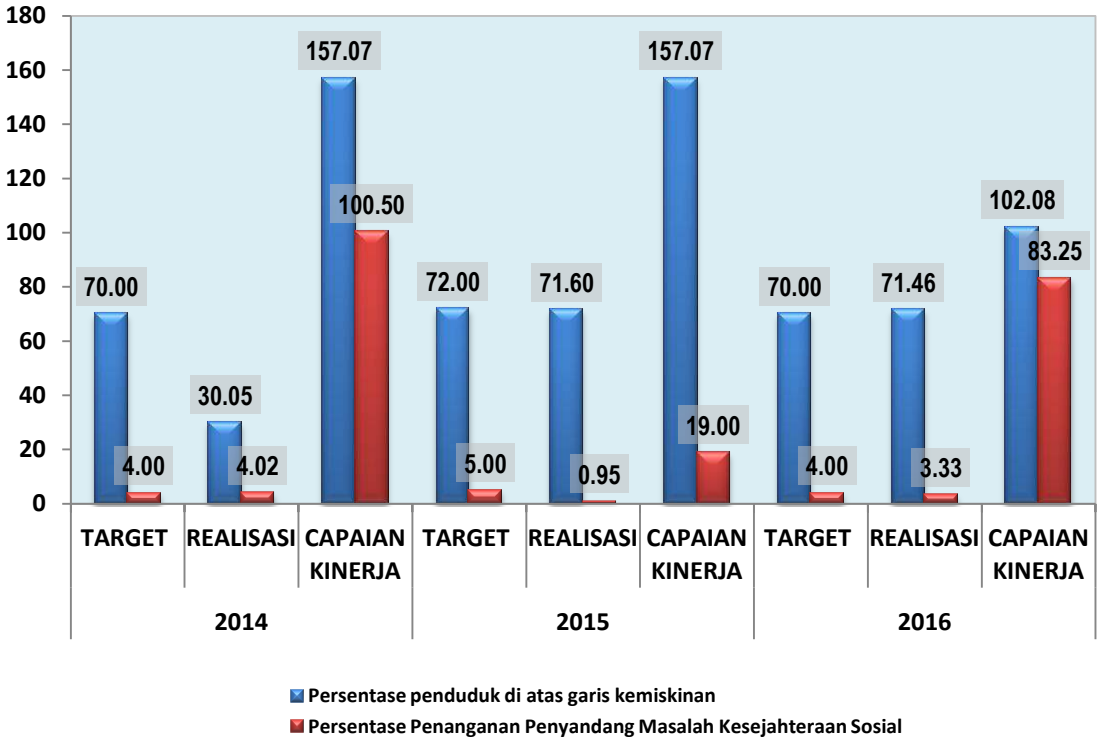

Sasaran 6. Terwujudnya Masyarakat yang Sehat

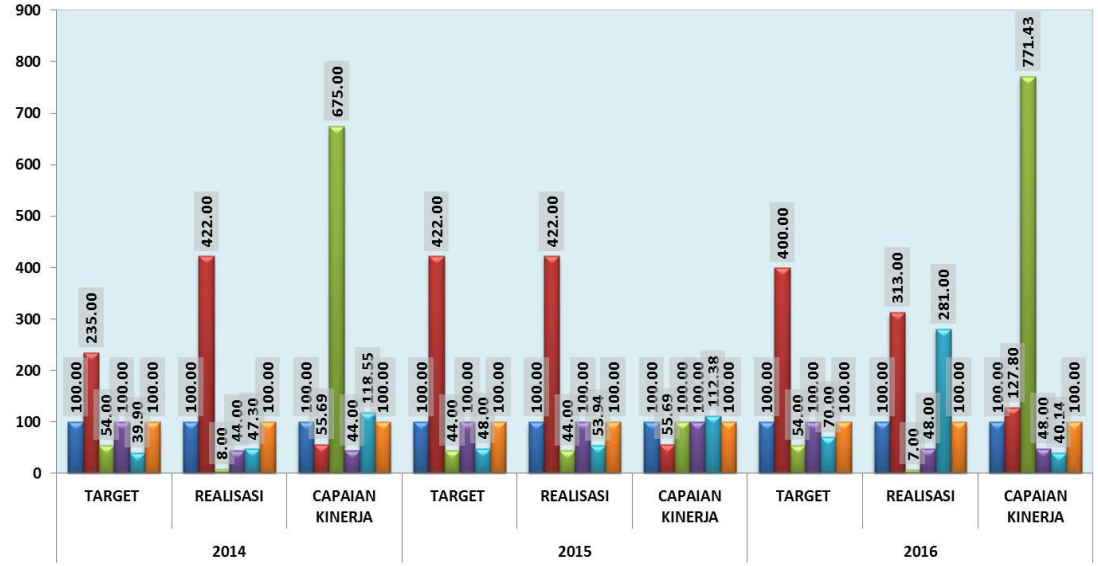

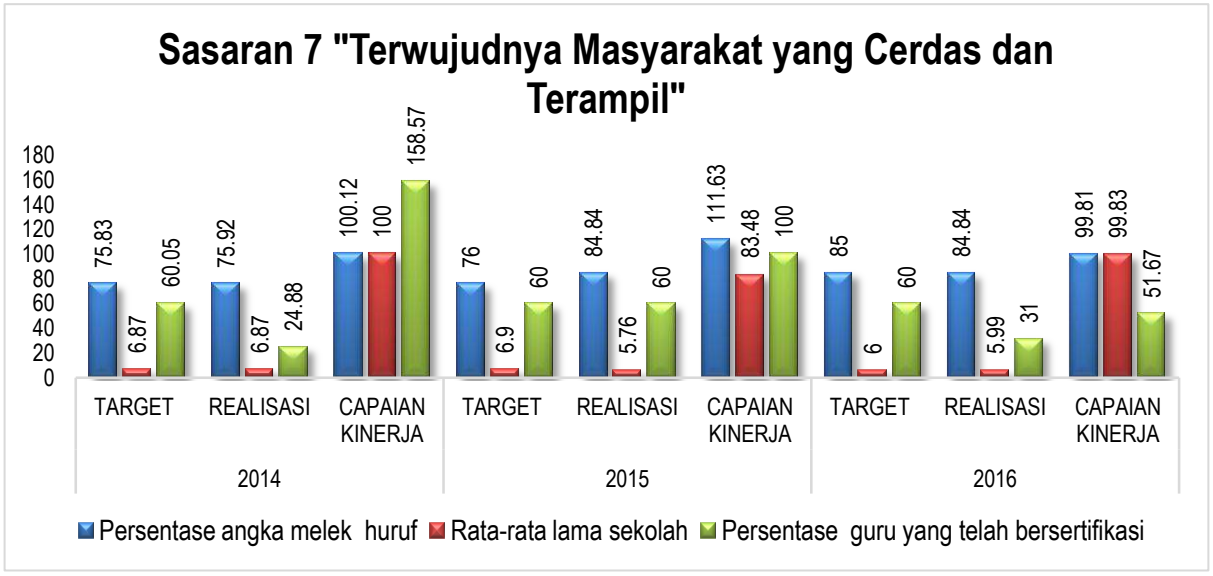
Sasaran 7 "Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan Terampil"
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
75.83
6.87
60.05
75.92
6.87
24.88
100.12
100
158.57
76
6.9
60
84.84
5.76
60
111.63
83.48
100
85
6
60
84.84
5.99
31
99.81
99.83
51.67
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
2014
2015
2016
Persentase angka melek huruf
Rata-rata lama sekolah
Persentase guru yang telah bersertifikasi

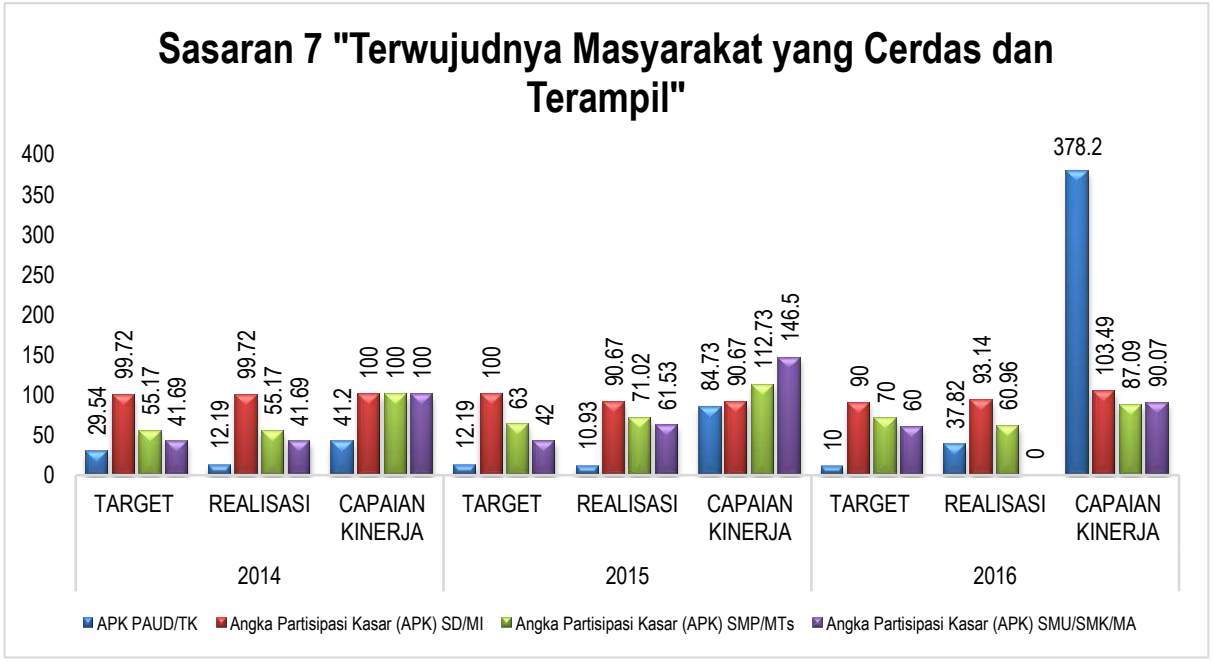
Sasaran 7 "Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan Terampil"
400
350
300
250
200
150
100
50
0
29.54
99.72
55.17
41.69
12.19
99.72
55.17
41.69
41.2
100
100
100
12.19
100
63
42
10.93
90.67
71.02
61.53
84.73
90.67
112.73
146.5
10
90
70
60
37.82
93.14
60.96
0
378.2
103.49
87.09
90.07
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
2014
2015
2016
APK PAUD/TK
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA

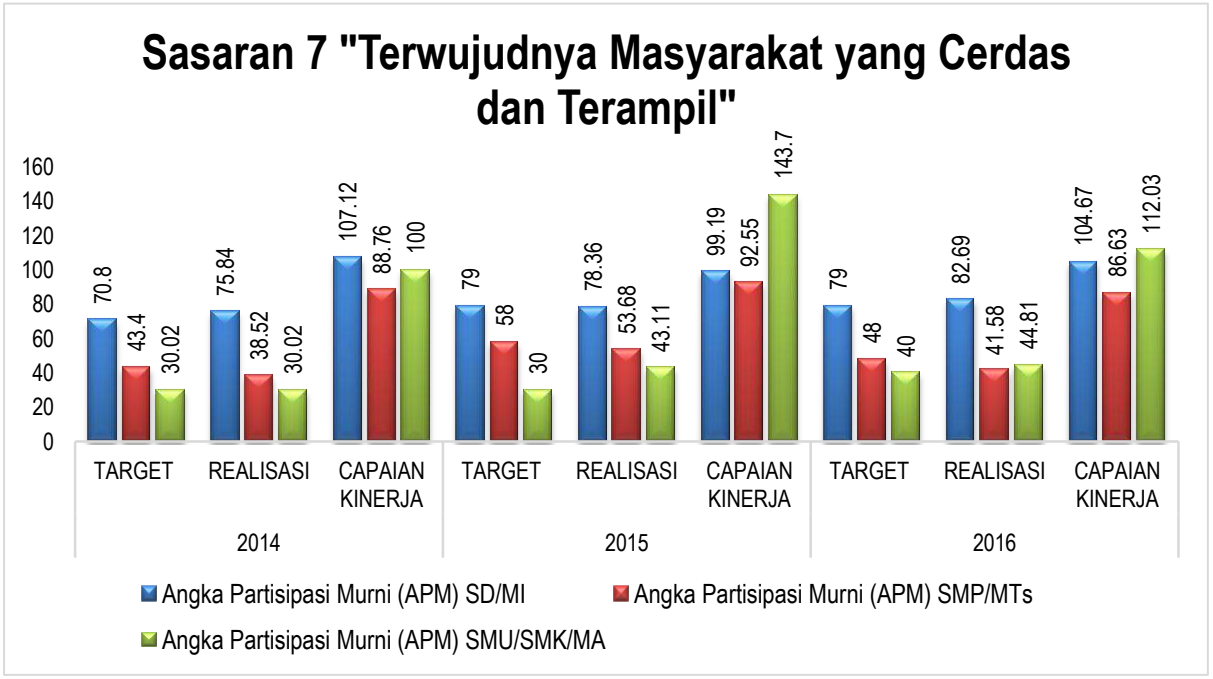
Sasaran 7 "Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan Terampil"
160
140
120
100
80
60
40
20
0
70.8
43.4
30.02
75.84
38.52
30.02
107.12
88.76
100
79
58
30
78.36
53.68
43.11
99.19
92.55
143.7
79
48
40
82.69
41.58
44.81
104.67
86.63
112.03
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
2014
2015
2016
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA

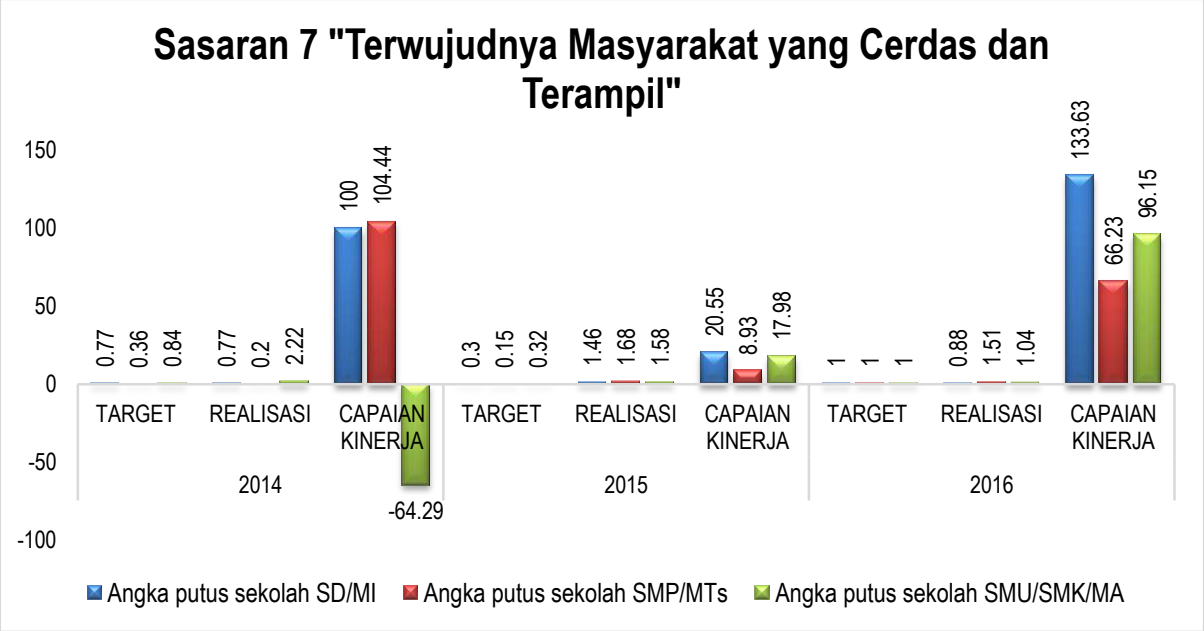
Sasaran 7 "Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan Terampil"
150
100
50
0
-50
-100
0.77
0.36
0.84
0.77
0.2
2.22
100
104.44
-64.29
0.3
0.15
0.32
1.46
1.68
1.58
20.55
8.93
17.98
1
1
1
0.88
1.51
1.04
133.63
66.23
96.15
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
2014
2015
2016
Angka putus sekolah SD/MI
Angka putus sekolah SMP/MTs
Angka putus sekolah SMU/SMK/MA

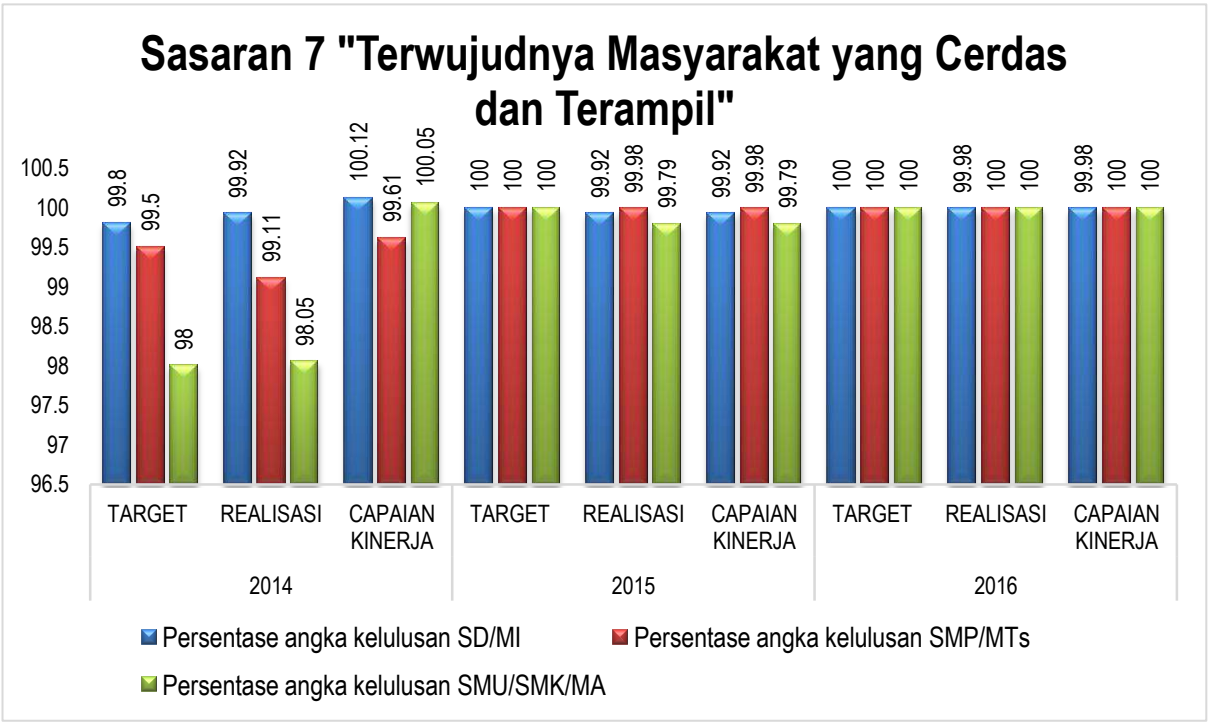
Sasaran 7 "Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan Terampil"
100.5
100
99.5
99
98.5
98
97.5
97
96.5
99.8
99.5
98
99.92
99.11
98.05
100.12
99.61
100.05
100
100
100
99.92
99.98
99.79
99.92
99.98
99.79
100
100
100
99.98
100
100
99.98
100
100
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
2014
2015
2016
Persentase angka kelulusan SD/MI
Persentase angka kelulusan SMP/MTs
Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA

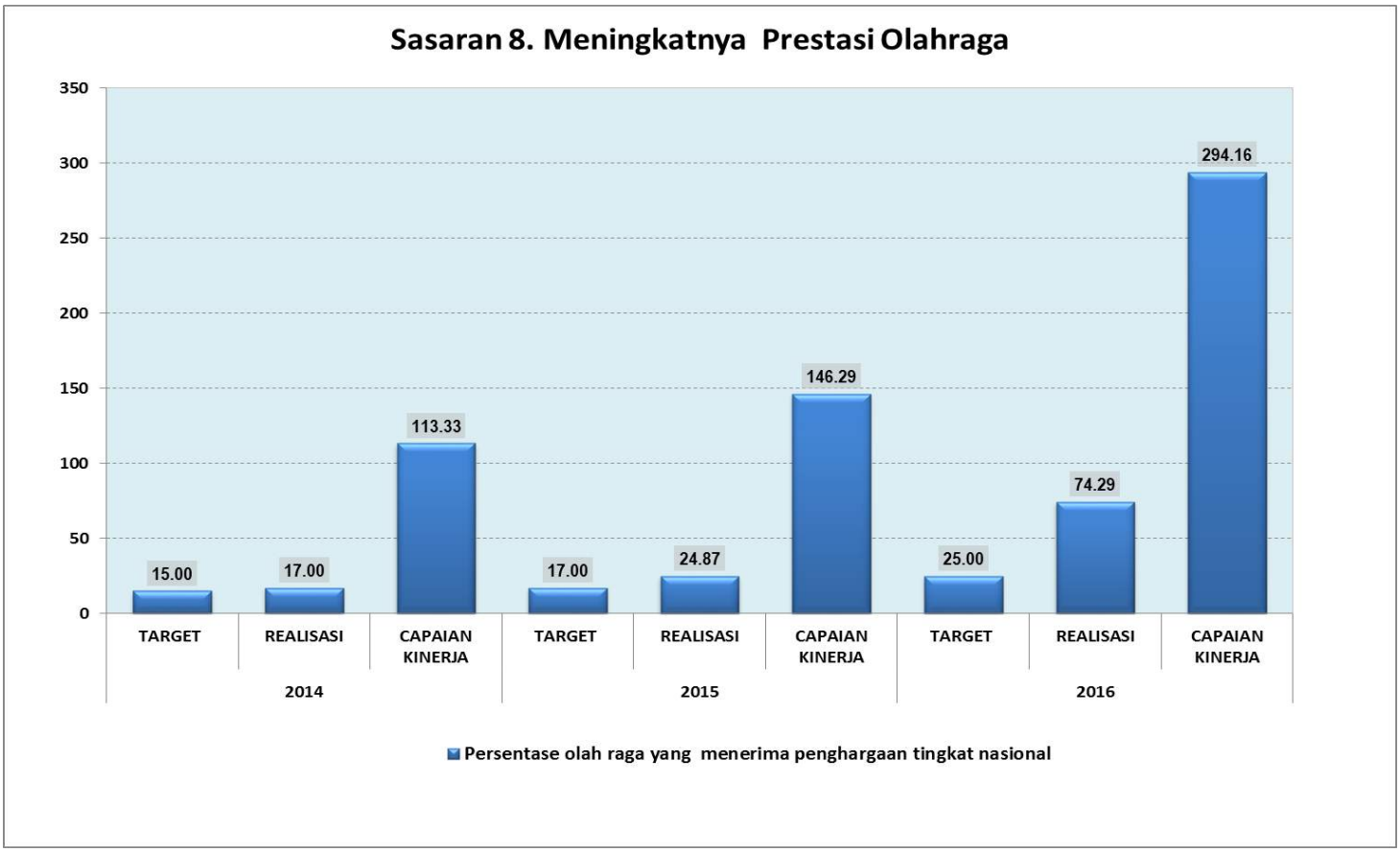
Sasaran 8. Meningkatnya Prestasi Olahraga
350
300
250
200
150
100
50
0
15.00
17.00
113.33
17.00
24.87
146.29
25.00
74.29
294.16
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
2014
2015
2016
Persentase olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional

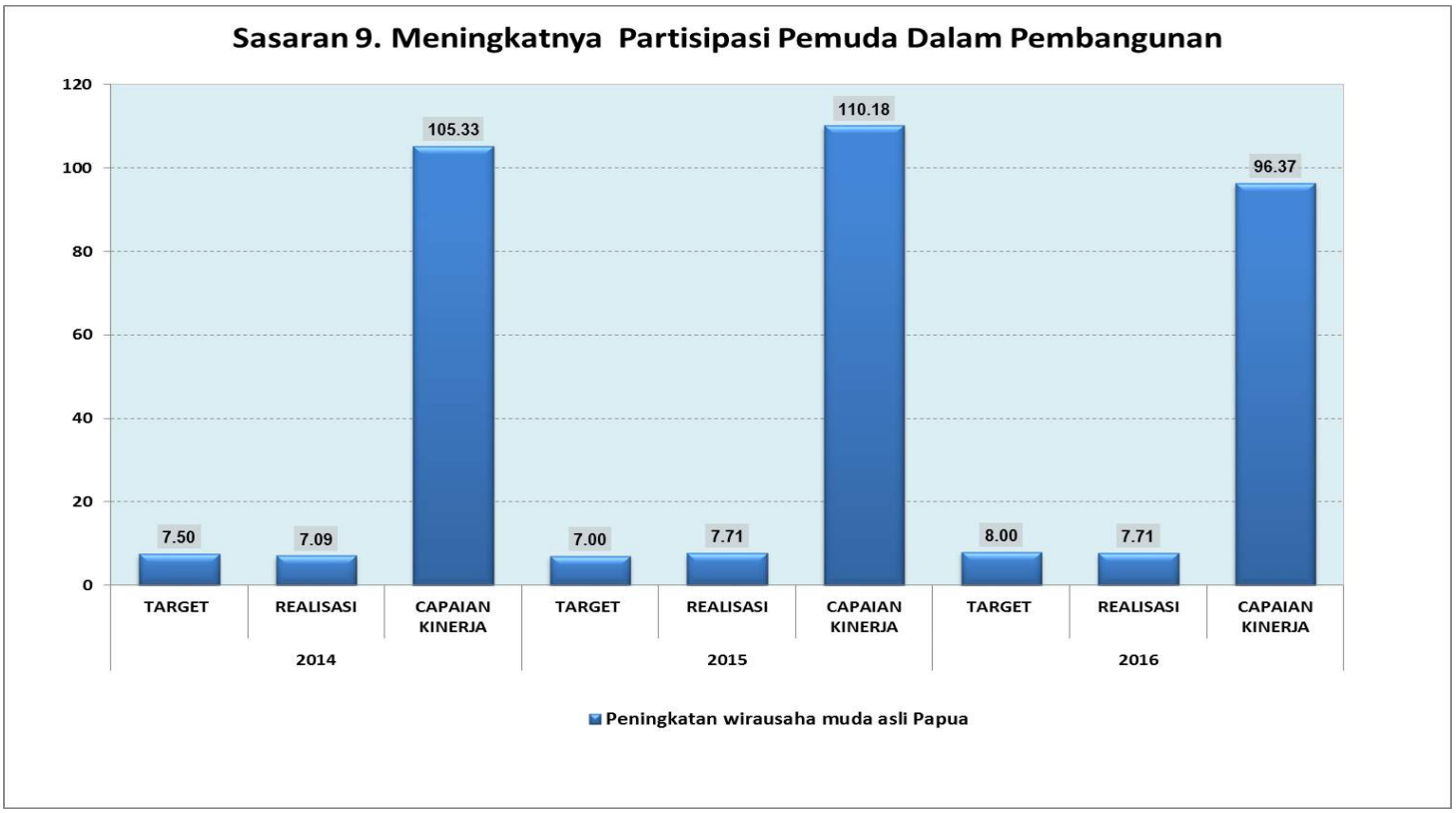
Sasaran 9. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan
120
100
80
60
40
20
0
7.50
7.09
105.33
7.00
7.71
110.18
8.00
7.71
96.37
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
2014
2015
2016
Peningkatan wirausaha muda asli Papua

Sasaran 10. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif

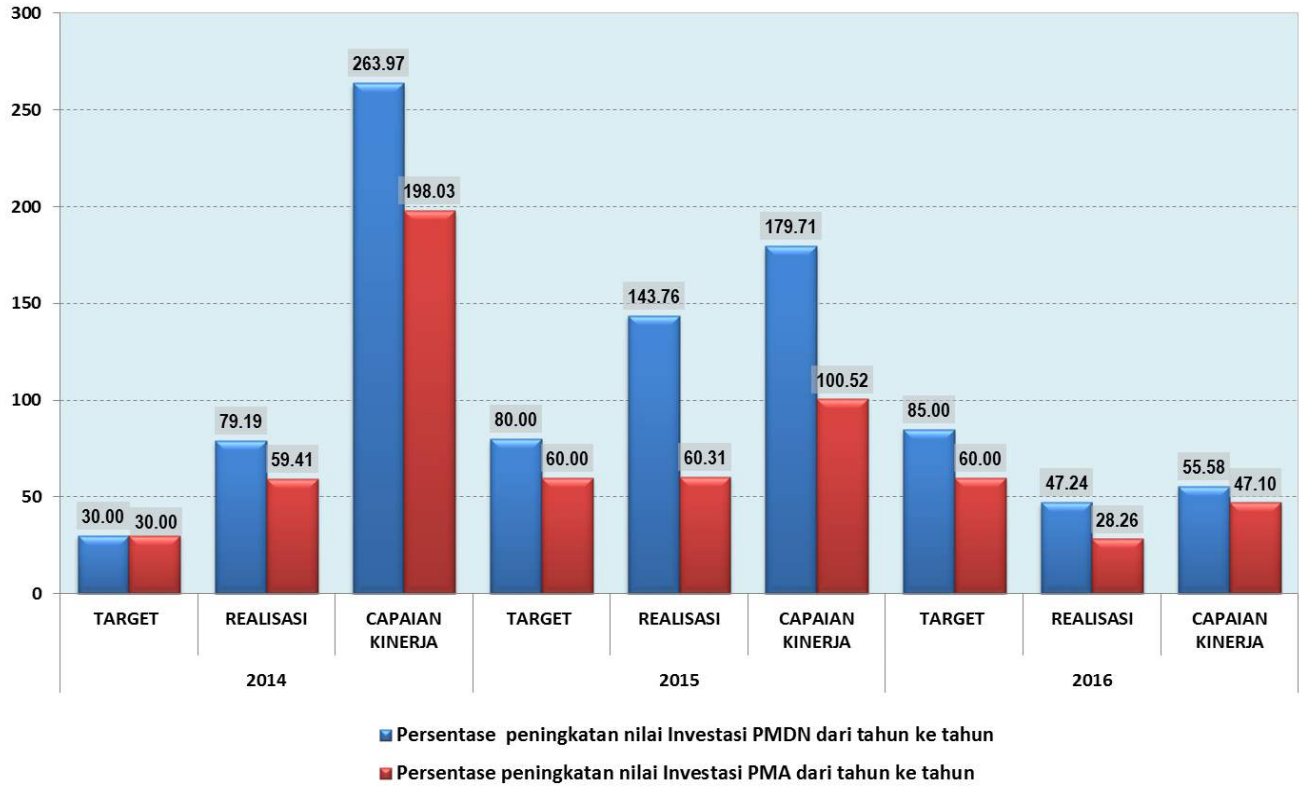

Sasaran 11. Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Koperasi dan UMKM

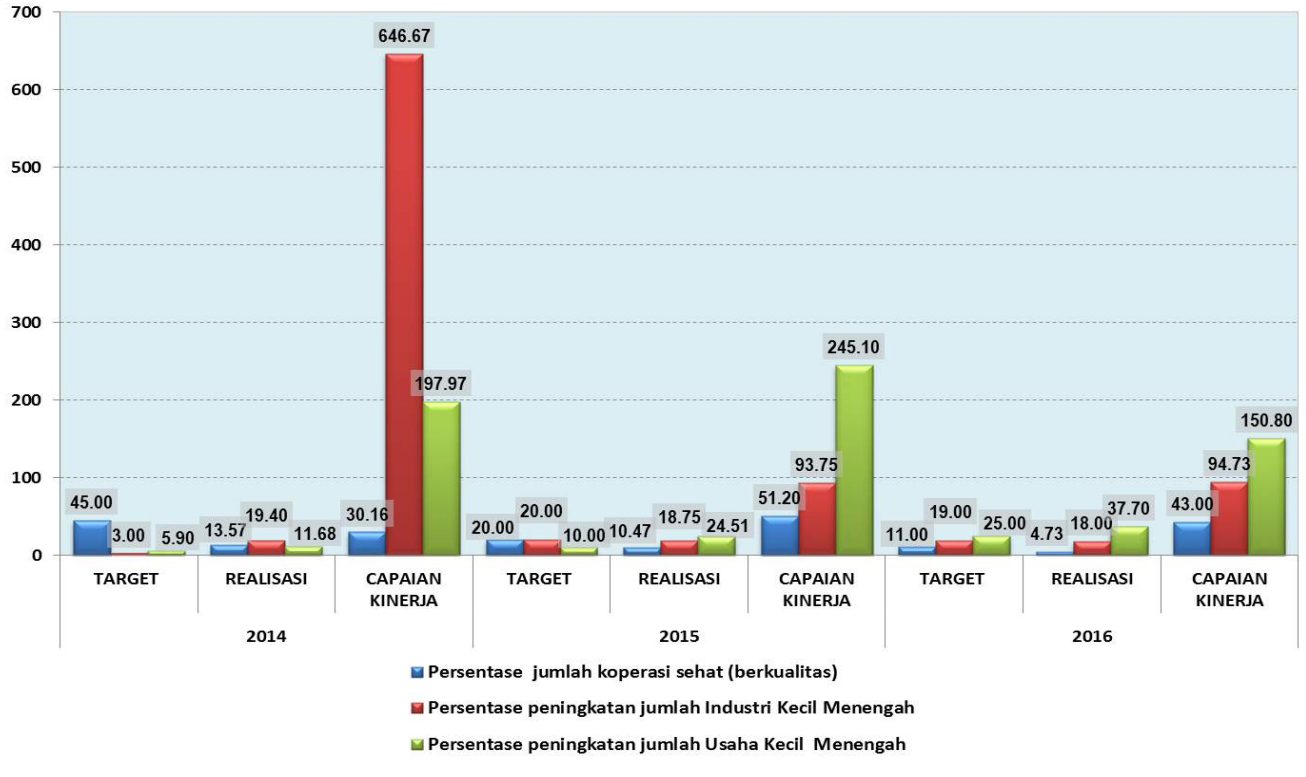

Sasaran 12. Terwujudnya Peningkatan Penyediaan Lapangan Kerja

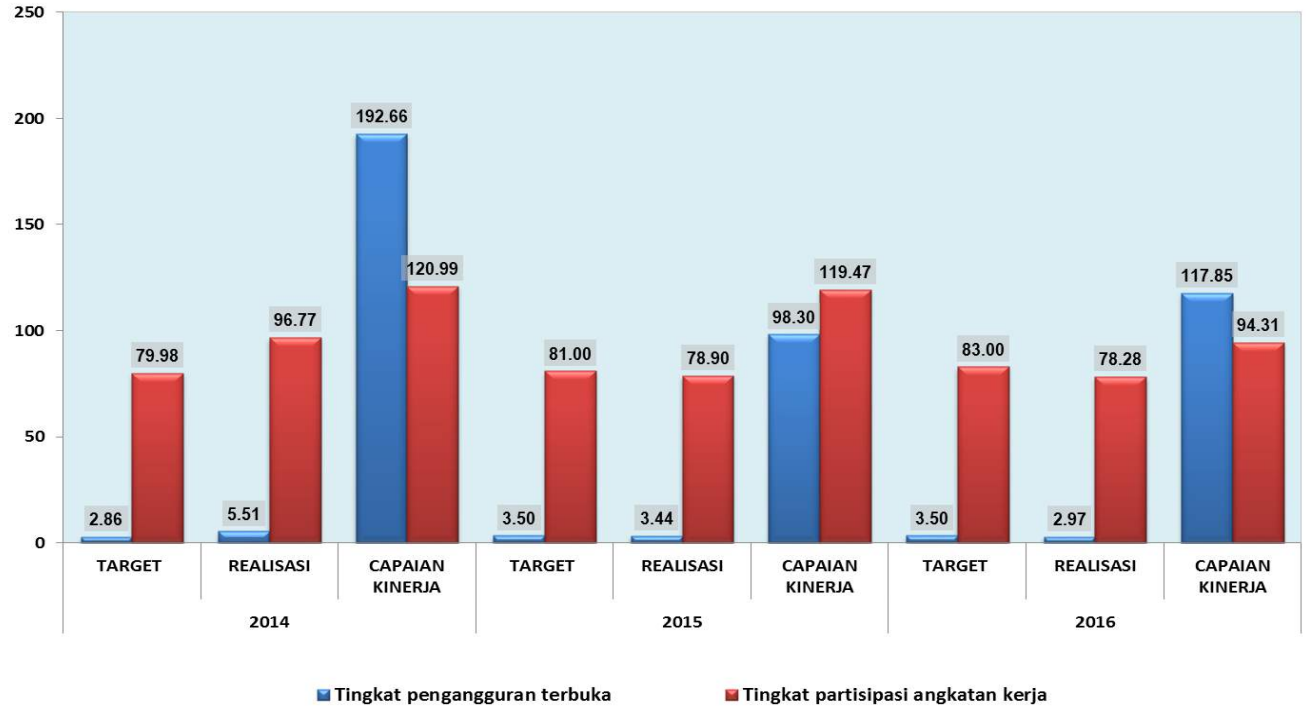

Sasaran 13. Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah

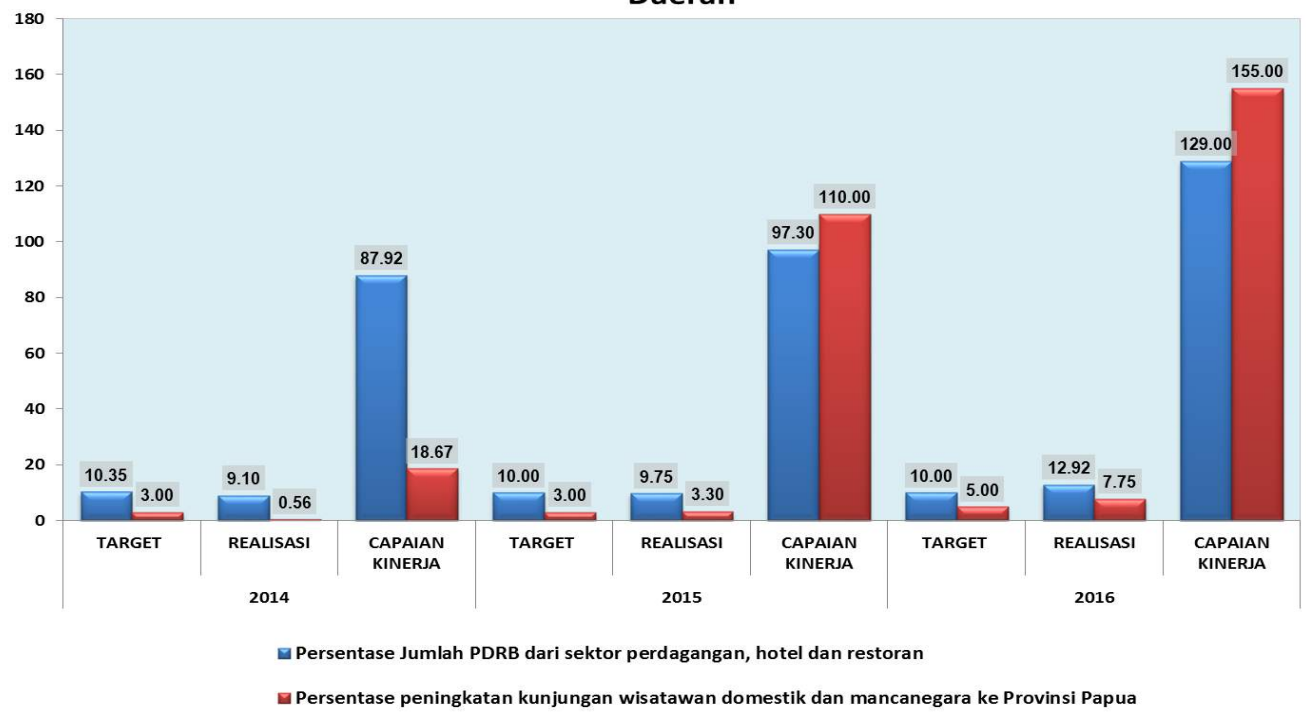

Sasaran 14. Terwujudnya Pengelolaan SDA Secara Lestari Mendukung Peningkatan Perekonomian Masyarakat

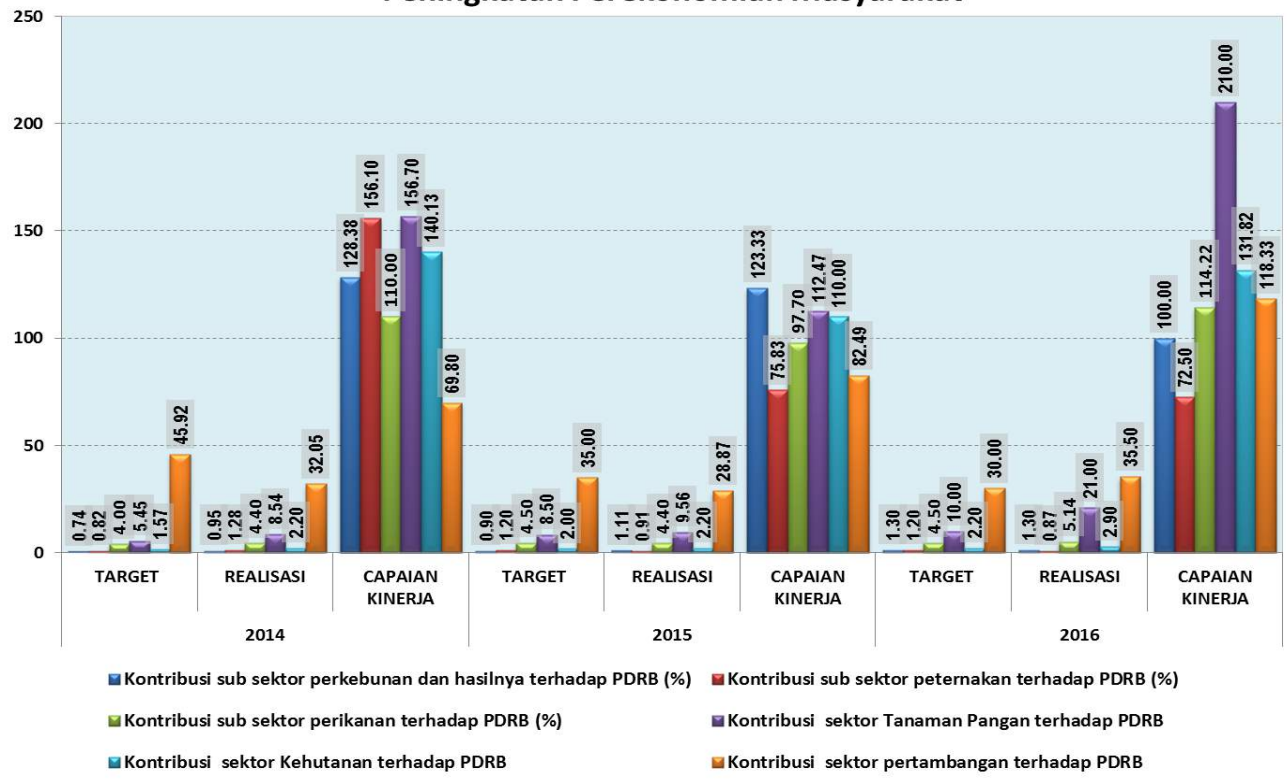

Sasaran 15. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

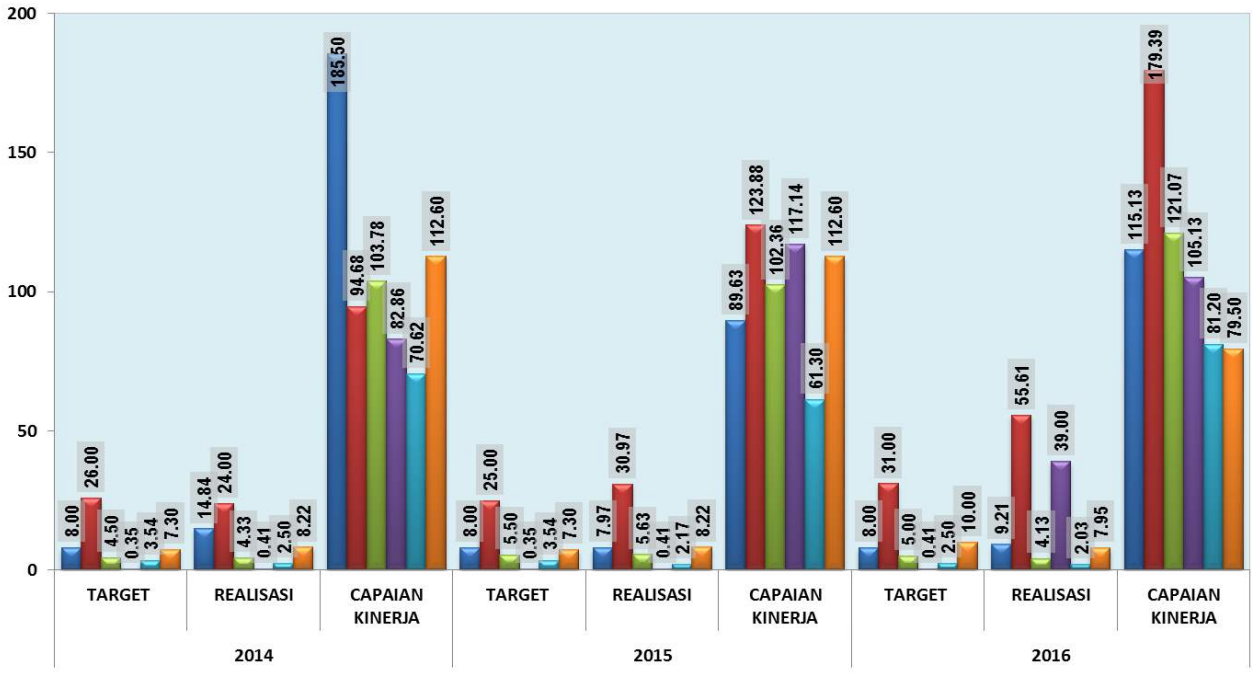

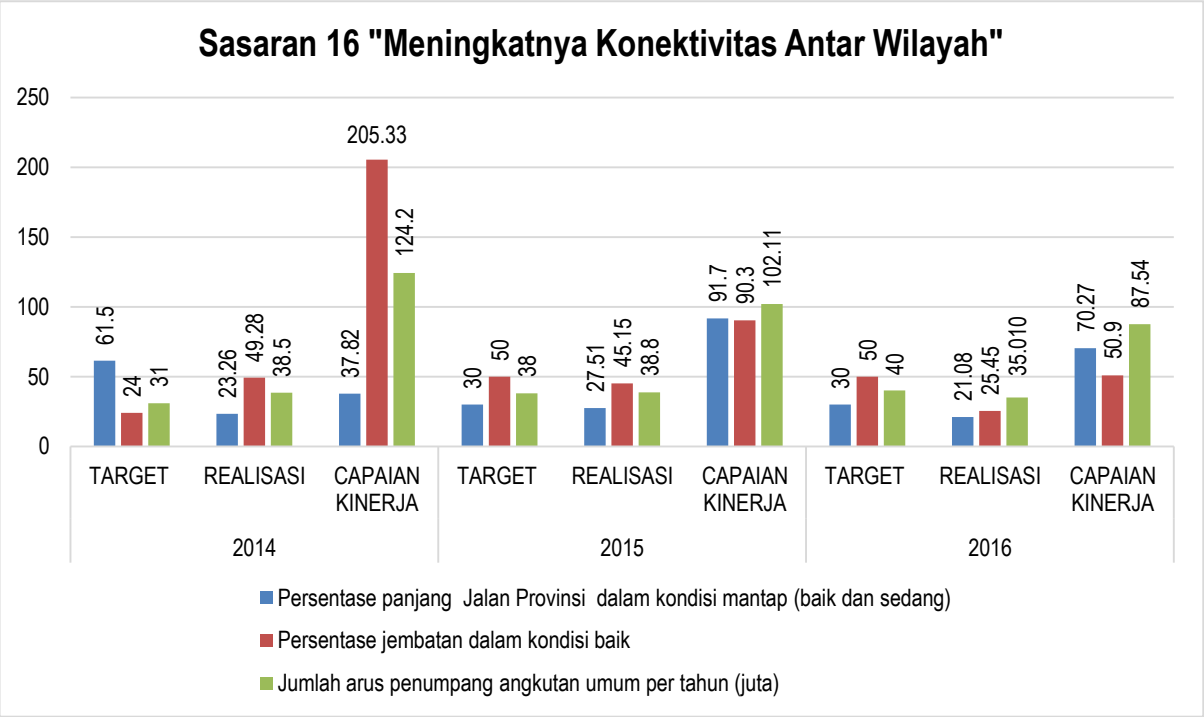
Sasaran 16 "Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah"
250
200
150
100
50
0
61.5
24
31
23.26
49.28
38.5
37.82
205.33
124.2
30
50
38
27.51
45.15
38.8
91.7
90.3
102.11
30
50
40
21.08
25.45
35.010
70.27
50.9
87.54
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
2014
2015
2016
Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)
Persentase jembatan dalam kondisi baik
Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun (juta)

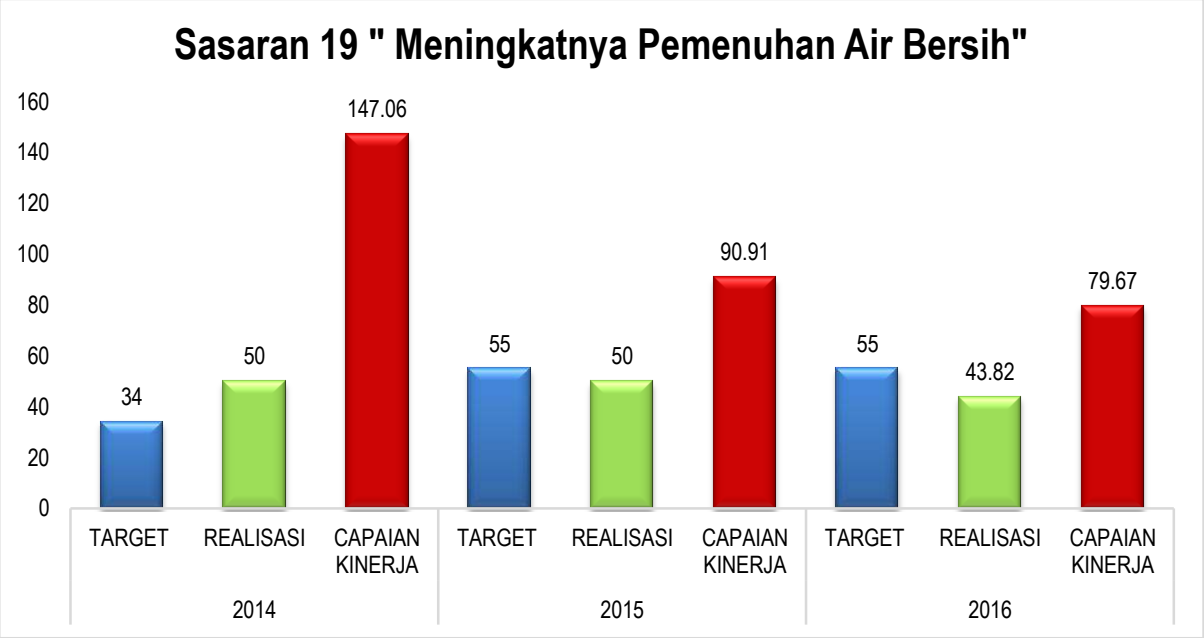
Sasaran 19 " Meningkatnya Pemenuhan Air Bersih"
160
140
120
100
80
60
40
20
0
34
50
147.06
55
50
90.91
55
43.82
79.67
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
2014
2015
2016

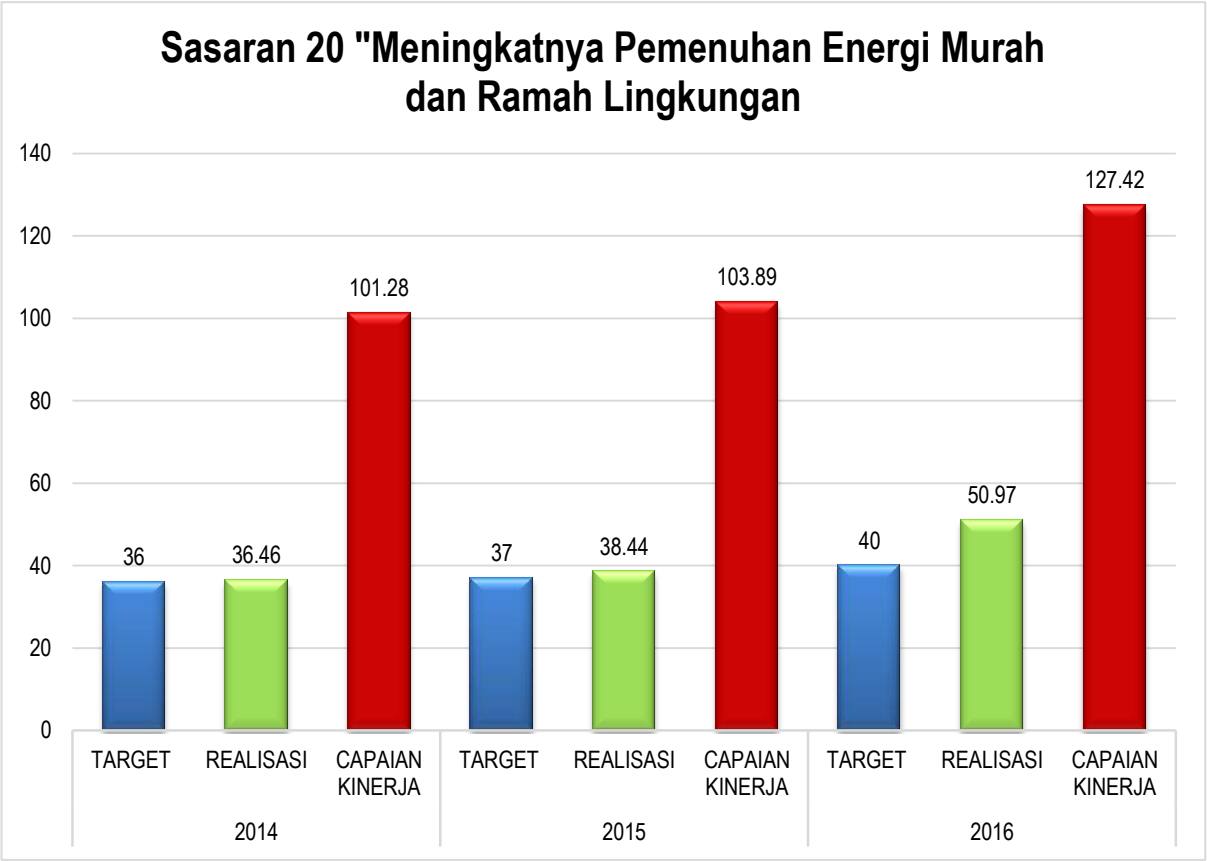
Sasaran 20 "Meningkatnya Pemenuhan Energi Murah dan Ramah Lingkungan
140
120
100
80
60
40
20
0
36
36.46
101.28
37
38.44
103.89
40
50.97
127.42
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
2014
2015
2016

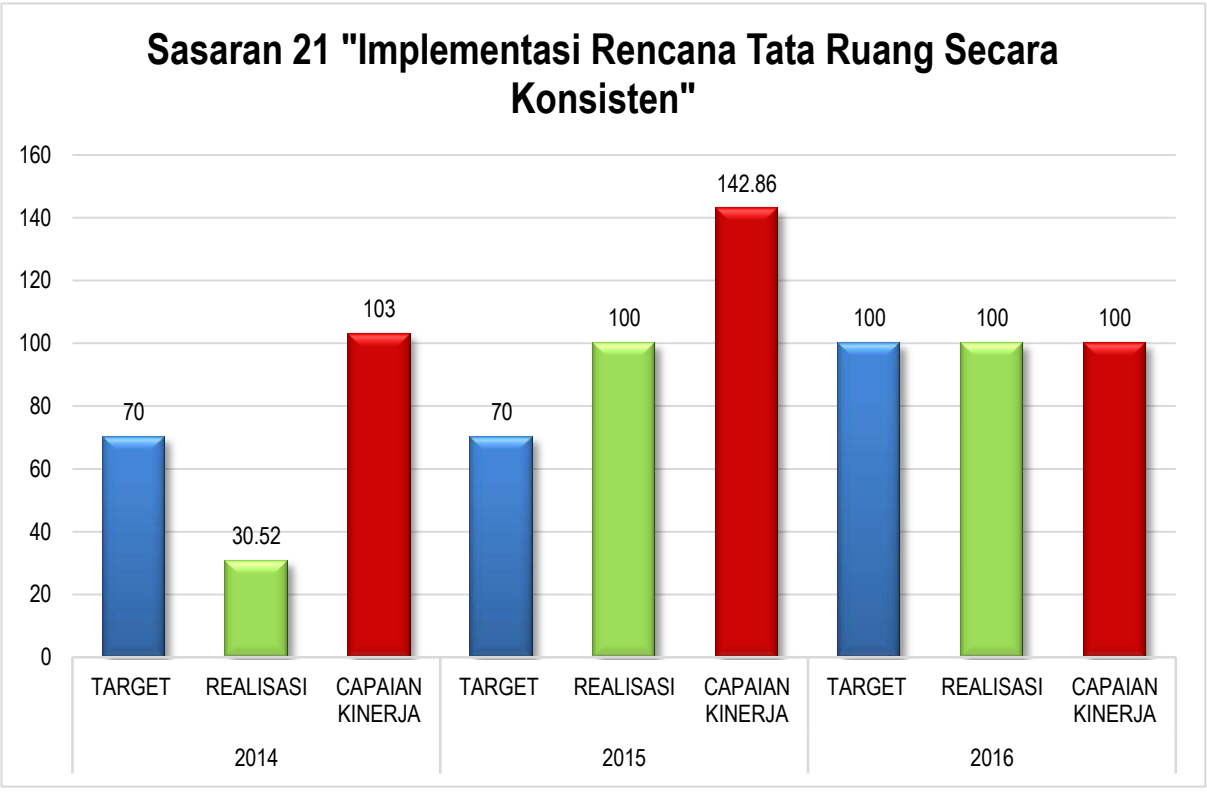
Sasaran 21 "Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten"
160
140
120
100
80
60
40
20
0
70
30.52
103
70
100
142.86
100
100
100
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
2014
2015
2016

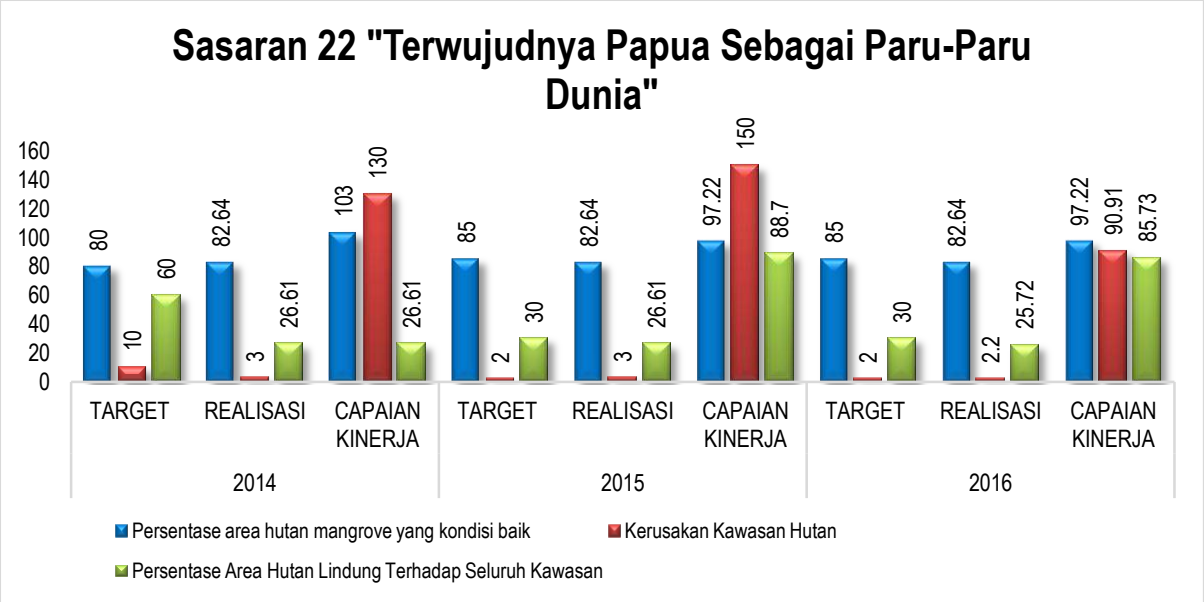
Sasaran 22 "Terwujudnya Papua Sebagai Paru-Paru Dunia"
160
140
120
100
80
60
40
20
0
80
10
60
82.64
3
26.61
103
130
26.61
85
2
30
82.64
3
26.61
97.22
150
88.7
85
2
30
82.64
2.2
25.72
97.22
90.91
85.73
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
2014
2015
2016
Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik
Kerusakan Kawasan Hutan
Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Penghargaan

Diberikan Kepada:

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BP2T-PM)
PROVINSI PAPUA

atas Peran Aktif Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Tahun 2015
dengan Zona Hijau Kategori Kepatuhan Pemenuhan Standar Layanan Sektor Perizinan
sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Jayapura, 22 Februari 2016
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan Provinsi Papua

Iwan Sabar Olif, S.H.

PENGHARGAAN ATAS PERAN AKTIF MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA TAHUN 2015 DENGAN ZONA HIJAU KATEGORI KEPATUHAN PEMENUHAN STANDAR LAYANAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN TENTANG PELAYANAN PUBLIK

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Penghargaan

Diberikan Kepada:

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA
(UPTD SAMSAT)

atas Peran Aktif Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Tahun 2015
dengan Zona Hijau Kategori Kepatuhan Pemenuhan Standar Layanan
sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Jayapura, 22 Februari 2016
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan Provinsi Papua

Iwanggin Sabar Olif, S.H.

Menteri PAN dan RB Menyerahkan Sertifikat Penghargaan kepada Gubernur Papua atas pencapaian Akreditasi A untuk Diklat PIM III dan IV serta Akreditasi B untuk Diklat Prajabatan. Diserahkan di Jayapura, 3 Maret 2017

Kepala Dinas Pendapatan Daerah- DR. MUHAMMAD RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM (kiri) dan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal-JHONI WAY,S.Hut, M.Si menerima Piagam Penghargaan Apresiasi Kepatuhan Pemerintah Provinsi Papua dari OMBUDSMAN RI Perwakilan Papua (Bapak SABAR IWANGGIN Tema Batik Biru) disaksikan Asisten II Bapak Elia Loupaty. Di Jayapura Papua Tahun 2015

Dalam rangka pencapaian Sasaran 7 (Tujuh) yaitu Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan “Anugerah Aksara Pratama” kepada Gubernur Papua atas Kinerja dan Kepedulian yang tinggi dalam percepatan pemberantasan Buta Aksara di Provinsi Papua.
Jakarta, 20 September 2014.